

363.5
JER

P a

**PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMLAPURA**

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

oleh :

I WAYAN SERAMAN
L4D000190



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, September 2002

I WAYAN SERAMAN
NIM L4D000190

**PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMLAPURA**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

I WAYAN SERAMAN
L4D000190

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 28 September 2002

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, September 2002

Pembimbing Pendamping



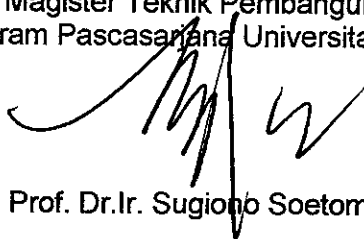
Ir. HADI WAHYONO, MA.

Pembimbing Utama



Ir. NANY YULIASTUTI, MSP.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA.

Tad widdhi pranipātena

Pelajarilah itu dengan sujud disiplin,

parippraśnena sewayā,

dengan bertanya dan dengan kerja berbakti;

upadeksyanti tejñānam

Orang yang berilmu, mereka melihat kebenaran,

jñāninas tattwadarsinah

akan mengajarkan kepadamu pengetahuan itu

(Bhagavad Gītā 10.29)

Dipersembahkan:

*Untuk Istri Tercinta Md. Rahayu,
dan Ananda L.W. Amara Humanda*

ABSTRAK

Rumah sebagai kebutuhan dasar di perkotaan, dari sisi persediaan (*supply side*) menghadapi masalah berkaitan dengan kuantitas, kualitas serta rendahnya daya beli masyarakat. Pembangunan perumahan adalah upaya memenuhi kebutuhan primer manusia yaitu papan yang memiliki fungsi dan peranan penting dalam kehidupan manusia. Pemerintah mendirikan Perum Perumnas dengan PP No. 29/1974 juncto PP Nomor 12 Tahun 1988, bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pengadaan perumahan Perum Perumnas sampai dengan Pelita VI, menghasilkan rumah sebanyak 457.525 unit di seluruh Indonesia termasuk di Kota Amlapura Ibukota Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, dengan menghasilkan perumahan standard (*finished product*).

Sementara dari sisi permintaan (*demand side*), orang Bali yang beragama Hindu memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap perumahan tradisional sebagai wujud budaya tradisional Bali, kebutuhan perumahan untuk kegiatan ritual/agama dilandasi filosofi, konsepsi dan nilai-nilai.

Pembangunan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura di atas lahan 7,68 Ha, membangun 611 unit rumah terdiri dari; 412 unit tipe RSS 21, 170 unit tipe RS D21 dan 29 unit RS D36, dengan menyediakan lahan untuk fasilitas umum, seperti; tempat ibadah (Pura, Mesjid dan Gereja), Taman kanak-kanak, SD, Puskesmas, tempat bermain, lapangan olah raga dan balai pertemuan. Pemilik, sebagian besar (77,5%) beragama Hindu, setelah dihuni dalam perkembangannya perumahan mengalami perubahan.

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini, Perum Perumnas (*supply side*) sebagai provider, menyediakan perumahan standard (*typikal*) setelah dihuni mengalami perubahan (*housing adjustment*). Orang Bali (*demand side*) memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap perumahan tradisional sesuai kebutuhan budaya tradisional yang dilandasi agama Hindu, rumah sebagai wadah aktivitas kegiatan sehari-hari, agama dan adat. Perumahan bukan sekedar tempat berlindung tapi kebutuhan sosial yang dapat memberikan spirit atau motivasi (*housing is a process*), dilakukan perubahan rumah, yang berarti pemborosan investasi. Jadi pertanyaan penelitian: "sejauh mana pengaruh budaya tradisional Bali terhadap perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura.

Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dan keterkaitannya dengan pengaruh budaya tradisional Bali. Dengan didukung kajian literatur perumahan dan budaya tradisional Bali, penelitian dilaksanakan dengan metode Deskriptif, melalui analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif untuk mengkaji perubahan perumahan berkaitan dengan kebutuhan penghuni, dan analisis kuantitatif untuk melihat keterkaitan dan kuatnya faktor pengaruh dilakukan dengan cara Crosstab, Chi Square dan Koefisien Kontingensi.

Perubahan rumah yang terjadi mencapai 91,6%, diantaranya (63,4%) dengan perluasan dan (28,2%) dengan perombakan, sedangkan perubahan kawasan perumahan yang dilihat dari perubahan fasilitas umum, meliputi; Balai RT, Pura, Taman Kanak-kanak, 4 unit Tempat bermain dan sebagian lapangan olah raga menjadi Bale banjar dan Pura banjar. Alasan penghuni merubah rumah, sebagian besar (52,1%) karena agama dan nilai-nilai tradisional, dan penyebab perubahan fasilitas umum (53,5%) karena kebutuhan adat.

Hasil penelitian menunjukkan, terjadi perubahan rumah akibat kebutuhan ruang kegiatan keagamaan dengan tambahan Sanggah/Pemerajan, juga untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai tradisional. Sedangkan perubahan kawasan perumahan akibat dari sistem kemasyarakatan, kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan yang membutuhkan fasilitas sosial kemasyarakatan Bale banjar dan Pura banjar sesuai dengan faktor-faktor perumahan tradisional. Perubahan rumah sangat erat kaitannya dengan budaya tradisional Bali.

Kesimpulan, terdapat pengaruh budaya tradisional Bali terhadap perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, baik dalam rumah maupun terhadap kawasan perumahan. Rekomendasi yang di berikan, antara lain: untuk Perum Perumnas dalam pengadaan perumahan agar memperhatikan nilai-nilai budaya lokal, khususnya di Bali kebutuhan ruang budaya dalam rumah adalah sebagai kebutuhan dasar. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten agar dilakukan penjabaran konsep Tri Hita Karana yang lebih bersifat teknis untuk dapat dijadikan arahan dalam perencanaan tata ruang, perencanaan fisik dan penerbitan IMB. Dan untuk pengembangan penelitian lanjutan, agar dilakukan studi batasan minimal kebutuhan ruang tempat Sanggah/Pemerajan dalam rumah, serta studi luasan wilayah efektif satu kesatuan komunitas desa atau banjar.

Kata kunci: Budaya Tradisional Bali, Perumahan, Perum Perumnas

ABSTRACT

Refer to supply side, housing for machinery topics on urban is related to quantity, quality and low purchasing ability of people. Housing development for machinery is efforts to attain a certain aim in human's life. The Government has found National Housing Authority (Perumnas) based on government regulation No. 29/1974 junco PP No. 12 /1988, responsibility in people provision of housing as a duty. Provision of National Housing Authority till 6th of five years development planning, has built 457.525 units of house in whole province, including on Amlapura city, capital of Karangasem regency province of Bali, result standard finished product.

Meanwhile from demand side, Balinese conviction and believe to traditional housing as shape into which Balinese traditional culture, housing demand for rituals/religion based on philosophy, concepts and values.

Built on 7,68 Ha area, National Housing Authority of Amlapura has built 611 unit of houses which are: 412 unit RSS, 120 RS D21 and 29 unit RS D36, sets a side for public facility, such as; pure, mosque, church, kindergarten, elementary school, public health service, court and public meeting room. The owner, (77,5%) Hindu Religion, after several times lived in there adjustment the meaning of housing.

The problem that want to be reveal on this research, National Housing Authority (supply side) as provider, preparing typical housing after lived in has change (housing adjustment). Balinese (demand side) convinced and believe that traditional housing is appropriate on traditional cultural demand based on Hinduism, house as daily place of activities, religion and tradition. Shelter is not only somewhere to live, but also social needs that could give motivation, (housing is a process), done changing house, it means lavish investment. Hence the question of this research: "how long the Balinese traditional culture of cultural influence about housing change of National Housing Authority in Amlapura.

The purpose of research is reciting the change housing of National Housing Authority in Amlapura city and significantly to Balinese traditional influence. Supported by literature recite housing and Balinese traditional culture, it has done by descriptive methods, through quantitative and qualitative analysis. The qualitative analysis is used to recite the changing of housing related to householder need, and quantitative analysis to measure significantly between influence factor with cross tabs methods, Chi Square and contingent coefficient.

The altering of house reaches out for (91,6%), (63,4%) by extension and 28.2% remodel, meanwhile changing of housing area that figures from change of public facility, includes: Balai RT, Pura, Kindergarten, 4 unit playground and a half court become Bale Banjar and Pura Banjar. The reason why householders change their home, (52,1%) they said because religion and traditional values, and cause of public facility change (53,5%) because traditional needs.

The result of research shows that the change of house because need of religion's space for activities and substitution sanggah/pemerajaan was going on, include traditional values adjusment. The changing housing area because society system, activities and religion that social facility. The changing of housing area because of system society, activities and religion that need civil society facilities need Bale Banjar and Pura Banjar appropriate traditional housing's factors. Changing of housing strongly significant with traditional Balinese's culture.

The conclusion, there were obtained Balinese traditional influence with changing of housing National Housing Authority of Amlapura city, both of inside or outside of housing area. Our recommendation is: National Housing Authority more concern to local traditional values in house provision, especially in Bali which the need of housing provision in house and space culture is basic need. For local government, performed Tri Hita Karana Concept which more technical in order to be direction refer to space arrangement planning, physical planning and Built Building License (IMB) Publication. For future research, study of minimum limits the need of sanggah/pemerajan in house, and study of effective scope area in whole community of village or banjar are going on.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), atas tersusunnya Tesis ini, sebagai persyaratan Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro - Semarang.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ir. Nany Yuliasuti, MSP; selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan dan arahan di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai Sekretaris Jurusan.
2. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA; selaku Co-Mentor yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tulisan ini.
3. Ibu Ir. Sunarti, MT; selaku pembahas yang telah memberikan koreksi dan saran-saran untuk penyempurnaan tulisan ini.
4. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP; selaku Penguji yang telah memberikan saran untuk penyempurnaan tulisan ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA; selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro.
6. Gubernur Bali, Bupati Karangasem dan Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem, atas kesempatan yang diberikan.
7. Mr. George Soraya selaku perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan konsultan Urban Manajemen Training, Bapak Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc; yang telah membantu kelancaran proses studi.
8. Pimpinan dan staf kantor Perum Perumnas Cabang Bali, Ketua dan Sekretaris RT beserta para responden dalam lingkungan Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura; atas waktu dan data yang diberikan.
9. Istri dan anak tercinta, Ibu dan adik-adik, Bapak mertua beserta keluarga besar di Bali; yang selalu mendampingi dengan doa.
10. Adik Mang Koh (calon Kepala Bappeda Klungkung) yang telah banyak sekali membantu, Mang Weka, Gde Brata, Gus Wiratmaja, De Wisnawa, beserta rombongan Bali, Budiarta, Ngurah Suardika, Sudata, Devi; atas kerjasamanya.
11. Bapak Ir. Nyoman Sukamara CES, Ir. Nyoman Nipa, Yan Amok, Bapak Nengah Utama SE, Nyoman Siki Ngurah, Ayuk, Ketut Suadnyana; atas bantuan untuk kelancaran penelitian ini.
12. Staf administrasi dan pengelola MTPK, Mas Janu, Mbak Lulu, Didin, Ratih, Linda, Prie; yang telah mempersiapkan pelaksanaan sidang Tesis.
13. Bapak Ir. Komang Sugiarta, Ir. Wayan Kerta beserta staf Yowana Teknika, dan semua teman-teman di kantor Bappeda Kabupaten Karangasem; atas bantuan dan doa restunya.
14. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian tetap berharap agar bermanfaat dan memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan.

Semarang, September 2002
Penulis,

I Wayan Seraman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PRIBADI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Sasaran Penelitian.....	9
1.3.3 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.4.1 Lingkup Substansial	10
1.4.2 Lingkup Spasial	11
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Pendekatan Dan Metode Penelitian	17
1.6.1 Pendekatan Penelitian	17
1.6.2 Teknik Analisa.....	18
1.6.3 Metode Pelaksanaan Penelitian	21
1.6.4 Kerangka Analisis	24
1.7 Sistematika Penulisan	25
BAB II PERUMAHAN SEBAGAI KEBUTUHAN DASAR YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BUDAYA TRADISIONAL BALI	
2.1 Pengertian Rumah Sebagai Kebutuhan Dasar	27
2.1.1 Pengertian Rumah	27
2.1.2 Rumah Sebagai Kebutuhan Dasar	28
2.1.3 Rumah Sebagai Proses	31
2.1.4 Perubahan Rumah	32

2.2 Penyediaan Perumahan Melalui Perum Perumnas.....	35
2.2.1 Latar Belakang Perum Perumnas	35
2.2.2 Perumahan Perum Perumnas	37
2.3 Perumahan Tradisional Sebagai Perwujudan Budaya Tradisional Bali.....	40
2.3.1 Konsepsi Tentang Budaya Tradisional Bali.....	40
2.3.2 Landasan Filosofi Perumahan Tradisional Bali.....	42
2.3.3 Perumahan Tradisional Bali.....	48
2.4 Resume Kajian Pustaka.....	63

BAB III GAMBARAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

3.1 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karangasem.....	67
3.1.1 Kebijakan Umum Pembangunan	67
3.1.2 Kebijakan Pembangunan Perumahan	67
3.2 Kota Amlapura	68
3.2.1 Kondisi Fisik	68
3.2.2 Kependudukan	70
3.2.3 Lembaga Pemerintahan Dan Adat	72
3.3 Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura	73
3.3.1 Gambaran Umum	73
3.3.2 Karakteristik Penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura	75
3.3.3 Faktor Budaya Tradisional Dalam Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura.....	78
3.3.4 Faktor Perubahan Rumah Dalam Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura	85

BAB IV PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

4.1 Analisa Perubahan Perumahan Perum Perumnas	90
4.1.1 Perubahan Rumah	90
4.1.1.1 Perubahan Akibat Kebutuhan Ruang Kegiatan Agama	91
4.1.1.2 Perubahan Akibat Kebutuhan Nilai-Nilai Tradisional Bali... ..	94
4.1.2 Perubahan Kawasan Perumahan	103
4.1.2.1 Perubahan Akibat Faktor Sosial.....	104
4.1.2.2 Perubahan Akibat Faktor Simbolik.....	114
4.1.2.3 Perubahan Akibat Faktor Fungsional	121
4.1.2.4 Perubahan Akibat Faktor Morfologi.....	126
4.2 Analisa Faktor Pengaruh Perubahan Rumah Perum Perumnas... ..	130
4.2.1 Karakteristik Penghuni Terhadap Perubahan Rumah	130
4.2.2 Budaya Tradisional Terhadap Perubahan Rumah	131
4.2.3 Alasan Merubah Rumah Terhadap Perubahan Rumah	134

BAB V	PENUTUP	
	5.1 Temuan Studi	137
	5.2 Kesimpulan	143
	5.3 Rekomendasi	145

DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151

DAFTAR TABEL

			Halaman
TABEL	I.1	JENIS VARIABEL PENELITIAN	19
TABEL	I.2	TABULASI SILANG ANTARA VARIABEL TETAP DENGAN VARIABEL BEBAS DAN VARIABEL PENGENDALI	20
TABEL	I.3	KONSEP KEBUTUHAN DATA	22
TABEL	II.1	STANDARD MINIMUM RUMAH SEHAT KPR-BTN.....	40
TABEL	II.2	TRI HITA KARANA DALAM SUSUNAN KOSMOS.....	44
TABEL	II.3	TRI ANGGA DALAM SUSUNAN KOSMOS.....	45
TABEL	II.4	KONSEP RUMAH DAN PERUBAHAN RUMAH	64
TABEL	II.5	KONSEP RUMAH SEBAGAI KEBUTUHAN BUDAYA TRADISIONAL BALI	66
TABEL	III.1	PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA AMLAPURA TAHUN 2000.....	70
TABEL	III.2	PENDUDUK, PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA AMLAPURA TAHUN 2000.....	71
TABEL	III.3	LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN ADAT DI KOTA AMLAPURA.....	72
TABEL	III.4	PEMBANGUNAN RUMAH DAN FASILITAS UMUM DALAM PERUMAHAN PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA TAHUN 1994	73
TABEL	III.5	USIA KEPALA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN PERUM PERUMNAS.....	75
TABEL	III.6	PENDIDIKAN KEPALA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN PERUM PERUMNAS.....	76
TABEL	III.7	MATA PENCAHARIAN KEPALA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN PERUM PERUMNAS.....	76
TABEL	III.8	PENDAPATAN KEPALA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN PERUM PERUMNAS.....	77
TABEL	III.9	ANGGOTA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN PERUM PERUMNAS.....	77
TABEL	III.10	PELAKSANAAN UPACARA AGAMA DI RUMAH	78
TABEL	III.11	KEBUTUHAN TEMPAT <i>SANGGAH</i> DALAM PETAK RUMAH	79
TABEL	III.12	PELAKSANAAN UPACARA AGAMA DI PURA BANJAR.....	79
TABEL	III.13	KEBUTUHAN TEMPAT <i>PURA</i> DALAM PERUMAHAN .	80
TABEL	III.14	PELAKSANAAN UPACARA AGAMA SELAIN DI <i>PURA</i> <i>BANJAR</i>	81
TABEL	III.15	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PERUMAHAN PERUM PERUMNAS.....	81

TABEL	III.16	KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM PERUMAHAN PERUM PERUMNAS	82
TABEL	III.17	KEBUTUHAN TEMPAT <i>BALE BANJAR</i> DALAM PERUMAHAN	83
TABEL	III.18	PENERAPAN NILAI-NILAI TRADISIONAL BALI	84
TABEL	III.19	TATA LETAK RUANG TIDUR DAN KM/WC.....	84
TABEL	III.20	TATA LETAK <i>BALE BANJAR</i> DAN <i>PURA BANJAR</i>	85
TABEL	III.21	JENIS PERUBAHAN RUMAH DALAM PERUMAHAN PERUM PERUMNAS	86
TABEL	III.22	ALASAN PERUBAHAN RUMAH	86
TABEL	III.23	PERUBAHAN FASILILITAS UMUM DALAM PERUMAHAN PERUM PERUMNAS.....	87
TABEL	III.24	ALASAN PERUBAHAN FASILITAS UMUM	87
TABEL	III.25	FASILITAS UMUM BERUBAH MENJADI <i>BALE</i> DAN <i>PURA BANJAR</i>	89
TABEL	IV.1	HASIL CROSSTAB KARAKTERISTIK PENGHUNI DENGAN PERUBAHAN RUMAH	131
TABEL	IV.2	HASIL CROSSTAB FAKTOR-FAKTOR BUDAYA TRADISIONAL DENGAN PERUBAHAN RUMAH	133
TABEL	IV.3	HASIL CROSSTAB FAKTOR ALASAN MERUBAH RUMAH DENGAN PERUBAHAN RUMAH	135

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	1.1	Peta Pulau Bali Dan Kabupaten Karangasem	12
Gambar	1.2	Peta Kota Amlapura	13
Gambar	1.3	Peta Lingkungan Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura	14
Gambar	1.4	Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar	1.5	Kerangka Analisis	25
Gambar	2.1	Konsep Sanga Mandala.....	46
Gambar	2.2	Konsepsi Sanga Mandala Dan Tata Letak Bangunan Dalam Rumah.....	48
Gambar	2.3	Variasi Hubungan Antara Desa Adat dengan Desa Dinas.....	51
Gambar	2.4	Hubungan Struktural Dan Fungsional Antara Desa Adat, Desa Dinas, Banjar Adat Dan Banjar Dinas.....	54
Gambar	2.5	Pola Linier Perumahan Tradisioal Bali.....	58
Gambar	2.6	Pola Perempatan (Catus patha) Perumahan Tradisional Bali....	59
Gambar	2.7	Pola Kombinasi Perumahan Tradisional Bali.....	60
Gambar	2.8	Morfologi Perumahan Tradisional Bali	62
Gambar	3.1	Orientasi Kota Amlapura Dalam Tata Nilai Tradisional Bali ..	69
Gambar	3.2	Mata Pencarian Penduduk Kota Amlapura.....	71
Gambar	3.3	Penduduk Kota Amlapura Dirinci Menurut Agama	72
Gambar	3.4	Peta Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura Tahun 1994	74
Gambar	3.5	Pelaksanaan Jenis Upacara Dalam Rumah.....	78
Gambar	3.6	Pelaksanaan Jenis Upacara Di <i>Pura Banjar</i> Perumahan Perum Perumnas	80
Gambar	3.7	Alasan Ikut Banjar Dalam Perumahan Perum Perumnas.....	82
Gambar	3.8	Pengetahuan Terhadap Konsepsi Dan Nilai-Nilai Perumahan Tradisional Bali	83
Gambar	3.9	Peta Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura Tahun 2002	88
Gambar	4.1	Perubahan Rumah Dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura.....	92
Gambar	4.2	Varian Denah Rumah Tipe RSS 21 Dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura	97
Gambar	4.3	Varian Denah Rumah Tipe RS D21 Dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura	98
Gambar	4.4	Varian Denah Rumah Tipe RS D36 Dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura	99
Gambar	4.5	Perubahan Rumah Untuk Menyesuaikan Tata Nilai Tradisional	101
Gambar	4.6	Peta Kecendrungan Perubahan Rumah Akibat Tata Nilai	102
Gambar	4.7	Fasilitas Umum Yang Telah Dibangun Warga Perum Perumnas.....	105
Gambar	4.8	Peta Orientasi Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan Dalam Perumahan Perum Perumnas.....	106

Gambar	4.9	Peta Banjar Dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura	110
Gambar	4.10	Peta Orientasi Kegiatan Banjar	111
Gambar	4.11	Bale dan Pura Banjar Dalam Perumahan Perum Perumnas	112
Gambar	4.12	Sumbu Jalan Kaja-klod Dalam Perumahan Perum Perumnas ..	116
Gambar	4.13	Peta Arah Orientasi Kosmologis Dalam Perumahan Perum Perumnas.....	117
Gambar	4.14	Peta Simbolik Banjar Dalam Perumahan Perum Perumnas	119
Gambar	4.15	Sanggha Penumbak Rurung Pada Simpang Tiga	120
Gambar	4.16	Peta Pola Linier Dalam Perumahan Perum Perumnas	122
Gambar	4.17	Pola-Pola Perumahan Dalam Perumahan Perum Perumnas	124
Gambar	4.18	Peta Pola Gabungan Dalam Perumahan Perum Perumnas	125
Gambar	4.19	Perubahan Bentuk Ruang Dalam Perumahan Perum Perumnas	128
Gambar	4.20	Peta Morfologi Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura...	129
Gambar	5	Peta Perubahan Kawasan Perumahan	144

DAFTAR LAMPIRAN

			Halaman
Lampiran	A	Rancangan Penelitian.....	151
Lampiran	B	Data.....	157
Lampiran	B.1	Tabulasi Data Hasil Kuesioner.....	157
Lampiran	B.2	Katagori Jawaban Kuesioner.....	159
Lampiran	C	Hasil Analisis.....	161
Lampiran	C.1	Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Perubahan Rumah.....	161
Lampiran	C.2	Tabel <i>Chi Square</i>	181

DAFTAR ISTILAH

- Angga: jasad, badan, bagian (manusia, alam, dan lingkungan)
- Asta Bumi: lontar yang berisi tentang besar pekarangan, cara pengukuran, besar ukuran, prosesi, sirkulasi dan posisi pada tapak bangunan.
- Asta Kosala: lontar yang bersisi tata cara upacara pembangunan rumah.
- Asta Kosali: lontar yang berisi tentang pengukuran dimensi bangunan.
- Awig-awig: tata aturan tradisional yang dimiliki desa adat yang umumnya mengatur tentang keagamaan, kemasyarakatan dan wilayah.
- Bale Banjar: bangunan untuk tempat pertemuan dan kegiatan warga banjar
- Bale Kulkul: Bangunan tinggi tempat menaruh kentongan.
- Bale Meten: atau Bale Daja, bangunan dalam pekarangan rumah tradisional berfungsi sebagai tempat tidur.
- Bale Daging: atau Bale Gede, bangunan yang terletak di timur dengan fungsi utama tempat upacara Manusa Yadnya juga tempat tidur orang tua.
- Bale Dauh: atau disebut Loji, bangunan yang terletak di barat memiliki fungsi tempat mempersiapkan upacara juga ruang tidur.
- Banjar: bentuk komunitas masyarakat di Bali sebagai bagian desa (sub unit desa).
- Banjar Adat: banjar (sub unit desa adat) sebagai lembaga adat, berfungsi menyelenggarakan pelaksanaan upacara keagamaan dan kemasyarakatan.
- Banjar Dinas: banjar (sub unit desa dinas) sebagai lembaga pemerintah, berfungsi menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan dibawah desa dinas.
- Bhuana Agung: alam semesta atau alam raya.
- Bhuana Alit: isi alam semesta termasuk manusia.
- Catus Pata: sebutan lain untuk pola Pempatan atau Pempatan Agung dalam perumahan (desa) yang memiliki persilangan jalan.
- Desa (adat): bentuk komunitas masyarakat di Bali
- Desa Adat: Desa sebagai lembaga adat, berfungsi menyelenggarakan upacara agama dan sosial kemasyarakatan

Desa dinas/Perbekalan: Desa sebagai lembaga pemerintah, untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi di bawah kecamatan.

Desa-Kala-Patra: ketetapan sesuai dengan tempat-waktu dan keadaan.

Kahyangan Tiga: Tiga pura tempat sembahyang warga desa, yaitu Pura Desa/Bale Agung pemujaan Brahma, pura Puseh pemujaan Wisnu, dan Pura Dalem pemujaan Siwa.

Kaja: arah yang di Utamakan atau ke gunung.

Klod: arah yang lebih rendah atau ke laut.

Karang Desa/palemahan: wilayah desa.

Krama Banjar/pawongan: warga banjar.

Kulkul: kentongan terbuat dari kayu yang berfungsi sebagai alat komunikasi desa/banjar.

Kuren: keluarga dalam penentuan anggota banjar adat; Mekurenan orang yang sudah berumah tangga.

Kaja-kangin: daerah yang paling utama dalam tata ruang tradisional.

Madya: di tengah, antara nilai Utama dengan nilai Nista dalam tata nilai tradisional Bali.

Natah: ruang kosong ditengah-tengah pekarangan rumah tradisional, sebagai orientasi bangunan dalam rumah.

Paon: bangunan tempat memasak atau dapur dalam rumah tradisional Bali.

Pura Banjar: tempat sembahyang warga banjar.

Sanga Mandala: Konsepsi tata ruang yang membagi ruang secara imajiner menjadi sembilan bagian.

Sanggah/Pemerajan: tempat sembahyang keluarga; Pemerajan sebutan untuk selain Sudra.

Tlajakan: ruang peralihan antara tembok pekarangan dengan jalan.

Tri Hita Karana: konsepsi penataan lingkungan tradisional, yang terdiri dari; parhyangan, pawongan dan palemahan.

Tri Angga: Konsep tata nilai tradisional yang terdiri dari; Utama angga, Madya angga dan Nista angga.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah kota sepanjang masa mencatat masalah perumahan belum pernah tuntas bahkan terus bertambah. Pengalaman berbagai kota tua masa lalu dan kota modern sampai saat ini menunjukkan masalah perumahan tidak pernah selesai. Berbagai masalah dan kendala perumahan sering berbenturan karena tuntutan peningkatan mutu bagi masyarakat mampu dan kebutuhan sekedar papan atau tempat bernaung bagi penduduk kota yang miskin dan pendatang baru.

Pertambahan penduduk perkotaan mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan meningkat. Mengingat pengadaan perumahan di perkotaan sangat terbatas, pemenuhan kebutuhan perumahan masih sulit dipecahkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di lain pihak kebutuhan perumahan di perkotaan selalu meningkat dengan pesat yang disebabkan, antara lain; pertambahan penduduk, rumah yang harus diganti dan kekurangan rumah secara komulatif yang telah terjadi sebelumnya.

Rumah adalah kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Arti rumah bagi manusia bukan hanya sekedar tempat bernaung dan berlindung (*shelter*), menurut Maslow rumah merupakan salah satu motivasi untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tinggi, disamping kebutuhan jasmani lainnya seperti sandang, pangan dan papan.

Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia (butsarman), yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya struktural, sebagai bagian peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat (Yudohusodo, dkk, 1991: 2).

Jadi program pembangunan perumahan dan permukiman merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer manusia yaitu papan karena perumahan mempunyai fungsi dan peranan penting dalam kehidupan manusia.

Dari historis pembangunan perumahan di Indonesia, dilaksanakan secara swadaya berkembang membentuk komunitas yang lebih besar kemudian muncul permukiman atau yang dikenal dengan kampung. Dalam perkembangan pembangunan perumahan selain dilakukan masyarakat juga dilakukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai *provider* atau sebagai *enabler* (Panudju, 1999: 24). FC Turner dalam Budihardjo (1998: 44), menyebutkan tiga aktor pembangunan perumahan; pemerintah (*public sector*), swasta (*private sector*) dan masyarakat (*popular/community sector*). Selama ini pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun swadaya masyarakat.

Menyadari pentingnya rumah bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah mendirikan Perum Perumnas yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sesuai sejarah berdirinya Perum Perumnas (Silas, 1995: 12), pemecahan masalah perumahan di perkotaan dimulai Pelita I (1969-1974) melalui persiapan dan studi-studi pembangunan rumah murah guna mendukung kebijaksanaan pembangunan perumahan yang mendesak agar dilakukan secara cepat, murah dan menghasilkan banyak.

Perum Perumnas mengacu pada PP Nomor 121 tahun 1988 Pasal 6 (Panudju, 1999: 179), bertanggung jawab melaksanakan pengadaan perumahan mulai pengadaan lahan, rencana tapak, pematangan lahan, pembuatan rencana bangunan sampai pembangunan fisik rumah dan lingkungan. Dalam proses ini tidak ada keterlibatan masyarakat calon penghuni. Perum Perumnas memiliki fungsi ganda, yaitu; di satu pihak

melaksanakan fungsi sosial membantu masyarakat berpenghasilan rendah, di lain pihak harus memupuk keuntungan. Dengan demikian secara tidak langsung faktor non fisik antara lain sosial budaya penghuni, kurang diperhatikan/diabaikan dalam pendekatan pembangunan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, Perum Perumnas terbagi atas 6 (enam) wilayah kerja dan sampai dengan Pelita VI rumah yang dihasilkan sebanyak 457.525 dengan catatan 266.887 atau 58% untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (Panudju, 1999:4). Propinsi Bali termasuk cabang wilayah VI dengan cabang-cabang yang lainnya meliputi; Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur (sebelum pisah dengan negara Republik Indonesia).

Data Perum Perumnas cabang Bali (tahun 2000) menunjukkan; di Propinsi Bali sejak tahun 1981 sampai saat ini telah dibangun 5.131 unit rumah, pada 6 (enam) lokasi yaitu; Denpasar, Nusa Dua, Negara (2 lokasi), Amlapura, dan Tabanan. Kota Amlapura ibukota Kabupaten Karangasem salah satu kabupaten di Propinsi Bali tahun 1989 mendapat program pembangunan perumahan Perum Perumnas di atas lahan 7,68 Ha. Menyelesaikan 611 unit rumah, terdiri dari RSS 21 sebanyak 412 unit, RS D21 sebanyak 170 unit dan RS D36 sebanyak 29 unit. Fasilitas umum meliputi; tempat ibadah (Pura, Mesjid dan Gereja), Taman Kanak-Kanak, SD dan lapangan olah raga, Puskesmas, Tempat bermain, dan Balai RT (Data Perum Perumnas cabang Bali, 2000). Dengan keterbatasan sosial ekonomi, sebagian kebutuhan masyarakat akan perumahan terpenuhi, namun kendala yang dihadapi adalah rumah yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan penghuni karena latar belakang sosial budaya.

Dari sekian banyak perumahan yang dibangun pemerintah melalui Perum Perumnas, termasuk yang dibangun di Kota Amlapura, banyak mengalami perubahan dari

standar perumahan yang disediakan. Dampak negatif dari perubahan adalah pemborosan investasi, namun dampak positif yang diharapkan adalah perubahan yang dilakukan karena adanya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan keunikan budaya lokal, khususnya dalam perumahan.

Pada saat pemerintah sebagai penghasil rumah atau *provider*, hasil akhirnya adalah produk jadi atau *finished product* berupa rumah untuk dijual atau disewakan. Dalam sistem ini masyarakat tidak terlibat sehingga kemungkinan timbul ketidaksesuaian antara rumah yang dihasilkan dengan penghuninya. Maka kebanyakan rumah yang dibangun dengan bantuan KPR-BTN, langsung dibongkar begitu dihuni. Kekhasan lokal dalam tata cara hidup, perilaku, kebiasaan dan adat istiadat yang telah menciptakan jati diri masyarakat setempat harus menjadi landasan utama dalam perencanaan. (Budihardjo; 1998; 38). Bahkan Prof. Naomi Maeda, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk rumah merupakan ekspresi budaya daerah dan masyarakat setempat yang adiluhung, betapa pun muskilnya sikon yang dihadapi, sistem perumahan tetap harus dilihat sebagai sistem budaya yang mencuatkan keunikan lokal. (Budihardjo, 1998: 39)

Budaya tradisional Bali yang dilandasi agama Hindu, dalam kehidupan sehari-hari dalam pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan *Tatwa*, *Susila* dan *Upacara* melahirkan wujud budaya berupa nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, adat istiadat termasuk seni dan arsitektur. Rumah tradisional merupakan perwujudan dari upaya pemenuhan kebutuhan ruang sebagai wadah kegiatan dalam melaksanakan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; material dan spiritual (Pemda Tk.I Bali, 1984: 1).

Masyarakat Bali mengenal "*Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*" yang merupakan tujuan akhir hidup manusia, menurut agama Hindu akan tercapai bila tercapai keseimbangan antara *Bhuana alit* (mikro kosmos) dan *Bhuana agung* (makro kosmos),

manusia dan lingkungannya. Dalam kaitan ini rumah/lingkungan buatan (*Bhuana agung*) harus terjadi hubungan yang serasi dan harmonis dengan manusia (*Bhuana alit*) yang mendirikan dan menggunakan wadah tersebut. Keseimbangan antara makro kosmos dan mikro kosmos tercermin dalam konsep *Tri Hita Karana*, yang selanjutnya dijabarkan dalam konsep-konsep bangunan/ perumahannya.

Perumahan tradisional tidak semata-mata merupakan sekumpulan rumah dengan fasilitas lingkungannya. Perumahan/ permukiman tradisional Bali sebagai suatu komunitas bersama, disebut *desa* (adat) merupakan suatu tempat kehidupan yang utuh terdiri dari 3 unsur, yaitu: *kahyangan tiga* (*prahyangan/ pura desa*), *krama desa* (warga/ penghuni), *karang desa* (*palemahan, tanah desa*) (Sulistyawati, dkk, 1985: 3). Desa di Bali selain lembaga pemerintah juga dikenal *desa* (adat) sebagai lembaga tradisional untuk menyelenggarakan pelaksanaan upacara adat.

Perumahan atau permukiman tradisional merupakan tempat tinggal berpola tradisional dengan perangkat lingkungan dengan latar belakang norma-norma dan nilai-nilai tradisional (Gelebet, 1984: 48). Sebagai peninggalan budaya, desa-desa tradisional Bali yang memiliki pola ruang spesifik, terdapat di Kabupaten Buleleng (desa Julah, Sembiran dan Sidetapa), Kabupaten Gianyar (desa Kendran dan Manuaba), Kabupaten Bangli (Pengotan, Penglipuran, Sukawana dan Bayung Gde) dan di Kabupaten Karangasem desa Tenganan, Bugbug, Timrah dan desa Bungaya (Bappeda Tk. I Bali dan Universitas Udayana, 1982:21).

Bali dengan kebijaksanaan pembangunan berwawasan budaya yang berakar kuat pada *desa adat* dilandasi konsep *Tri Hita Karana* untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya termasuk hasil-hasil pembangunan. Pembangunan

harus memiliki citra arsitektur tradisional Bali, penerapan prinsip-prinsipnya agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada diperhitungkan dari segi kemajuan dan tuntutan jaman, seperti persediaan tanah, kebutuhan ruang, fungsi dan kemampuan serta keyakinan penghuninya selaku pemilik dan pemakai. (Subandi, 1990).

Dari uraian tersebut di atas, Perum Perumnas dalam penyediaan perumahan termasuk di Kota Amlapura, jelas memiliki orientasi dan kriteria yang sangat berbeda. Perum Perumnas sebagai *supply side* memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan perumahan sesuai beban dan target lebih berorientasi pada jumlah dan menonjolkan fisik, sedangkan rumah tradisional Bali yang merupakan *demand side* masyarakat Bali dengan konsepsi-konsepsi yang dilandasi agama Hindu.

Dalam perkembangannya sebagai komunitas yang terikat dengan adat-istiadat sampai terbentuk *desa* atau *banjar* (adat) yang memiliki konsepsi-konsepsi perumahan tradisional. Ini terlihat dari perubahan rumah maupun lingkungan perumahan berkaitan dengan fasilitas dan kelengkapannya, dengan persyaratan-persyaratan sesuai kebutuhan adat atau budayanya. Melihat data Perum Perumnas cabang Bali (tahun 2000), kepemilikan rumah Perum Perumnas mayoritas beragama Hindu, seperti halnya Perum Perumnas kota Amlapura mencapai 77,5 % atau yang paling banyak, disusul kota Tabanan (61,8 %), kota Denpasar (55,4 %), dan di Negara (46,5 %).

Perbedaan wujud perumahan yang dilaksanakan Perum Perumnas dengan konsep rumah tradisional merupakan perbedaan pijakan masing-masing falsafah rumah, sehingga diperlukan penyesuaian dari kedua hal tersebut, serta mendapat penyesuaian. Untuk itu perlu adanya penelitian terutama seberapa jauh budaya tradisional Bali mempengaruhi perubahan perumahan yang disediakan Perum Perumnas. Apalagi perumahan Perum

Perumnas di kota Amlapura, sebagian besar pemilik beragama Hindu dan memiliki latar belakang budaya yang kental dilihat dari keberadaan perumahan (desa) tradisional.

Secara tidak langsung, pengadaaan perumahan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya penghuninya. Perkembangan yang ada saat ini tidak dapat ditolak, sehingga diperlukan pengkajian di dalam melestarikan nilai budaya yang terkandung dalam suatu daerah. Akan sangat bijak nilai-nilai budaya tradisional dapat ditransformasikan dan berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan. Penggunaan konsep perumahan tradisional Bali adalah pencerminan dari pernyataan hidup budaya masyarakat Bali yang memiliki nilai magis, religius dan sosial dalam wujud keseimbangan batiniah dan rohaniah, bagaimana bila ini bisa dilakukan dalam perumahan yang dibangun Perum Perumnas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini :

1. Perum Perumnas dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, membangun rumah yang lebih banyak menekankan pada masalah fisik dan pencapaian target tertentu yang tercermin dari bentuk rumah yang umumnya standard (typikal). Setelah dihuni banyak mengalami perubahan. Menurut Turner (1991), pembangunan perumahan secara formal oleh pemerintah (*public housing*), sebagai sistem pembangunan perumahan terpusat, maksudnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah. Dalam sistem ini perumahan dibangun dalam bentuk jadi dan menggunakan standard-standard ideal.

2. Keyakinan dan kepercayaan orang Bali terhadap perumahan tradisional, rumah tidak semata menyangkut aspek fisik tapi juga non fisik sesuai budaya tradisional yang dilandasi agama Hindu. Rumah selain untuk aktivitas sehari-hari juga memenuhi kebutuhan psikologis untuk kegiatan keagamaan yang memiliki konsepsi dan nilai-nilai tradisional. Perumahan tradisional sangat terikat adat istiadat dalam suatu lembaga *desa* (adat) ataupun *banjar*. Sehingga rumah sebagai wadah aktivitas sehari-hari termasuk lingkungan perumahan harus sesuai dengan budaya.
3. Bila kemudian penghuni menyadari bahwa perumahan bukan sekedar tempat berlindung tapi merupakan kebutuhan sosial (*housing as a proses*) yang dapat memberikan spirit atau motivasi dalam mengembangkan kehidupan yang lebih tinggi. Maka untuk memenuhi kebutuhan penghuninya, dilakukan perubahan pada rumah dan perumahannya, yang mengakibatkan pemborosan investasi. Perubahan yang terjadi pada perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura karena ingin memenuhi kebutuhan perumahan yang sesuai dengan budaya, sehingga perlu antisipasi untuk pengadaan perumahan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian (*research question*) yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *Sejauh mana pengaruh budaya tradisional Bali terhadap perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura ?*

1.3 Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji jenis-jenis perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dan keterkaitannya dengan pengaruh budaya tradisional Bali.

1.3.2 Sasaran

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas, maka sasaran dari pembahasan ini, adalah;

1. Studi literatur konsep perumahan Perum Perumnas dalam rangka memenuhi rumah sebagai kebutuhan dasar, kemudian mengalami perubahan sesuai dengan konsep rumah sebagai proses.
2. Studi literatur konsepsi dan nilai-nilai perumahan tradisional sebagai perwujudan budaya tradisional Bali, yang dapat diterapkan dalam perumahan sesuai situasi dan kondisi perkembangan saat ini.
3. Identifikasi jenis-jenis perubahan dan tingkat perubahan yang terjadi pada perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, serta kebutuhan perumahan yang sesuai dengan budaya pemilik
4. Analisis perubahan perumahan Perum Perumnas dan keterkaitannya dengan budaya tradisional Bali.
5. Merumuskan konsepsi perumahan yang sesuai dengan budaya tradisional Bali untuk dapat dipakai dalam perencanaan perumahan Perum Perumnas.

1.3.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan, memperkaya ilmu perencanaan khususnya menyangkut perlunya memperhatikan nilai-nilai budaya lokal sebagai landasan dalam perencanaan.
2. Bagi Perum Perumnas atau Pemerintah, dapat dipakai sebagai acuan untuk memberi wawasan dalam mengevaluasi perencanaan pembangunan perumahan, yang memperhatikan nilai-nilai tradisional dan menghindari pemborosan investasi akibat dari perubahan-perubahan pada perumahan jadi.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Substansial

Ruang lingkup materi (substansial) mencakup aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian. Adapun aspek-aspek bahasan tersebut adalah:

1. Konsep perumahan Perum Perumnas dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dilihat dari pengertian rumah, rumah sebagai kebutuhan dasar, rumah sebagai proses dan perubahan rumah.
2. Konsepsi dan landasan filosofi perumahan tradisional sebagai perwujudan budaya tradisional Bali dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara rumah/wadah dengan penghuni/isi melalui tata letak sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Juga faktor-faktor dalam perumahan tradisional, seperti; faktor sosial, simbolik, fungsional dan morfologi.
3. Jenis perubahan perumahan dan tingkat perubahan yang terjadi dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, yaitu banyaknya perubahan rumah yang terjadi baik dengan perluasan atau perombakan serta perubahan fungsi dan jumlah fasilitas umum.
4. Karakteristik dan kebutuhan perumahan sesuai dengan budaya pemilik rumah dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura.
5. Perubahan rumah sebagai akibat kebutuhan budaya pemilik dan perubahan kawasan perumahan sebagai akibat faktor-faktor perumahan tradisional.
6. Keterkaitan perubahan rumah dengan karakteristik pemilik dan faktor-faktor budaya tradisional Bali.

7. Konsepsi perumahan tradisional Bali yang berpengaruh terhadap perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan perumahan Perum Perumnas.

1.4.2 Lingkup Spasial

Penelitian berlokasi di Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura Ibukota Kabupaten Karangasem, salah satu dari 9 (sembilan) kabupaten di Propinsi Bali yang terletak di ujung Timur Pulau Bali. Kota Amlapura dan Kabupaten Karangasem dalam Pulau Bali dapat dilihat dalam Gambar 1.1 dan 1.2.

Lingkup spasial penelitian ini meliputi kompleks Perumahan Perum Perumnas Padangkerta, Perum Perumnas Wilayah VI cabang Propinsi Bali-lokasi Amlapura. Secara administratif termasuk wilayah Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem di Amlapura. Lingkungan Perumahan dapat dilihat dalam Gambar: 1.3 dan batas-batas wilayah penelitian sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Cempaka (jalan lingkar Utara Amlapura).
- Batas Timur : Jalan Ayodya.
- Batas Selatan : Jalan Dahlia dan jalan Kapulaga.
- Batas Barat : Jalan Surapati.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOJA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI
TERHADAP PERUBAHAN PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

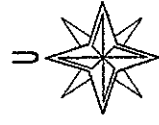
PETA:

PULAU BALI DAN KAB. KARANGASEM

LEGENDA:

- = BATAS KABUPATEN
- = IBUKOTA PROPINSI
- = IBUKOTA KABUPATEN
- = KABUPATEN KARANGASEM
- = KOTA AMLAPURA

SKALA



NO. GAMBAR

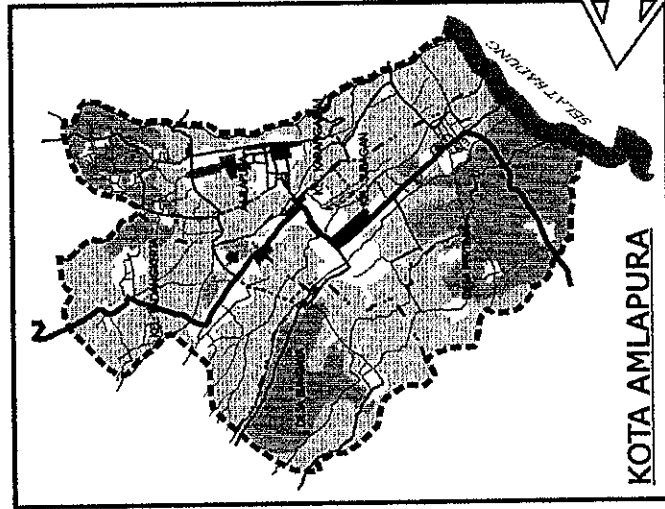
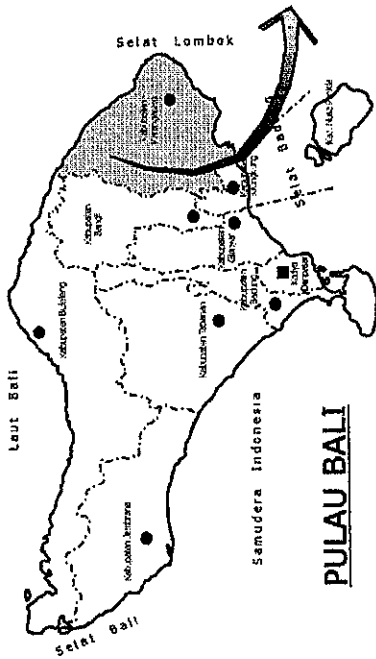
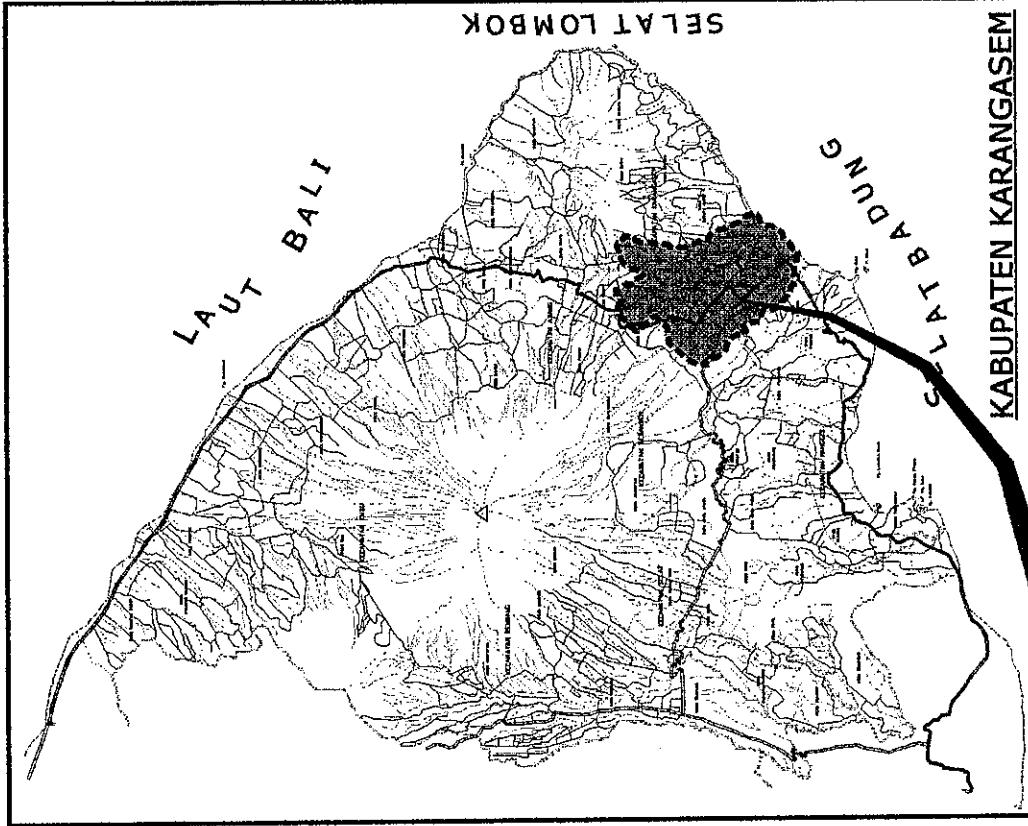
NO. HAL

1:1

12

SUMBER:

BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI
TERHADAP PERUBAHAN PERUMAHAN
PERUM. PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

PEETA: KOTA AMLAPURA

LEGENDA :

- BATAS ADMINISTRASI KOTA
- JALAN PRORINSI
- JALAN KABUPATEN
- JALAN LINGKUNGAN
- SUNGAI
- KAWASAN PERUMAHAN
- ▨ RENCANA PERLUASAN KAWASAN PERUMAHAN
- PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
- ▤ SAWAH
- ▥ KEBUN CAMPURAN
- PERDAGANGAN DAN JASA

U



SKALA

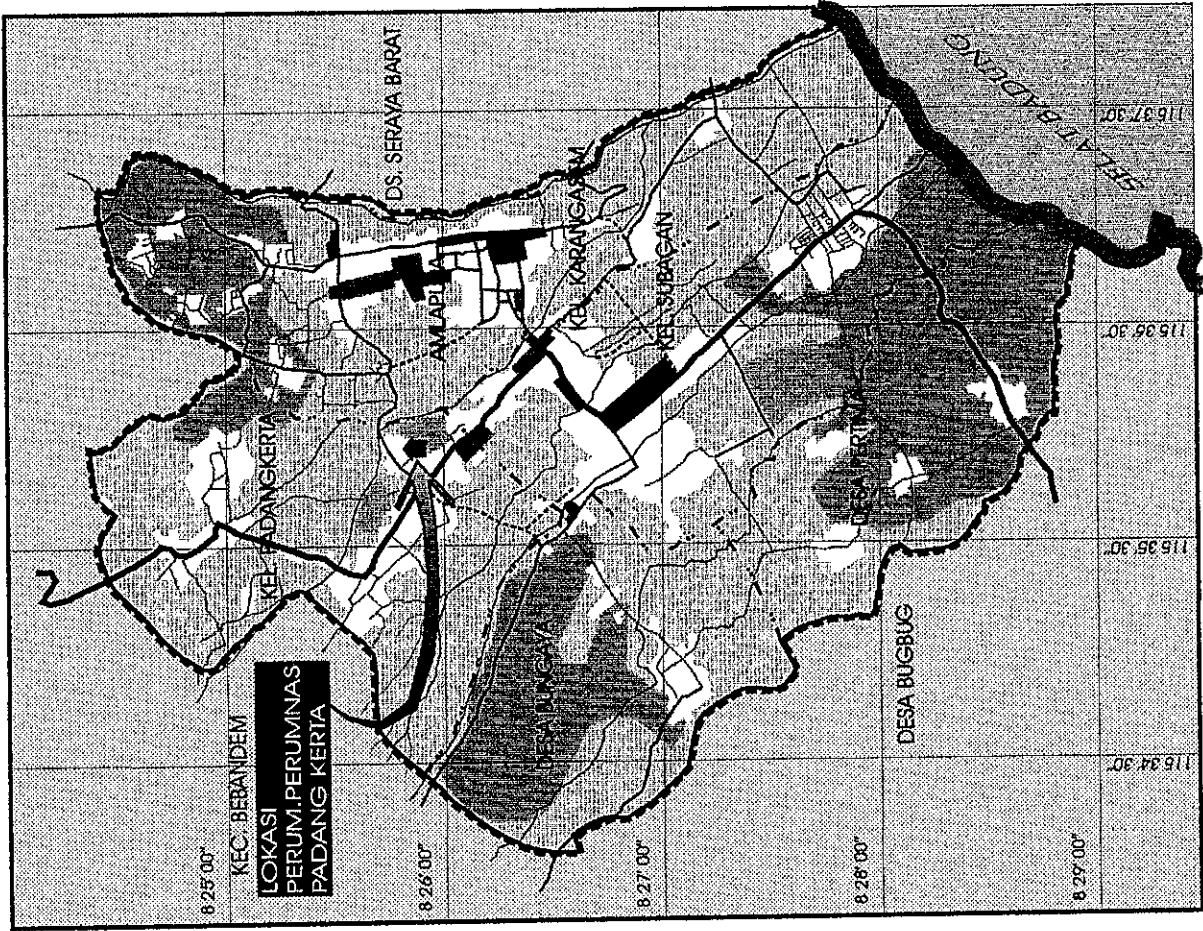
0 500 1.000 M

NO. GAMBAR NO. HAL

1.2 13

SUMBER :

BAPPEDA KABUPATEN KARANGASEM

















PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

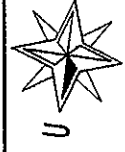
PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMLAPURA

PETA : LINGKUNGAN PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

LEGENDA :

-  = EKS. RUMAH TYPE RS D 36
-  = EKS. RUMAH TYPE RS D 21
-  = EKS. RUMAH TYPE RSS 21
-  = RENCANA SD
-  = PURA BANJAR
-  = MUSHOLA
-  = RENCANA GEREJA
-  = LAPANGAN OLAH RAGA
-  = TEMPAT BERMAIN
-  = BALE BANJAR
-  = RENCANA PUSKESMAS
-  = KANTOR UNIT

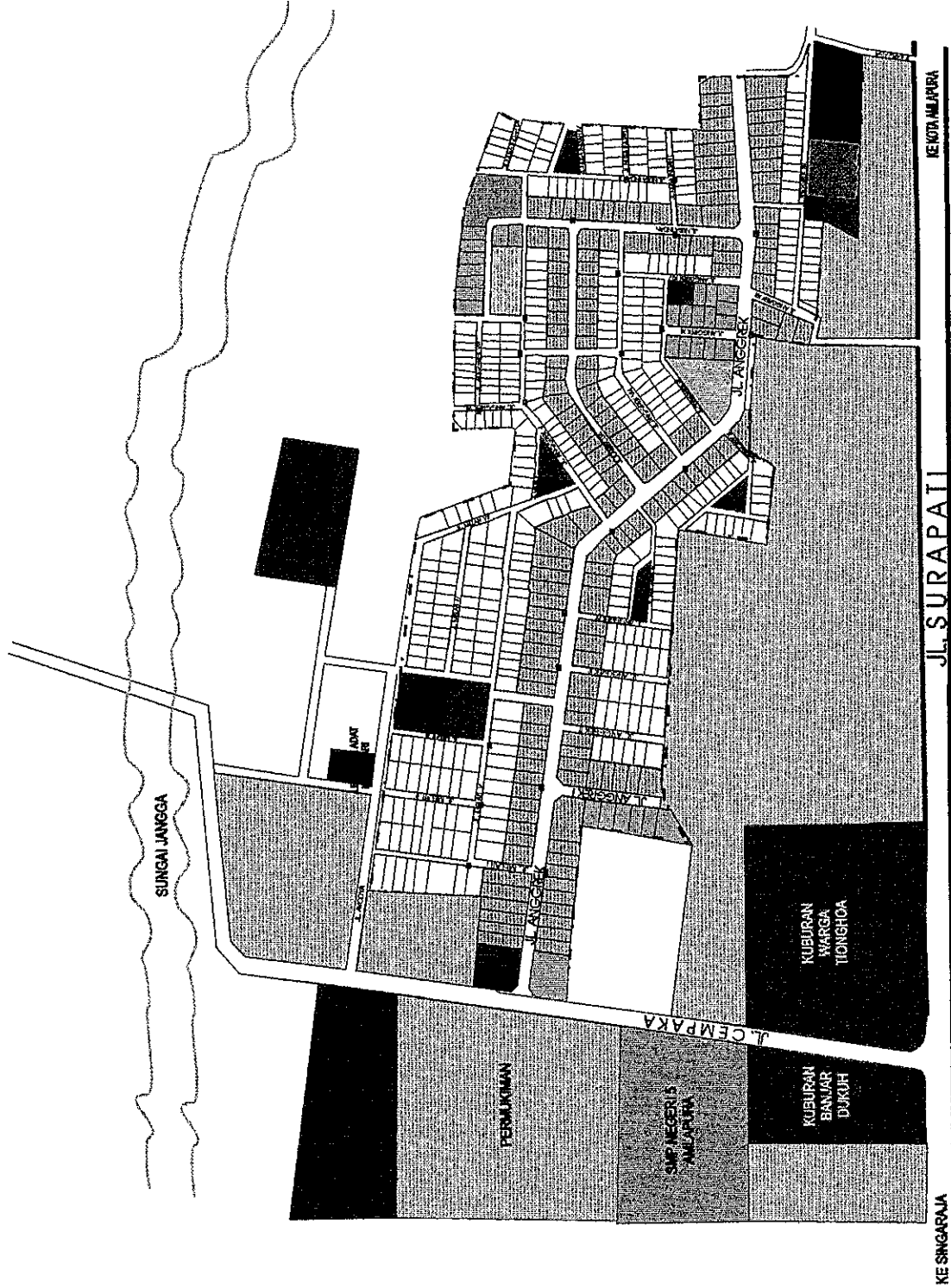
NO.GR SKALA



NOHAL

14

SUMBER : SURVEI (2002)



1.5 Kerangka Pemikiran

Munculnya pemikiran diawali oleh latar belakang, dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang dilakukan pemerintah melalui Perum Perumnas, termasuk pembangunan perumahan yang dilakukan di Kota Amlapura Ibukota Kabupaten Karangasem, untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Bali. Pembangunan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura menghasilkan rumah-rumah tipikal atau standard yang kemudian mengalami perubahan setelah dihuni untuk menyesuaikan kebutuhan penghuninya.

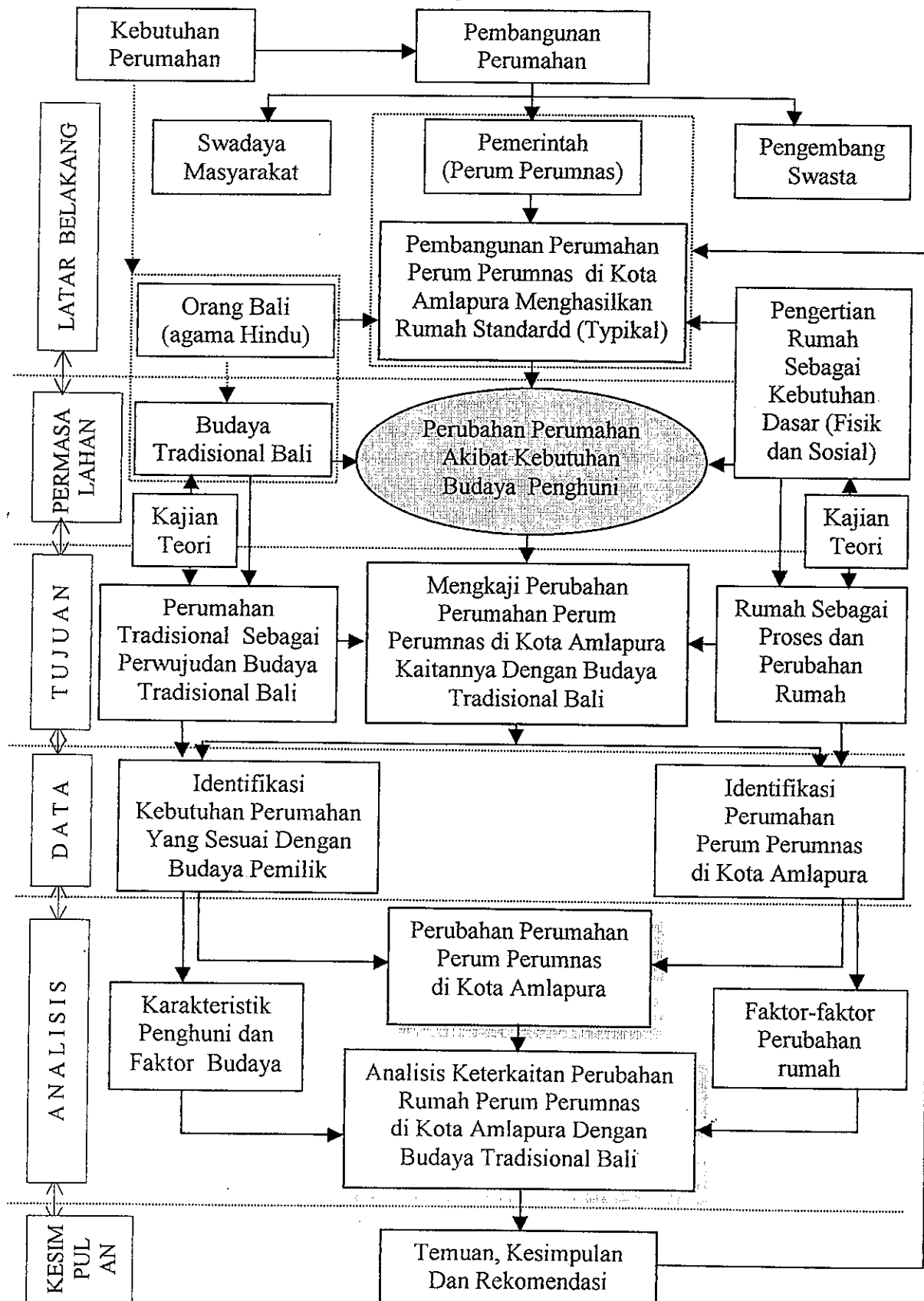
Penghuni/pemilik khususnya orang Bali yang beragama Hindu dengan latar belakang budaya tradisional, memiliki kepercayaan/keyakinan terhadap perumahan tradisional Bali yang memiliki nilai-nilai, bukan fisik semata tapi sesuai dengan sosial budayanya.

Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, sebagai kebutuhan fisik dan sosial mengalami proses sejalan dengan kehidupan pemiliknya. Dengan demikian rumah mengalami proses dan perubahan. Identifikasi jenis-jenis perubahan dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, juga kebutuhan perumahan sesuai karakteristik dan budaya pemilik.

Analisis perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, akibat faktor-faktor budaya tradisional. Kemudian analisis untuk melihat hubungan karakteristik dan faktor budaya pemilik terhadap perubahan rumah, dengan *uji chi-square*.

Merumuskan temuan dan kesimpulan serta rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan perumahan oleh pemerintah maupun Perum Perumnas. Untuk jelasnya lihat skema 1.4.

Skema: 1.4
Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Budaya Tradisional Bali Terhadap Perubahan Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura”, penelitian ini tergolong penelitian kasus (*case study*), merupakan penelitian tentang status obyek penelitian berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan keadaannya. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter khas dari suatu kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. (Nazir,1985 : 66).

Kasus akan ditelusuri secara deskriptif yang mempunyai tujuan untuk menemukan masalah-masalah baru dan dikaji secara kualitatif normatif. Dengan mendasarkan pada penelitian deskriptif, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Budaya tradisional Bali yang sifatnya general, namun dalam konteks penelitian ini yang dimaksudkan, adalah perumahan tradisional Bali yang dilandasi konsepsi-konsepsi dan nilai-nilai tradisional sebagai perwujudan budaya tradisional.
- Perumahan yang dimaksudkan adalah suatu kesatuan wilayah teritorial dengan aktivitas masyarakat penghuninya dengan fasilitas pendukungnya. Jadi yang dikaji meliputi; wilayah fisik, sosial budaya penghuni yang mempengaruhi rumah dan fasilitas lingkungan perumahan.
- Perubahan yang dimaksudkan adalah gejala yang memperlihatkan perbedaan dari asal mulanya atau standard (konsep, rencana maupun bentuk fisiknya). Seperti; perumahan

Perum Perumnas adalah standard, karena rumah merupakan proses maka rumah mengalami perubahan.

Perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, adalah perbedaan yang terjadi dari standard awal, baik bangunan rumah maupun fasilitas perumahannya. Dalam skala rumah perubahan diperlihatkan; penambahan fungsi ruang, tata letak ruang dan tampilan bangunan yang tidak lagi mencerminkan rumah standard Perum Perumnas. Dalam skala perumahan perubahan diperlihatkan; perbedaan antara eksisting (yang direncanakan) dengan kondisi saat ini, meliputi; perubahan fungsi, jenis dan jumlah fasilitas umum. Perubahan terjadi setelah perumahan ditempati, dimana hipotesanya karena berkaitan dengan budaya penghuninya.

Karena tujuan penelitian ini adalah, untuk mengkaji perubahan perumahan, dimana perumahan tersebut berkaitan dengan aktivitas manusia (lebih spesifik budaya). Menurut Nasution (1996), *case study* adalah, bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya.

1.6.2 Teknik Analisa

A. Variabel Penelitian

Faktor-faktor utama dari hasil identifikasi kesimpulan teoritis akan menjadi variabel-variabel (Sumadi, 1997:68). Variabel dipakai untuk menerangkan pembuktian hipotesa suatu penelitian, variabel ditentukan berdasarkan pada kajian teori yang dipakai.

Variabel menurut fungsinya dibedakan antara variabel tetap (*dependen*) dan variabel bebas (*independen*). Variabel tetap merupakan akibat sedangkan variabel bebas sebagai penyebab, dimana kedua jenis variabel dipakai untuk menunjukkan suatu proses didalam fenomena penelitian (Sumadi, 1997:15).

Klasifikasi variabel tetap dalam penelitian ini, adalah; perubahan rumah melalui perluasan dan perombakan serta perubahan fasilitas umum. Sedangkan klasifikasi variabel bebas antara lain, meliputi :

- Karakteristik penghuni, antara lain: umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, mata pencaharian, pendapatan dan jumlah anggota keluarga.
- Aspek budaya tradisional, antara lain; aktivitas dalam rumah dan perumahan, kebutuhan ruang aktivitas budaya dalam rumah dan perumahan, nilai-nilai tradisional dalam rumah dan perumahan. Untuk jelasnya jenis variabel dapat dilihat dalam Tabel: I.1.

TABEL I.1
JENIS VARIABEL PENELITIAN

Variabel Bebas	Variabel Tetap
<p>A. Karakteristik Penghuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usia - Jenis kelamin - Status perkawinan - Pendidikan - Mata pencaharian - Pendapatan - Anggota keluarga - Alasan perubahan rumah - Tipe rumah <p>B. Faktor Budaya Tradisional Dalam Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upacara agama di rumah - Kebutuhan <i>Sanggah/ Pemerajan</i> - Penerapan nilai-nilai tradisional - Letak ruang tidur - Letak kamar mandi/WC <p>C. Faktor Budaya Tradisional Dalam Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor sosial - Faktor simbolik - Faktor fungsional - Faktor morfologis 	<p>Perubahan Perumahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perluasan rumah - Perombakan rumah - Perubahan fasilitas umum

Sumber: Analisa (2002)

B. Analisa Perubahan

Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dilakukan analisis dengan metode kualitatif. Metoda kualitatif merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2000: 207). Dilakukan komparasi antara konsepsi dengan eksisting dan kondisi yang terjadi saat ini, berkaitan dengan rumah dan fasilitas umum sebagai kebutuhan aktivitas budaya penghuninya.

Analisis didukung data primer dan data skunder, dengan penyajian data berupa tabel, frekuensi, penggambaran melalui ilustrasi dan foto.

C. Analisa Faktor Pengaruh

Untuk mengetahui keterkaitan faktor-faktor budaya tradisional perubahan rumah perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dipakai analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tabulasi silang (*Crosstab*), Uji *Chi-square*, *Symmetric Measures* (Santoso, 1999 :195-197).

Tabulasi silang (*Crosstab*) memuat hubungan diantara variabel tetap dengan variabel bebas. Dalam penelitian ini sebagai variabel tetap adalah; perubahan rumah berupa perluasan dan perombakan. Sedangkan variabel bebasnya adalah faktor-faktor budaya tradisional dalam rumah, dan sebagai variabel pengendali dilihat karakteristik penghuni. Sebagai gambaran operasional dapat dilihat, seperti Tabel I.2 di bawah.

TABEL I.2
TABULASI SILANG ANTARA VARIABEL TETAP DENGAN VARIABEL BEBAS
DAN VARIABEL PENGENDALI

Variabel Bebas		Variabel Tetap	
		Perubahan Rumah	
		Perluasan	Perombakan
Karakteristik Penghuni dengan Faktor Budaya Tradisional Bali	Faktor Budaya Tradisional Bali		

Sumber: Santoso (1999:197) dan analisa (2002)

Untuk melihat ada tidaknya hubungan variabel, dilakukan Uji *Chi-Square*, dimana akan dihasilkan suatu angka; jika "*chi-square*-hitung" lebih besar dari "*chi-square*-tabel"

(X^2 (hitung) > X^2 (tabel)), dapat disimpulkan antara variabel yang ditinjau terdapat hubungan artinya ada pengaruh, demikian sebaliknya.

Untuk melihat seberapa kuat tingkat hubungan antara variabel, dipakai uji Kontingensi, dengan melihat koefisien kontingensi diketahui kuat lemahnya hubungan. Semua operasional analisa diatas menggunakan alat bantu SPSS.

1.6.3 Metode Pelaksanaan Penelitian

A. Kebutuhan Data

Dalam penelitian, data yang relevan sesuai kebutuhan sangat penting, yang digunakan sebagai bahan analisis dan pengujian hipotesis. Data dibedakan sesuai jenisnya, yaitu; data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain:

- Gambaran umum wilayah penelitian, meliputi; kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Karangasem termasuk perumahan, kependudukan dan lembaga-lembaga di Kota Amlapura.
- Data pembangunan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, meliputi data gambar rencana rumah dan site plan perumahan.

Sedangkan data primer, didapat melalui survei lapangan untuk mengetahui kondisi perumahan Perum Perumnas dan mengetahui karakteristik penghuni perumahan berkaitan dengan budaya tradisional Bali. Untuk jelasnya konsep kebutuhan data dapat dilihat dalam Tabel: I.3.

TABEL I.3
KONSEP KEBUTUHAN DATA

No.	Tujuan	Manfaat	Data	Jenis	Sumber
1.	Gambaran wilayah penelitian	Mengetahui gambaran umum wilayah penelitian	-Kebijaksanaan Pembangunan Kabupaten Karangasem -Kondisi fisik, kependudukan dan lembaga pemerintahan dan adat Kota Amlapura	Sekunder	- Bappeda - BPS Kab. Karangasem
2.	Pembangunan Perumahan Perum Perumnas di Amlapura	Mengetahui kondisi fisik perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura	Kondisi eksisting tahun 1994, gambar rumah dan <i>site plan</i> Perumahan Perum Perumnas	Sekunder Dan Primer	Perum Perumnas cab. Bali dan survei lapangan
3.	Perubahan Perumahan Perum Perumnas	Mengetahui perubahan yang terjadi pada perumahan Perum Perumnas pasca huni	Kondisi eksisting tahun 2002 rumah dan fasilitas umum	Primer	Survei ke Perumahan Perum Perumnas
4.	Karakteristik pemilik dan faktor budaya dalam perumahan	Mengetahui karakter pemilik dan kebutuhan perumahan sesuai dengan budaya tradisional kaitannya dengan perubahan perumahan	-Karakteristik pemilik rumah - Faktor budaya tradisional dalam perumahan Perum Perumnas	Primer	Survei ke Pemilik yang beragama Hindu

Sumber: Analisa (2002)

B. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan/dilokasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui literatur maupun buku atau dokumen penelitian yang berkaitan dengan topik tesis.

Menurut Nasution (1996:106-128), metode pengumpulan data primer yang merupakan proses penelitian di lapangan, dilakukan dengan cara deskriptif survei melalui:

a. Observasi

Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi dapat dilakukan; dengan partisipasi pengamat (partisipan), atau tanpa partisipasi pengamat (non partisipan).

b. Penyebaran Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada responden, pada umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat maupun sikap.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data primer di perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura, peneliti melakukan dengan observasi. Observasi yang dilakukan bersifat partisipan, pengamatan yang dilengkapi dengan melakukan pencatatan-pencatatan, perekaman foto. Sedangkan untuk pengisian kuesioner dilakukan dengan teknik wawancara dan pengisian kuesioner.

C. Teknik Pengambilan Sampel (*Sampling Techniques*)

Populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Sedangkan sampel, karena berbagai alasan, tidak semua hal yang ingin dijelaskan atau dikendalikan bisa diteliti. Penelitian ilmiah, boleh dikatakan hampir selalu hanya dilakukan terhadap sebagian dari hal-hal yang sebenarnya mau diteliti (Narbuko dan Achmadi, 2001: 108).

Jadi penelitian hanya dilakukan terhadap sampel, tidak terhadap populasi. Namun kesimpulan-kesimpulan penelitian mengenai sampel itu, akan dikenakan atau digeneralisasi dari sampel ke populasi ini, mengandung resiko bahwa akan terdapat kekeliruan atau ketidak tepatan. Oleh karena itu teknik penentuan sampel menjadi syarat yang penting dalam penelitian.

Terdapat dua teknik sampling yaitu; random sampling dan non random sampling (Narbuko dan Achmadi, 2001: 110). Random sampling adalah teknik pengambilan sampel, dengan semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama menjadi sampel. Teknik non random sampling adalah cara pengambilan sampel, dengan tidak semua

anggota populasi diberi kesempatan dipilih menjadi sampel. Non random sampling dibagi lagi menjadi tujuh macam, diantaranya *Purposive Sampling*, yaitu; pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan memiliki sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Narbuko dan Achmadi, 2001: 116).

Untuk penelitian pengaruh budaya tradisional Bali terhadap perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, akan dipakai *Purposive Sampling* karena diketahui budaya tradisional Bali berkaitan dengan ciri-ciri sampel yang beragama Hindu.

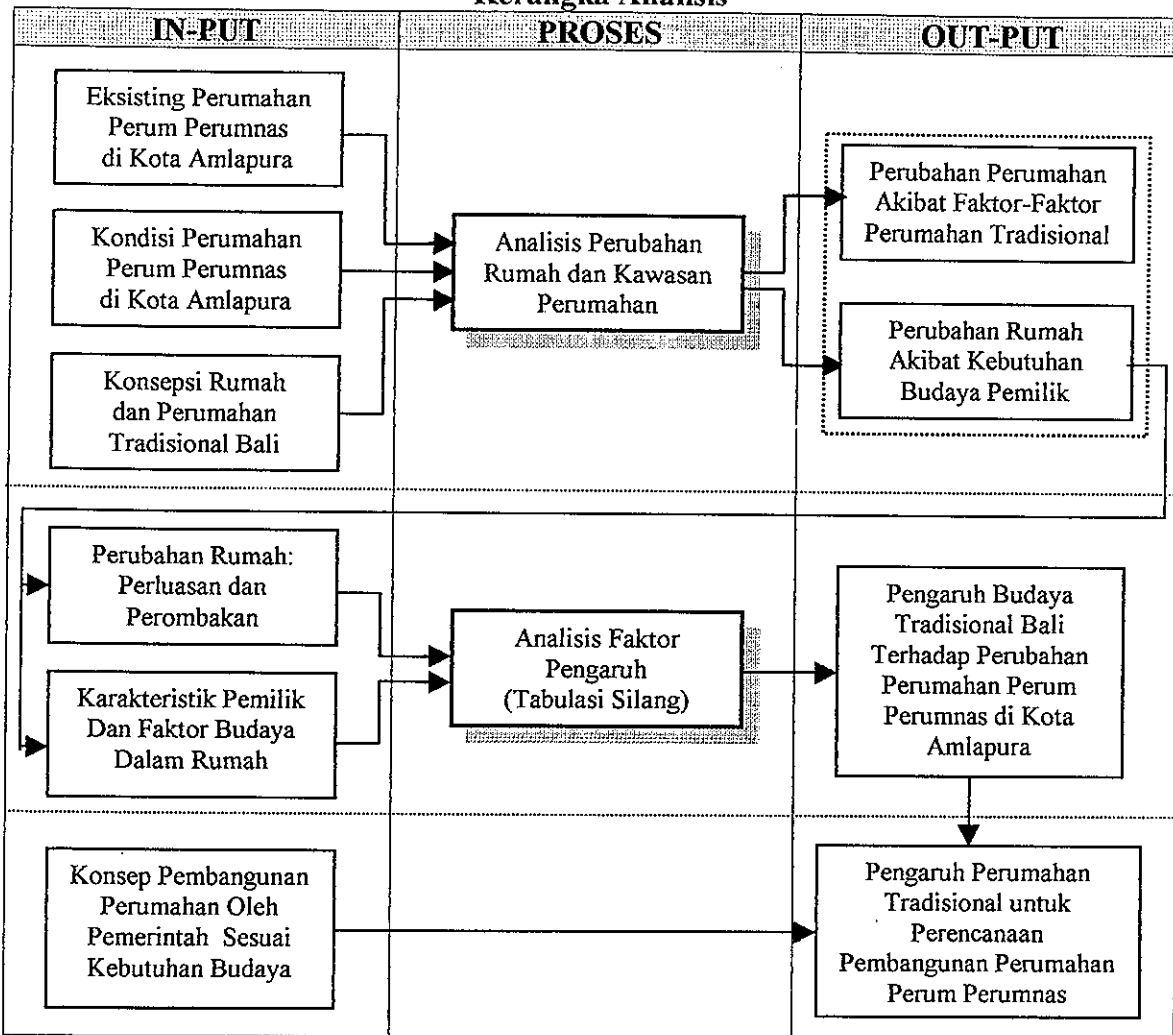
Dengan memperhatikan apakah populasi umumnya dianggap homogen atau heterogen, perlu diteliti kategori-kategori lainnya, seperti; usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lainnya. Untuk pedoman umum penelitian bisa dipakai pedoman; bila populasi cukup homogen untuk 100 populasi bisa dipergunakan sampel 50%, sedangkan bila diatas 100 populasi bisa dipakai sampel sebanyak 15% (Narbuko dan Achmadi, 2001 : 110)

Untuk melihat perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura berkaitan dengan pengaruh budaya tradisional Bali, diketahui budaya Bali sangat erat dengan agama Hindu, maka dalam menentukan sampel akan dipakai kriteria; sampel diambil dari pemilik rumah yang beragama Hindu. Data dari Perum Perumnas wilayah VI cabang Bali, menunjukkan 473 pemilik rumah Perum Perumnas di Kota Amlapura menganut agama Hindu, maka sampel yang harus dicari adalah 15% dari pemilik yang beragama Hindu, yaitu; 71 sampel (responden).

1.6.4 Kerangka Analisis

Untuk mencapai temuan penelitian, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan kerangka analisis dalam Skema 1.5 di bawah.

Skema 1.5
Kerangka Analisis



Sumber: Analisa (2002)

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan tesis yang berjudul “Pengaruh Budaya Tradisional Bali Terhadap Perubahan Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura” terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran serta manfaat, ruang lingkup meliputi ruang lingkup substansial dan spasial, kerangka pemikiran, metoda penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II PERUMAHAN SEBAGAI KEBUTUHAN DASAR YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BUDAYA TRADISIONAL BALI

Bab ini menguraikan teori-teori rumah secara umum sampai dengan perubahan rumah, program pembangunan perumahan dan perumahan tradisional sebagai perwujudan budaya tradisional Bali.

BAB III GAMBARAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS KOTA AMLAPURA

Bab ini menguraikan gambaran perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura sebagai Ibukota Kabupaten Karangasem, meliputi; kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Karangasem, kondisi fisik Kota Amlapura, kependudukan dan lembaga-lembaga pemerintahan dan adat serta pembangunan perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura sampai kondisi eksisting saat ini.

BAB IV PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

Dilakukan analisa perubahan Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura dengan membandingkan kondisi eksisting dengan kondisi saat ini berdasarkan faktor-faktor perumahan tradisional Bali. Kemudian analisis pengaruh budaya tradisional dengan alat analisis yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Membuat temuan penelitian dan kesimpulan hasil penelitian serta memberikan rekomendasi dari hasil-hasil penelitian untuk pemanfaatannya.

BAB II

PERUMAHAN SEBAGAI KEBUTUHAN DASAR YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BUDAYA TRADISIONAL BALI

2.1 Pengertian Rumah Sebagai Kebutuhan Dasar

2.1.1 Pengertian Rumah

UU No. 4 tahun 1992, menyebutkan rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan perumahan memiliki pengertian: kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Sammis B. White dalam Catanese dan Snyder (1996 :391), menyatakan dalam pengertian tradisional perumahan merupakan tempat berlindung, tetapi dalam dunia modern perumahan dipergunakan untuk melayani berbagai kebutuhan manusia, menyediakan ruang untuk kegiatan sehari-hari seperti; memasak, makan, bekerja, rekreasi dan tidur. Pengertian ini hanya menekankan kepada kebutuhan fasilitas ruang beserta pengaturannya yang bisa didiami, berfungsi sebagai tempat tinggal untuk melayani kebutuhan manusia dan sarana pembinaan keluarga sesuai dengan jumlah keperluan keluarga dalam satu unit.

Menurut Turner (1972:151), perumahan atau *housing* mengandung 2 (dua) arti, yaitu sebagai kata benda (produk/komoditi) dan sebagai kata kerja (proses/aktivitas). Perumahan sebagai kata benda menunjukkan bahwa tempat tinggal sebagai komoditi, sedangkan rumah sebagai kata kerja menunjukkan proses dan aktivitas manusia yang terjadi dalam penghunian rumah tersebut. Dengan demikian, rumah tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil fisik, tetapi juga sebagai suatu proses yang berkembang dan berkaitan dengan keinginan penghuninya.

Pedro Arrupe S.J dalam Eko Budihardjo (1998: 55), memberikan arti rumah, antara lain:

A house is much more than a building. It is the social context of family-life-the place where man loves and shares with those who are closest to him.

Rumah itu lebih dari sekedar bangunan. Rumah juga mempunyai hubungan sosial dari keluarga-kehidupan-suatu tempat dimana manusia mencintainya dan bersama-sama dengan orang yang paling dekat dengannya.

Keterkaitan yang sangat erat antara rumah dengan nilai dan harkat penghuninya menjadi penting, yaitu; manusia sebagai insan sosial, insan ekonomi, insan politik dan sebagai insan budaya. Sebagai insan sosial, manusia akan memandang fungsi rumah dalam lingkup pemenuhan kebutuhan kehidupan sosial budaya masyarakat. Sebagai insan ekonomi, rumah punya fungsi ekonomi merupakan investasi jangka panjang. (Yudohusodo, 1991: 87)

Memperhatikan pengertian rumah tersebut di atas, cenderung adanya penyesuaian terhadap aspek kehidupan manusianya. Pada awalnya rumah merupakan tempat berlindung dari bahaya gangguan fisik, kemudian rumah sebagai tempat tinggal dan beristirahat keluarga serta melakukan hubungan sosial, sampai pada akhirnya rumah merupakan identitas penghuninya.

2.1.2 Rumah Sebagai Kebutuhan Dasar

Hayward dalam Budihardjo (1998:55) mengemukakan berbagai konsep rumah sebagai berikut :

- a. Rumah sebagai pengejawantahan jati diri: sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya.

- b. Rumah sebagai wadah keakraban: rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman tercakup dalam konsep ini.
- c. Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi: merupakan tempat melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dan dari kegiatan rutin.
- d. Rumah sebagai akar dan kesinambungan: rumah atau kampung halaman dilihat sebagai tempat untuk kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses kemasa depan.
- e. Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari.
- f. Rumah sebagai pusat jaringan sosial.
- g. Rumah sebagai struktur fisik.

Rumah sebagai kebutuhan dasar menurut Maslow dalam Budihardjo (1998:57) terdiri atas beberapa tingkat kebutuhan, antara lain:

- a. Kebutuhan fisiologis, rumah memberikan perlindungan terhadap gangguan alam dan binatang dan berfungsi sebagai tempat istirahat.
- b. Kebutuhan rasa aman, sebagai tempat menjalankan kegiatan ritual, penyimpanan harta milik, menjamin hak pribadi.
- c. Kebutuhan hubungan sosial, rumah memberikan peluang untuk interaksi dan aktivitas komunikasi yang akrab dengan lingkungan sekitarnya. Manusia membutuhkan pengakuan akan kepemilikannya dan ini berarti manusia membutuhkan kontak sosial dalam lingkungannya. Rumah membutuhkan lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan yang dapat ditemukenali dengan adanya aktivitas lingkungan, tata letak rumah, bentuk rumah, pola tata ruang serta kelengkapan lingkungan lainnya.
- d. Kebutuhan terhadap penghargaan diri sendiri, rumah dan huniannya merupakan ukuran terhadap kesuksesan.

- e. Kebutuhan aktualisasi diri, rumah dianggap sebagai pengembangan pribadi bagi penghuninya, rumah sudah merupakan simbol atau status sosial penghuninya.

Disini rumah digambarkan, sebagai kebutuhan manusia pada tingkat bawah rumah merupakan tempat untuk berlindung dan pada tingkat paling atas rumah merupakan identitas penghuninya. Sedangkan berdasarkan fungsinya, rumah merupakan basis bagi pembentukan kepribadian manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial dapat berinteraksi dengan lingkungannya yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan seseorang.

Penentu utama kebutuhan rumah adalah kualitas rumah dan kesesuaiannya. Dari studi tentang perilaku manusia disebutkan bahwa kebutuhan seseorang individu adalah dapat merasakan "*privacy*" dan keamanan di dalam teritorial tempat tinggalnya. Unterman dan Small dalam Vincent M (1983 :35), menyebutkan kebutuhan rumah dimaksud :

- a. Kebutuhan teritorial; yang dapat diamati dan dinilai melalui perasaan terhadap penglihatan, pendengaran, pembuangan dan perabaan.
- b. Kebutuhan orientasi; yang dapat menentukan tata letak rumah sebagai pertimbangan dalam pemanfaatan sinar matahari, pergerakan udara dan pandangan keluar.
- c. Kebutuhan keleluasaan pribadi (*privacy*); yang dapat dipenuhi melalui pembatas-pembatas (*barrier*) seperti dinding, langit-langit dan lantainya.
- d. Kebutuhan identitas; memilih rumah dan memelihara rumah adalah suatu alat untuk mengungkapkan identitas pemilik dan faktor utama pada bentuk perumahan adalah sosio-budaya.
- e. Kebutuhan kemudahan (*convenience*); dalam performa kebudayaan tergantung tingkat kepuasan.

- f. Kebutuhan aksesibilitas (*acesibility*); kemudahan dalam pencapaian baik dalam rumah maupun lingkungan.
- g. Kebutuhan keselamatan; berkaitan dengan perlindungan dari gangguan yang mengancam keselamatan manusia dan menimbulkan kerusakan.

2.1.3 Rumah Sebagai Proses

Rumah sebagai proses merupakan fenomena atau gejala akibat adanya dinamika perubahan fisik rumah yang berkembang sesuai dengan inovasi dan aspirasi penghuni rumah. Akan tetapi kenyataan yang ada selama ini rumah yang dibangun secara massal hanya dianggap komoditi dan produk akhir barang jadi yang mengabaikan aspek-aspek sosial budaya serta pelaku manusianya. Hal ini disebabkan pengadaan pembangunan terlalu ditekankan pada pencapaian target fisik semata dengan perencanaan model yang prototipe tanpa memperdulikan potensi dan kemampuan penghuni rumah.

Turner dalam dalam *Housing by People* (1991: 6), terdapat tiga prinsip pokok pengadaan perumahan, yaitu :

- 1) Hal yang terpenting mengenai rumah bukan "*what it is*" tetapi "*what it does*", dimana kepuasan penghuni tidak selalu berhubungan dengan standar fisiknya.
- 2) Rumah tidak lagi dipandang sebagai suatu produk selesai/akhir, melainkan sebagai proses yang berkembang.
- 3) Ketidaktepatan atau kekurangan dalam pembangunan rumah akan lebih dapat ditolerir apabila hal itu menjadi tanggung jawab penghuni rumah dibandingkan dengan tanggung jawab pihak lain.

Turner juga menyatakan bahwa rumah bukanlah merupakan hasil fisik sekali jadi, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas

sosial ekonomi penghuninya dalam kurun waktu. Rumah mempunyai berbagai fungsi dan semua fungsi tersebut tergantung pada tempat dan waktu. Yang terpenting bagi rumah adalah dampak terhadap kehidupan penghuni dan bukan wujud atau standar fisiknya.

Konsep "*Housing is a Process*" yang dikembangkan Turner dalam bukunya *Freedom to Build* (1972), tiga hal yang melandasi, yaitu:

- 1) Nilai rumah; dimana rumah bukan diartikan secara konvensional yaitu nilai fisik rumah, tetapi lebih menggambarkan proses atau kegiatan merumahkan diri atau kegiatan bermukim. Masalah rumah bukan sekedar kondisi fisiknya yang berada di bawah standar, tapi juga menyangkut manusiawi dan nilai sosial budaya dari proses bermukim.
- 2) Fungsi ekonomi; adalah usaha untuk menghasilkan perumahan yang ekonomis dan lebih menitik beratkan pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.
- 3) Wewenang atas rumah; bila penghuni mengendalikan pengambilan keputusan utama dan bebas memberi masukan dalam perancangan dan pembangunannya.

2.1.4 Perubahan Rumah

Makna rumah bagi penghuninya dapat menjadi titik tolak penghuni untuk mengubah bangunan rumahnya sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hidupnya. Habraken dalam Suryanto (2000: II-24), perubahan pada lingkungan fisik adalah campur tangan manusia, pengejawantahan dari suatu kekuatan mewujudkan identitas kehidupan didalamnya. Menurut Silas (1991: 11), dalam garis besarnya rumah adalah sebagian yang utuh dari permukiman dan bukan semata-mata hasil fisik yang sekali jadi. Perumahan (bukan kata kerja) yang berupa proses berlanjut dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi dan kebutuhan budaya penghuninya. Perubahan perumahan yang dilaksanakan penghuninya sendiri untuk merangsang kesejahteraan individu dan masyarakat umum.

Pada saat pemerintah berperan sebagai *provider*, pemerintah sebagai penanggung jawab dan pengambil keputusan, dari tahap penyusunan organisasi pelaksana hingga pelaksanaan pembangunan perumahan. Hasil akhirnya adalah produk jadi (*finished product*) berupa rumah untuk dijual atau disewakan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat tidak terlibat sama sekali, sehingga timbul ketidak sesuaian (Panudju, 1999:24).

Kebanyakan program perumahan mengacu pada produk standar jadi, dalam bentuk rumah permanen yang memenuhi syarat teknis universal, dilandasi konsep "*existenzminimum*" standar minimum unit rumah dan ruang secara fisik yang dianggap layak. Penghuni tidak memiliki peluang untuk mengejawantahkan jati dirinya lewat penampilan rumah kecuali dengan membongkar rumahnya lebih dulu. Dan ini terjadi pada kebanyakan rumah yang dibangun dengan KPR-BTN yang sebenarnya merupakan pemborosan investasi. (Budihardjo, 1998 : 37-38).

Menurut Pontoh (1994 : 27), penghuni akan selalu memberi tanggapan terhadap kekurangan tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai yang diinginkan. Bisa bersifat pasif dengan perubahan pada penghuni, juga bisa aktif dengan perubahan fisik rumah berupa penambahan ruang, atau membongkar dan membangun baru sama sekali.

Usaha yang dilakukan penghuni terhadap ketidak sesuaian dengan rumahnya (Morris dan Winter, 1978: 6), antara lain:

- 1). Usaha penghuni untuk memenuhi kebutuhan ketika merasakan kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan yang dilakukan dapat berupa pindah rumah, pengubahan atau penambahan terhadap rumahnya atau *housing adjustment*.

- 2). Usaha penghuni sebagai tanggapan atas kekurangan pada rumahnya, dengan cara melakukan perubahan dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat pasif atau *housing adaption*.

Proses perubahan rumah dapat dilihat dari dua cara pandang, yaitu; proses evolusi dan proses perbaikan rumah. Parwoto dalam Pontoh (1994 : 27), proses evolusi rumah mengalami tiga transformasi, yaitu :

- 1) Ekspansi/tumbuh, artinya mengadakan perluasan keluar.
- 2) Subdivisi, artinya mengadakan perbanyakkan ruang melalui pembagian di dalam (tanpa mengubah bahan), misalnya menyekat ruangan.
- 3) Penyempurnaan, artinya perubahan berkaitan dengan peningkatan kenyamanan, seperti penggantian bahan, modifikasi ruang dan lainnya.

Proses perbaikan rumah menurut Naipospos dalam Pontoh (1994: 27), melalui:

- 1) Perombakan rumah; menyangkut perubahan struktur fisik rumah secara total (perubahan bentuk, bahan, jumlah ruang, ukuran ruang, dll).
- 2) Penggantian bahan secara menyeluruh (lantai, dinding dan atap); menyangkut perubahan fisik rumah tanpa mengubah jumlah ruang dan luas rumah.
- 3) Penggantian bahan sebagian; menyangkut penggantian elemen rumah, tanpa mengubah jenis dan jumlahnya.

Menurut Nurdin dalam Suryanto (2000: II-25), faktor penyebab perubahan rumah sangat terkait dengan perubahan budaya, karena rumah merupakan hasil budaya manusia, dengan demikian perubahan rumah disebabkan proses dari dalam (*endogeen*) dan proses dari luar (*exogeen*), yaitu:

- 1). Pengaruh dari dalam, perwujudan suatu rumah karena adanya dorongan kebutuhan hidup termasuk tuntutan religius (agama), yang pada akhirnya menuntut ruang

aktivitas dan menyebabkan perubahan pada ruang-ruangnya. Kebutuhan tersebut seperti; ekonomi atau aktivitas budaya.

- 2). Pengaruh dari luar, kebutuhan hidup seseorang berkaitan dengan lingkungannya atau perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan hunian.

2.2 Penyediaan Perumahan Melalui Perum Perumnas

2.2.1 Latar Belakang Program Perumnas

Program pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal sesuai jumlah dan kualitas dalam lingkungan yang sehat, sehingga pada akhirnya setiap keluarga dapat menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang layak, bersih, sehat dan aman. (Tanjung, 1993 : 2).

Masalah pokok perumahan adalah kurangnya jumlah rumah serta sebagian rumah yang dibangun secara liar, dengan rumah dan lingkungan tidak layak huni. Hal ini diakibatkan oleh daya beli yang rendah, harga tinggi, prasarana kurang, sistem pembiayaan belum mantap, peraturan belum cukup mendukung, kelembagaan belum mantap dan pembagian kewenangan antar instansi belum jelas.

Untuk mengatasi masalah pokok perumahan, dalam Pelita I dilakukan berbagai usaha persiapan penyediaan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga. Dari studi dan lokakarya untuk membentuk badan-badan yang merumuskan kebijaksanaan, melaksanakan pembangunan dan menyediakan dana perumahan, pada Pelita II dibentuk Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN). Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dan Bank Tabunan Negara (BTN) mendapat tugas untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disubsidi pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Yudohusodo (1991: 151 – 152), Perum Perumnas didirikan dengan PP Nomor 29 tahun 1974 tanggal 18 Juli 1974, sebagai tindak lanjut dari kesimpulan dan saran-saran Lokakarya Nasional tentang Kebutuhan Perumahan dan Pembiayaan Pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 s/d 6 Mei 1972.

Berdasarkan pada PP Nomor 29 tahun 1974 jo. PP Nomor 12 tahun 1988, secara garis besar tugas Perum Perumnas tercantum dalam Pasal 5 sbb :

- a. Sifat usaha perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- b. Maksud didirikannya perusahaan adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa kegiatan-kegiatan produktif di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat beserta sarana dan prasarannya, serta melakukan pemupukan dana.
- c. Tujuan perusahaan adalah melaksanakan kebijaksanaan dan program pembangunan di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat beserta sarana dan prasarannya yang mampu mewujudkan lingkungan pemukiman dengan rencana pembangunan wilayah kota .

GBHN tahun 1993, mengarahkan pembangunan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan sarana kerukunan hidup keluarga dan kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga, melalui kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu ditingkatkan dan diperluas agar semakin merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan lingkungan sosial sekitar.

- c. Dapat mendorong kegiatan pembangunan dengan prinsip swadaya dan gotong royong.
- d. Memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.
- e. Mendorong berkembangnya industri bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan.

2.2.2 Perumahan Perum Perumnas

Beberapa ketentuan dasar dalam perencanaan bangunan perumahan sederhana Perum Perumnas, antara lain :

a. Batasan Rumah Sederhana

Dalam Ketentuan Umum Proyek Perumahan dan Rumah Sederhana Yang Dapat Dikaitkan Dengan Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN; 1984:1), disebutkan perumahan Perumnas yang termasuk klasifikasi perumahan dan rumah sederhana adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Luas bangunan rumah antara 21 M² s/d 70M².
- Luas dari tanah kaveling yang digunakan untuk mendirikan bangunan rumah, berkisar antara 60 M² s/d 200 M²
- Harga dari bangunan rumah tersebut maksimal 75% dari harga rumah dinas tipe C.
- Harga tanah kaveling yang digunakan untuk mendirikan bangunan rumah, maksimal sama dengan harga rumahnya.

Yudohusodo (1991: 310), menyebutkan kriteria Rumah Sederhana sebagai berikut:

- 1) Rumah Sederhana merupakan rumah dengan desain sederhana didasarkan pada ruang yang efektif dan fungsi maksimal. Standar minimal untuk setiap unit adalah tersedia satu kamar tidur yang tertutup, ruang tamu dan ruang makan menjadi satu, dapur, serta kamar mandi dan WC.

2) Luas lantai maksimum 70 m^2 dan luas kaveling antara 60 m^2 sampai dengan 200 m^2 .

b. Prasarana jalan

Prasarana jalan yang dipersyaratkan di dalam lingkungan perumahan, antara lain:

- Jalan Penghubung Utama; menghubungkan lokasi proyek dengan jaringan jalan umum menuju ke pusat kota, lebar minimal 7 m dengan perkerasan minimal 3,50 m.
- Jalan Lingkungan Utama; penghubung antara jalan lingkungan pembagi satu dengan jalan lingkungan pembagi lainnya dengan jalan penghubung utama, lebar minimal 7 m. Kelompok kaveling dalam satu lokasi yang ≥ 200 unit rumah, jalan lingkungan utama sebaiknya dibuat $\geq 11,5$ m atau dua jalan, dengan panjang jalan minimal 20% dari seluruh panjang jalan yang ada di lokasi perumahan.
- Jalan Lingkungan Pembagi; Jalan menuju kaveling rumah yang harus disesuaikan dengan besar rumah yang menghadap jalan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk rumah tipe 21 s/d tipe 45: lebar jalan minimal 3,6 m atau sebaiknya ≥ 5 m.
 - Untuk rumah tipe 46 s/d tipe 60: lebar jalan minimal 6 m.
 - Untuk rumah tipe 61 s/d tipe 70: lebar jalan sebaiknya 7 m.

Juga ditetapkan panjang deretan kaveling maksimal adalah 100 m, dengan demikian pada setiap jalan lingkungan pembagi mencapai panjang 100 m, harus bertemu dengan jalan lingkungan pembagi ataupun jalan lingkungan pembantu.

- Jalan Lingkungan Pembantu; penghubung antara jalan pembagi satu dengan yang lainnya bukan peruntukkan bagi roda empat, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada penghuni mengadakan komunikasi aktif karena jarak untuk saling mengunjungi tidak lebih dari 100 m. Lebar jalan minimal 2 m dengan lebar perkerasannya minimal 1 m.

- Jalan Buntu; harus menyediakan simpul pada ujung jalan berupa tempat untuk memutar kendaraan roda empat.

c. Fasilitas Lingkungan

Lahan untuk fasilitas lingkungan seperti: penghijauan, Puskesmas, taman kanak-kanak dan sebagainya harus diperhitungkan luas minimumnya. Lahan tempat bermain dan warung, diusahakan tetap berada ditengah-tengah kelompok rumah baru, demikian pula tata letak taman kanak-kanak, Langgar, Gedung pertemuan, Telpon Umum, diletakkan di tepian daerah pemukiman yang baru, dengan harapan komunikasi antara penduduk lama dan penduduk pendatang baru akan terjalin.

d. Unit Bangunan

Lebar minimal kaveling rumah tinggal ≥ 8 m, dan untuk rumah kopel lebar kaveling ≥ 7 m. Sedangkan untuk rumah gandeng, lebar kaveling ≥ 6 m dengan ketentuan jumlah unit rumah satu blok tidak boleh lebih dari 5 unit, atau 30 m. Selain rumah tinggal, ditentukan pula rumah kopel dan rumah gandeng yang secara prinsip, persyaratannya mengikuti persyaratan rumah tunggal.

e. Ukuran Ruangan

Rumah tinggal yang cukup baik harus mempunyai ruangan untuk: kamar tidur minimal 2 buah, kamar duduk/tamu, kamar dapur, kamar madi dan WC dengan perincian luasan sebagai tertera dalam Tabel II.1

TABEL II.1
STANDARD MINIMUM RUMAH SEHAT KPR – BTN

No	Fungsi Ruang	Lebar Minimal	Luas Minimal	Tinggi Plafond	
				Minimal	Minimal
1.	Ruang tidur: Induk, Anak dan sterusnya	3 M	9 M ²	+ 2,40 M	+ 2,70 M.
		2 M	6 M ²	+ 2,40 M	+ 2,70 M
2.	Ruang duduk dan makan - Jadi satu	3 M	12 M ²	+ 2,40 M	+ 2,70 M
		- Terpisah	2,5 M	7,5 M ²	+ 2,40 M
3.	Dapur	1,5 M	3 M ²	+ 2,40 M	
4.	Kamar mandi dan WC - Segi empat	1,5 M	2,25 M ²	+ 2,00 M	
		- Memanjang	1 M	2,70 M ²	+ 2,00 M

Sumber: Ketentuan Minimum Proyek Perumahan Dan Rumah Sederhana KPR-BTN, (1984 :24)

2.3 Perumahan Tradisional Sebagai Perwujudan Budaya Tradisional Bali

2.3.1 Konsepsi Tentang Budaya Tradisional Bali

Keberadaan manusia pada hakekatnya, terwujud sebagai makhluk sosial dan berbudaya dengan berbagai kondisi obyektif dan perjalanan historis, mengakibatkan manusia berusaha mengembangkan sistem sosial dan sistem budayanya secara khas, seperti; misalnya sistem sosial Bali sebagai salah satu sistem sosial budaya Indonesia, diantara kebhinekaan sistem sosial yang ada di Indonesia. Pengertian kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1975: 19), adalah; keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Sedangkan Astika (1986 : 4), memberi pengertian kebudayaan, adalah; keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan.

Budaya tradisional Bali merupakan perwujudan pengaturan tingkah laku umat yang dilandasi agama Hindu dengan 3 (tiga) unsur kerangka dasar, yaitu; 1). *Tatwa* atau filsafat; 2). *Susila* atau etika; 3). *Upacara* atau ritual (Parisada Hindu Dharma, 1978: 16).

Dalam kehidupan sehari-hari dalam pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan *Tatwa, Susila dan Upacara*, lebih mengarah pada perwujudan untuk mencapai hubungan yang harmonis manusia (*Bhuana alit*) dengan Tuhan Yang Maha Esa (*Bhuana agung*), melahirkan suatu adat yang banyak mencakup aspek kehidupan berupa konsepsi-konsepsi Astika (1986 : 6).

Konsepsi *Tri Hita Karana* yang mengatur keseimbangan antara manusia sebagai *Bhuana alit* dengan *Bhuana agung* (alam semesta). Dalam kehidupan sehari-hari konsepsi ini, diwujudkan dalam ketiga unsur tunggal yang tercermin pada wadah interaksinya, yaitu pola rumah dan *desa* yang memenuhi ketiga unsur tersebut (Kaler, 1983: 44).

Konsepsi *Tri Angga* yang mengatur susunan unsur-unsur kehidupan manusia di alamnya/lingkungan fisik, yaitu; *Utama Angga, Madya Angga* dan *Nista Angga*. Dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam hirarki tata nilai rumah maupun *desa*. Suatu adat atau kebiasaan yang juga memperlihatkan adanya keseimbangan hubungan manusia dengan alam, manusia dengan sesama dalam perhitungan ergonomis dan estetika bentuk bangunan adalah konsepsi *Asta Kosala-Kosali* dan *Asta Bumi*. (Astika, 1986:7).

Dapat disimpulkan rumah/ arsitektur tradisional Bali yang memiliki konsepsi-konsepsi yang dilandasi agama Hindu, merupakan perwujudan budaya, dimana karakter perumahan tradisional Bali sangat ditentukan norma-norma agama Hindu, adat istiadat serta rasa seni yang mencerminkan kebudayaan. (Bappeda Tk.I Bali dan Universitas Udayana, 1982:119). Rumah tradisional Bali yang mewadahi aktivitas manusia tradisional di dalamnya terkandung pengertian "*Catur Purusartha*" (*dharm*a, *artha*, *khama* dan *moksah*) dengan masing-masing aspeknya tersirat dalam perwujudannya. Sebagai bagian kebudayaan tradisional Bali, merupakan perwujudan budi daya kreativitas manusia dengan rumah yang mewadahnya. Perwujudan rumah tradisional sebagai wadah aktivitas

dengan ruang-ruang tradisional untuk mencapai tujuan "*Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*" (Universitas Udayana, 1976: 8-9).

Perumahan di Bali yang disebut *desa* sebagai suatu tempat (wadah) kesatuan wilayah administratif maupun adat, merupakan fenomena hubungan timbal balik antara wadah dengan isi (masyarakat sebagai suatu lembaga). Bentuk lembaga tradisional atas dasar kesatuan wilayah disebut *desa adat*. Jenis-jenis lembaga tradisional dalam masyarakat Bali adalah *desa, banjar, subak, dan sekehe* (Bappeda Tk.I Bali dan Universitas Udayana, 1982:30). Konsep desa di Bali memiliki dua pengertian, yaitu *desa adat* dan *desa dinas*. *Desa adat* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Bali, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu, yang secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan tersendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Landasan dasar *desa adat* di Bali adalah konsep *Tri Hita Karana*.

2.3.2 Landasan Filosofi Perumahan Tradisional Bali

Terwujudnya pola perumahan tradisional sebagai lingkungan buatan sangat terkait dengan sikap dan pandangan hidup masyarakat Bali, tidak terlepas dari sendi-sendi agama, adat istiadat, kepercayaan dan sistem religi yang melandasi aspek-aspek kehidupan. Peranan dan pengaruh agama Hindu dalam penataan lingkungan buatan, yaitu terjadinya implikasi agama dengan berbagai kehidupan bermasyarakat.

Rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti; tidur, makan, istirahat juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat. (Sulistyawati. dkk, 1985: 15). Dengan demikian rumah tradisional sebagai perwujudan budaya sangat kuat dengan landasan filosofi yang berakar dari agama Hindu. Peranan rumah tradisional Bali dalam

hubungannya dengan spiritual, dalam kehidupan sehari-hari mewadahi aktivitas penghuni dalam melakukan *Panca Yadnya* sebagai realisasi *Panca Sradha* (Universitas Udayana, 1976:8).

Agama Hindu mengajarkan agar manusia mengharmoniskan alam semesta dengan segala isinya yakni *Bhuana agung* (makro kosmos) dengan *Bhuana alit* (mikro kosmos), dalam kaitan ini *Bhuana agung* adalah lingkungan buatan/ bangunan dan *Bhuana alit* adalah manusia yang mendirikan dan menggunakan wadah tersebut (Subandi, 1990).

Manusia (*Bhuana alit*) merupakan bagian dari alam (*Bhuana agung*), selain memiliki unsur-unsur pembentuk yang sama, juga terdapat perbedaan ukuran dan fungsi. Manusia sebagai isi dan alam sebagai wadah, senantiasa dalam keadaan harmonis dan selaras seperti *Manik* (janin) dalam *Cucupu* (rahim ibu). Rahim sebagai tempat yang memberikan kehidupan, perlindungan dan perkembangan janin tersebut, demikian pula halnya dengan manusia berada, hidup, berkembang dan berlindung pada alam semesta, ini yang kemudian dikenal dengan konsep *Manik ring Cucupu*. Dengan alasan itu pula, setiap wadah kehidupan atau lingkungan buatan, berusaha diciptakan senilai dengan suatu *Bhuana agung*, dengan susunan unsur-unsur yang utuh, yaitu; *Tri Hita Karana*.

Tri Hita Karana yang secara harfiah *Tri* berarti tiga; *Hita* berarti kemakmuran, baik, gembira, senang dan lestari; dan *Karana* berarti sebab musabab atau sumbernya sebab (penyebab), atau tiga sebab/ unsur yang menjadikan kehidupan (kebaikan), yaitu: 1). *Atma* (zat penghidup atau jiwa/roh), 2). *Prana* (tenaga), dan 3). *Angga* (jasad /fisik) (Majelis Lembaga Adat, 1992:15).

Bhuana agung (alam semesta) yang sangat luas tidak mampu digambarkan oleh manusia (*Bhuana alit*), namun antara keduanya memiliki unsur yang sama, yaitu *Tri Hita Karana*, oleh sebab itu manusia dipakai sebagai cerminan. Konsepsi *Tri Hita Karana*

dipakai dalam pola perumahan tradisional yang dapat diidentifikasi; *Parhyangan/ Kahyangan Tiga* sebagai unsur *Atma*/ jiwa, *Krama* /warga sebagai unsur *Prana*/tenaga dan *Palemahan*/ tanah sebagai unsur *Angga*/jasad (Kaler, 1983:44).

Konsepsi *Tri Hita Karana* melandasi terwujudnya susunan kosmos dari yang paling makro (*Bhuana agung*/ alam semesta) sampai hal yang paling mikro (*Bhuana alit*/ manusia). Dalam alam semesta jiwa adalah *Paramatma* (Tuhan Yang Maha Esa), tenaga adalah berbagai tenaga alam dan jasad adalah *Panca Maha Bhuta*. Dalam perumahan (*desa*); jiwa adalah *parhyangan* (*pura Desa*), tenaga adalah *pawongan* (masyarakat) dan jasad adalah *palemahan* (wilayah desa). Demikian pula halnya dalam *banjar*; jiwa adalah *Pura Banjar*, tenaga adalah *pawongan/warga banjar* dan jasad adalah *palemahan* (wilayah banjar). Pada rumah tinggal jiwa adalah *sanggah/merajan* (tempat suci), tenaga adalah penghuni dan jasad adalah pekarangan. Sedangkan pada manusia, jiwa adalah *atman*, tenaga adalah *sabda bayu idep* dan jasad adalah *stula sarira*/ tubuh manusia. Penjabaran konsep *Tri Hita Karana* dalam susunan kosmos, dapat dilihat dalam Tabel II.2.

TABEL II.2
TRI HITA KARANA DALAM SUSUNAN KOSMOS

Susunan/Unsur	Jiwa/ Atma	Tenaga/ Prana	Fisik/ Angga
Alam Semesta (<i>Bhuana agung</i>)	<i>Paramatma</i> (Tuhan Yang Maha Esa)	Tenaga Yang Menggerakkan Alam	Unsur-unsur <i>Panca Maha Bhuta</i>
<i>Desa</i>	<i>Kahyangan Tiga / Pura desa</i>	<i>Pawongan/</i> warga desa	<i>Palemahan/</i> wilayah desa
<i>Banjar</i>	<i>Parhyangan/ pura banjar</i>	<i>Pawongan/</i> warga banjar	<i>Palemahan/</i> wilayah banjar
Rumah	<i>Sanggah/ Pemerajan</i>	Penghuni Rumah	Pekarangan rumah
Manusia (<i>Bhuana alit</i>)	<i>Atman/</i> Jiwa manusia	<i>Prana/</i> Tenaga <i>sabda bayu idep</i>	<i>Angga/</i> Badan manusia

Sumber: Sulistyawati. dkk, (1985: 5)

Tri Hita Karana (tiga unsur kehidupan) yang mengatur keseimbangan atau keselarasan manusia dengan lingkungan, tersusun dalam susunan jasad/*angga*,

memberikan turunan konsep ruang yang disebut *Tri Angga*. Secara harfiah *Tri* berarti tiga dan *Angga* berarti badan, yang lebih menekankan tiga nilai fisik yaitu: *Utama Angga*, *Madya Angga* dan *Nista Angga*. Dalam alam semesta/*Bhuana agung*, pembagian ini disebut *Tri Loka*, yaitu: *Bhur Loka* (bumi), *Bhuah Loka* (angkasa), dan *Swah Loka* (Sorga). Ketiga nilai tersebut didasarkan secara vertikal, dimana nilai *Utama* pada posisi teratas/sakral, *Madya* pada posisi tengah dan *Nista* pada posisi terendah/kotor.

Konsepsi *Tri Angga* berlaku dari yang bersifat makro (alam semesta/*Bhuana agung*) sampai yang paling mikro (manusia/*Bhuana alit*). Dalam skala wilayah; gunung memiliki nilai *Utama*, dataran bernilai *Madya* dan lautan pada nilai *Nista*. Dalam perumahan; *Kahyangan Tiga (Utama)*, Perumahan penduduk (*Madya*), Kuburan (*Nista*), juga berlaku dalam skala rumah; *Sanggah/Pemerajan (Utama)*, pekarangan (*Madya*), *Tebe (Nista)*. Susunan *Tri Angga* dalam susunan kosmos dapat dilihat dalam Tabel II.3.

TABEL II.3
TRI ANGGA DALAM SUSUNAN KOSMOS

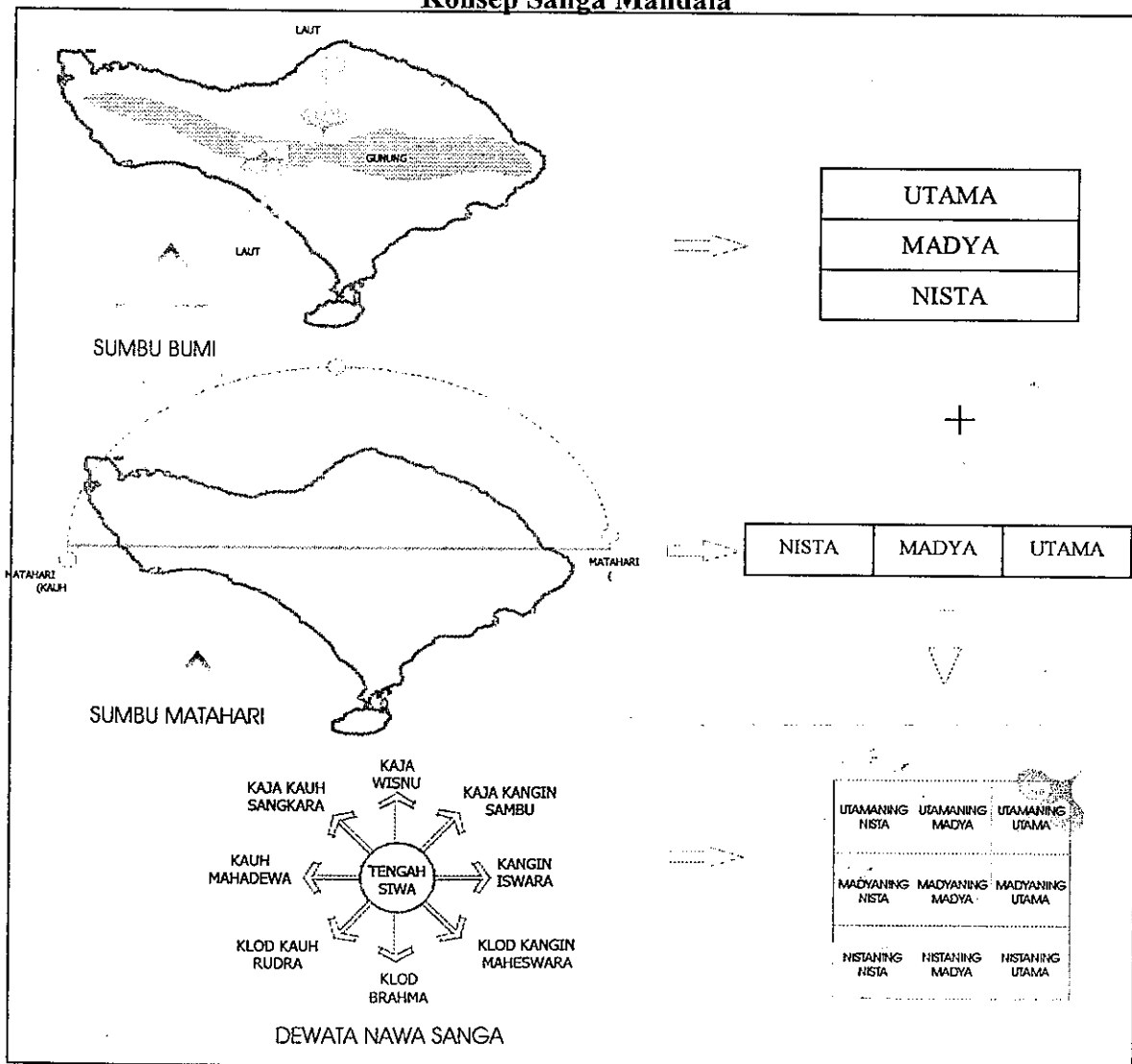
Susunan/ Unsur	<i>Utama Angga</i> Sakral	<i>Madya Angga</i> Netral	<i>Nista Angga</i> Kotor
Alam Semesta	<i>Swah Loka</i>	<i>Bwah Loka</i>	<i>Bhur Loka</i>
Wilayah	Gunung	Dataran	Laut
Perumahan/Desa	<i>Pura</i>	Permukiman	<i>Setra/Kuburan</i>
Rumah Tinggal	<i>Sanggah/Pemerajan</i>	Pekarangan	<i>Tebe</i>
Bangunan	Atap	Kolom/Dinding	Lantai/ <i>Bataran</i>
Manusia	Kepala	Badan	Kaki

Sumber: Sulistyawati. dkk, (1985:8)

Tri Angga yang memberi arahan tata nilai secara vertikal (secara horisontal ada yang menyebut *Tri Mandala*), juga terdapat tata nilai *Hulu-Teben*, merupakan pedoman tata nilai di dalam mencapai tujuan penyelarasan antara *Bhuana agung* dan *Bhuana alit*. *Hulu-Teben* memiliki orientasi antara lain: 1) berdasarkan sumbu bumi yaitu; arah *kaja-klod* (gunung dan laut), 2) arah tinggi-rendah (*tegeh* dan *lebah*), 3) berdasarkan sumbu Matahari yaitu; Timur-Barat (Matahari terbit dan terbenam) (Sulistyawati. dkk, 1985: 7).

Tata nilai berdasarkan sumbu bumi (*kaja/gunung-klod/laut*), memberikan nilai *Utama* pada arah *kaja* (gunung) dan *Nista* pada arah *klod* (laut), sedangkan berdasarkan sumbu Matahari; nilai *Utama* pada arah Matahari terbit dan *Nistha* pada arah Matahari terbenam. Jika kedua sistem tata nilai ini digabungkan, secara imajiner akan terbentuk pola *Sanga Mandala*, yang membagi ruang menjadi sembilan segmen. (Putra. dkk, 1987: 57). Konsep tata ruang *Sanga Mandala* juga lahir dari sembilan manifestasi Tuhan dalam menjaga keseimbangan alam menuju kehidupan yang harmonis yang disebut *Dewata Nawa Sanga* (Putra, 1984). Untuk jelasnya lihat gambar 2.1.

Gambar: 2.1
Konsep Sanga Mandala



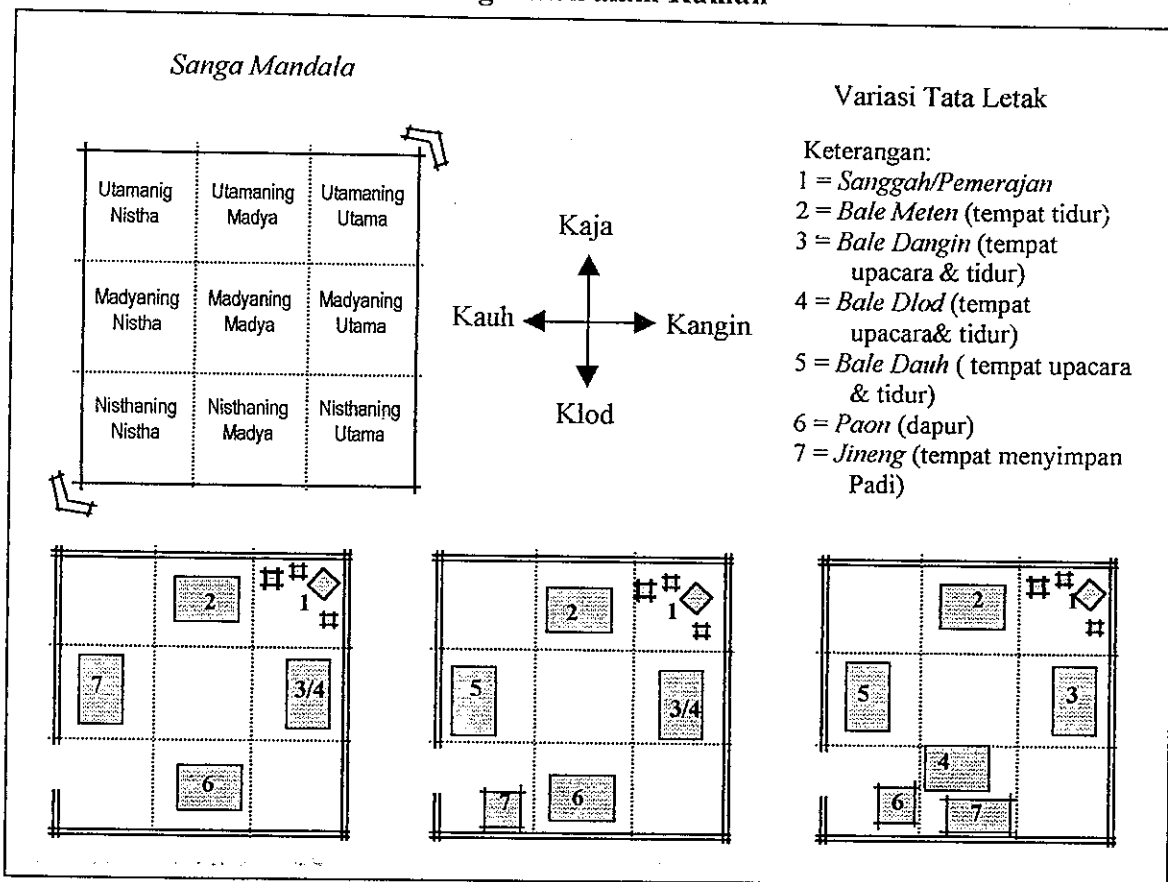
Sumber: Eko Budihardjo, (1986)

Dalam turunannya konsep ini menjadi pola *Natah* (Putra. dkk, 1987:58). Pembagian ruang menjadi sembilan segmen secara fisik, jelas kelihatan dalam pola dan susunan ruang *Puri* yaitu; rumah untuk kasta *Kesatria* yang memegang pemerintahan atau raja (Bappeda Tk.I Bali dan Universitas Udayana, 1982: 68). Konsepsi *Sanga Mandala* juga berlaku dalam tata ruang perumahan (*desa*).

Tata nilai rumah tradisional Bali sangat erat hubungannya dengan agama dan adat, yang mengakibatkan masing-masing kegiatan memiliki tempat sesuai dengan nilainya. Konsepsi tata ruang *Sanga Mandala* menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan dan tata letak bangunan dalam pekarangan rumah, kegiatan yang dianggap utama, memerlukan ketenangan diletakkan pada daerah *Utama*, kegiatan yang dianggap kotor/sibuk diletakkan di *teben* pada daerah *Nista*, sedangkan kegiatan diantaranya diletakkan ditengah. Tata letak bangunan, yaitu; *Sanggah/Pemerajan* pada daerah paling *Utama*, kegiatan rumah tangga termasuk fungsi tempat tidur bagian tengah dan tempat pembuangan sampah paling *teben/Nistha* (Sulistyawati. dkk; 1985: 10-11).

Rumah tradisional Bali merupakan komposisi beberapa bangunan yang dikelilingi *tembok penyengker* (pagar keliling rumah), perwujudan fisik meliputi; tata letak, tata ruang dan tata bangunan. Konsep *Sanga Mandala* merupakan dasar tata letak bangunan sesuai dengan fungsinya, antara lain: *Sanggah/Pemerajan* letaknya *Kaja kangin (Utamaning Utama)*, *Bale Gedel/Dangin* berfungsi tempat upacara dan tidur daerah *Utamaning Madya*, *Paon* berfungsi tempat memasak daerah *Nistaning Madya*, *Bale Dauh* berfungsi ruang tidur tamu pada daerah *Nistaning Madya*, *Bale Meten* berfungsi sebagai tempat tidur pada daerah *Madyaning Utama*, *Natah* sebagai ruang keluarga daerah *Madyaning Madya*, Pintu masuk pada daerah *Nistaning Nista* (Putra 1987: 4-7). Jumlah bangunan yang ada juga bervariasi, konsep *Sanga Mandala* dan variasi tata letak dapat dilihat dalam Gambar 2.2.

Gambar: 2.2
Konsepsi Sanga Mandala Dan Tata Letak
Bangunan Dalam Rumah



Sumber: Sulistyawati. dkk (1985); Eko Budihardjo (1986); Putra. dkk (1987)

Sesuai dengan kondisi dan potensi, tata letak rumah tradisional Bali umumnya sangat bervariasi. Munculnya variasi dalam pola tata ruang rumah karena adanya konsep *Tri Pramana*, sebagai landasan taktis operasional yang dikenal dengan *Desa-Kala-Patra* (tempat-waktu dan keadaan).

2.3.3 Perumahan Tradisional Bali

Pengertian perumahan tradisional Bali atau secara tradisional disebut *desa* (adat), merupakan suatu tempat kehidupan yang utuh dan bulat yang terdiri dari 3 unsur, yaitu: unsur *kahyangan tiga* (pura desa), unsur *krama desa* (warga), dan *karang desa* (wilayah)

(Sulistiyawati, 1985: 3). Sedangkan menurut Gelebet (1984: 48), perumahan atau permukiman tradisional merupakan tempat tinggal yang berpola tradisional dengan perangkat lingkungan dengan latar belakang norma-norma dan nilai-nilai tradisional.

Perumahan tradisional Bali yang dilandasi konsepsi seperti; hubungan yang harmonis antara *Bhuana agung* dengan *Bhuana alit*, *Manik Ring Cucupu*, *Tri Hita Karana*, *Tri Angga*, *Hulu-Teben* sampai melahirkan tata nilai *Sanga Mandala* yang memberi arahan tata ruang, baik dalam skala rumah (*Umah*) maupun perumahan (*desa*). Hasil dari penurunan konsep tata ruang ini sangat beragam, namun Ardi P. Parimin (1986) menyimpulkan adanya 4 atribut dalam perumahan tradisional Bali, yaitu:

- 1) Atribut Sosiologi menyangkut sistem kekerabatan masyarakat Bali yang dicirikan dengan adanya sistem *desa adat*, *sistem banjar*, *sistem subak*, *sekeha*, *dadia*, dan *perbekalan*.
- 2) Atribut Simbolik berkaitan dengan orientasi perumahan, orientasi sumbu utama desa, orientasi rumah dan halamannya.
- 3) Atribut Fungsional menyangkut fungsi perumahan tradisional Bali pada dasarnya berfungsi keagamaan dan fungsi sosial yang dicirikan dengan adanya 3 pura desa.
- 4) Atribut Morfologi menyangkut komponen yang ada dalam suatu perumahan inti (*core*) dan daerah *periphery* di luar perumahan, yang masing-masing mempunyai fungsi dan arti pada perumahan tradisional Bali.

Berdasarkan patokan di atas maka diidentifikasi unsur-unsur yang ada pada perumahan tradisional Bali, yang meliputi; faktor sosial, faktor simbolis, faktor fungsional dan faktor morfologis.

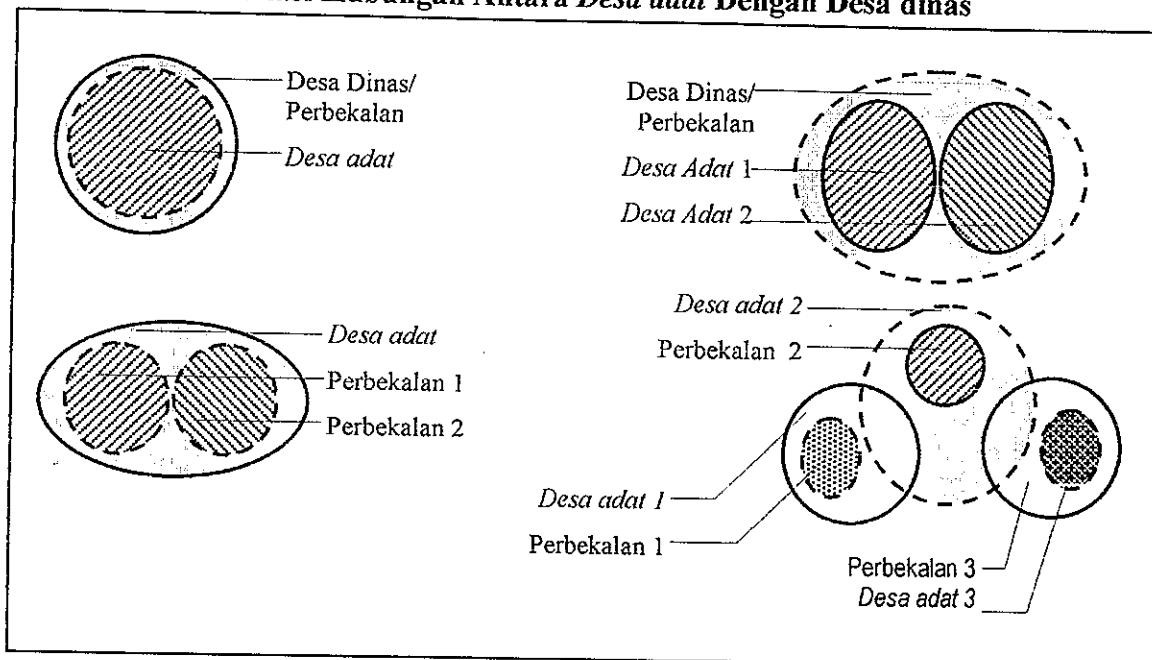
A. Faktor Sosial

Dalam pandangan masyarakat Bali konsep teritorial memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, teritorial sebagai suatu kesatuan wilayah tempat para warganya secara bersama-sama melaksanakan upacara-upacara dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya dengan nama *desa adat*; dan kedua, desa sebagai kesatuan wilayah administrasi dengan nama desa dinas atau perbekalan. Sistem kemasyarakatan (organisasi) *desa* merupakan pengikat warga yang diatur dengan *awig-awig desa*, kebiasaan dan kepercayaan (Bappeda Tk. I Bali dan Universitas Udayana, 1982:32).

Dalam skala yang lebih kecil sebagai bagian (sub unit) *desa* dikenal *banjar* baik adat maupun dinas. Pengertian *banjar* kaitannya dengan *desa adat* di Bali adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari *desa adat* serta merupakan persekutuan hidup sosial, dalam keadaan senang maupun susah, berdasarkan persekutuan hidup setempat atau kesatuan wilayah (Agung, 1984: 18-29; Covarrubias, 1986:39-70). *Banjar* sebagai lembaga tradisional merupakan bagian desa juga memiliki tiga unsur, hanya saja unsur *kahyangan tiga* berupa fasilitas lingkungan berupa *Bale banjar* yang dilengkapi *pura Banjar*, sebagai tempat pertemuan, kegiatan sosial, upacara dan orientasi warga banjar. (Gelebet, 1984 :59)

Dari kesatuan wilayah, tidak ada ketentuan satu desa dinas terdiri beberapa *desa adat* atau sebaliknya, tapi menunjukkan variasi. Variasinya cukup beraneka ragam dan kompleks, antara lain : 1) Satu desa dinas terdiri dari satu *desa adat*, 2) Satu desa dinas mencakup beberapa *desa adat*, 3) Satu *desa adat* mencakup beberapa desa dinas, 4) Kombinasi 2 dan 3. Variasi hubungan antara *desa adat* dengan desa dinas yang cukup beragam tersebut seperti terlihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Variasi Hubungan Antara Desa adat Dengan Desa dinas



Sumber : Adi P. Parimin (1986: 25)

Untuk memperoleh pengertian tentang komunitas masyarakat Bali, maka dapat dilihat dari adanya pengakuan atau legitimasi serta atribut-atribut sebagai ciri-ciri fisik.

a. Pengakuan (legitimasi)

Disamping adanya pengakuan formal, maka legitimasi suatu komunitas berkembang pula dikalangan warga menurut persepsinya dengan ciri: 1). Adanya perasaan cinta dan terkait kepada wilayah tersebut, 2). Adanya rasa kepribadian kelompok, 3). Adanya pola hubungan yang bersifat intim dan cenderung bersifat suka rela, 4). Adanya suatu tingkat penghayatan dari sebagian besar lapangan kehidupannya secara bulat.

Beberapa syarat pokok terbentuknya desa adat, yaitu : 1). Adanya wilayah dengan batas-batas tertentu yang disebut *palemahan desa* atau tanah desa, 2). Adanya warga desa yang disebut *pawongan desa*. Sistem kemasyarakatan di Bali mewajibkan kepada orang yang telah *mekurenan* (berumah tangga) dan bertempat tinggal di wilayah suatu *desa adat* untuk menjadi *krama banjar*, 3). Adanya *pura* sebagai pusat pemujaan warga desa yang

disebut *kahyangan tiga*, 4). Adanya suatu pemerintahan adat yang berlandaskan pada aturan-aturan adat tertentu/*awig-awig desa*.

b. *Atribut Desa Adat*

Atribut pokok dari suatu komunitas kecil yang terwujud sebagai *desa adat* di Bali tersimpul dalam konsepsi *Tri Hita Karana* sebagai berikut :

1. *Kahyangan Tiga*, yang terdiri dari tiga *pura* sebagai pusat pemujaan warga desa, yaitu *Pura Puseh* (pemujaan *Wisnu*), *Bale Agung* (pemujaan *Brahma*) dan *Pura Dalem* (pemujaan *Siwa*). Untuk satuan *banjar* yang merupakan sub bagian *desa* terdapat fasilitas umum berupa *Bale Banjar* yang dilengkapi *Bale Kulkul* dan *Pura Banjar*.
2. *Pawongan Desa*, yaitu *seluruh* warga desa yang bersangkutan. Sebagai warga inti adakah setiap pasangan suami istri yang telah berkeluarga (*mekurenan*). Menurut jumlah anggotanya, *banjar* di Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; *banjar* besar, bila jumlah anggotanya lebih dari 50 *kuren* (kepala keluarga), *banjar* kecil bila anggotanya lebih sedikit dari 50 *kuren*. Besaran yang efektif dalam *desa adat* di Bali adalah sekitar 200 KK setiap *banjar*. Maka bila rata-rata masing-masing KK ada lima orang maka setiap *banjar* (*penyatakan*) terdiri sekitar seribu jiwa. Penelitian Prof. Antonic terhadap desa-desa adat dan dinas di Bali menyimpulkan besaran efektif untuk sebuah desa adalah lima ribu jiwa (Universitas Udayana, 1976:14).
3. *Palemahan Desa*, yaitu wilayah desa yang merupakan tempat perumahan warga desa. Perumahan berada pada kedua belah sisi mengikuti pola jalan, *Bale banjar* sebagai fasilitas sosial, umumnya terletak pada posisi yang strategis, seperti pada satu sudut persilangan atau pertigaan jalan di tengah-tengah lingkungan *banjar* (Bappeda Tk.I Bali dan Universitas Udayana, 1982: 20).

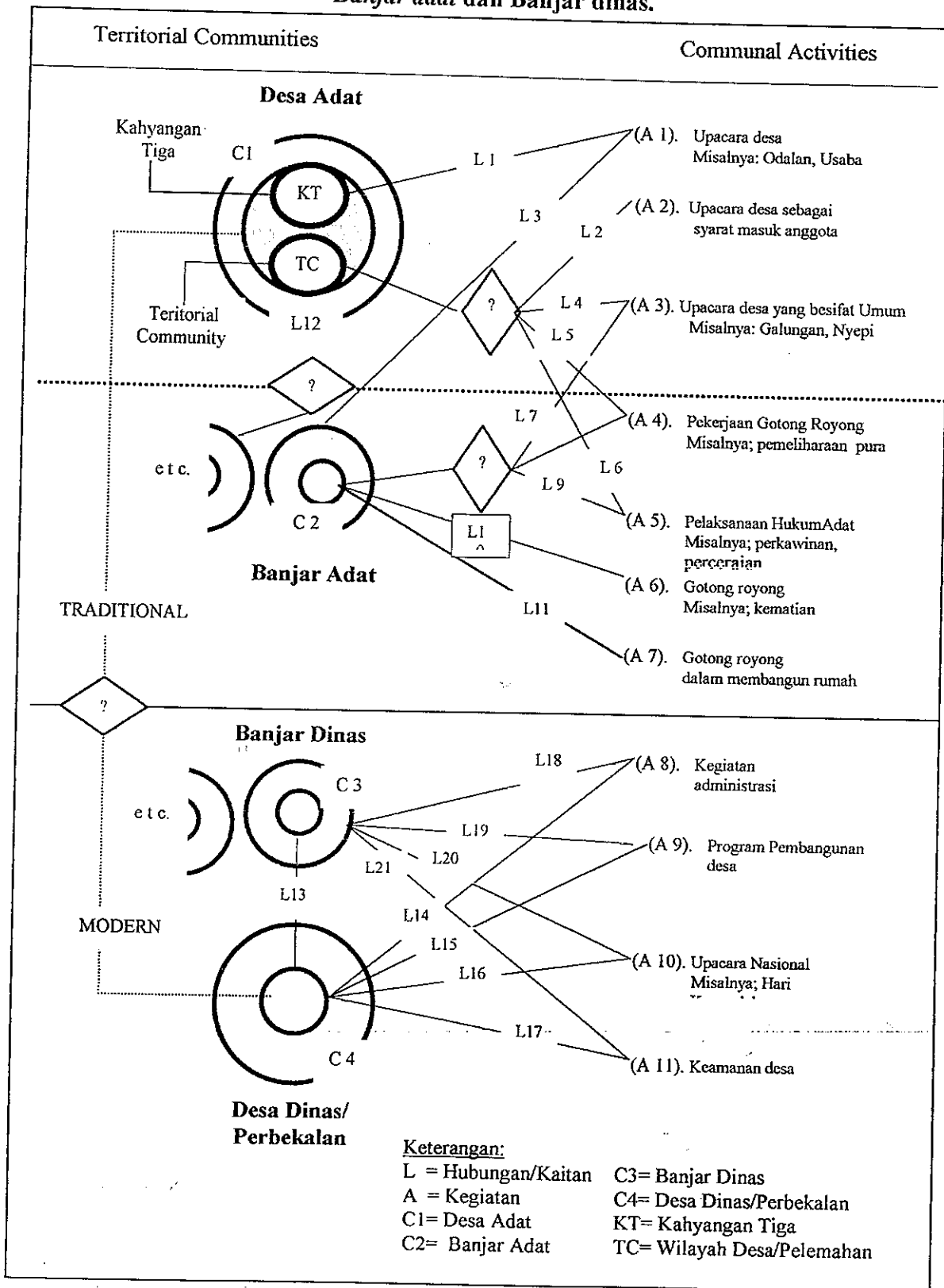
Disamping atribut pokok tersebut, masih perlu dikemukakan beberapa fasilitas dan pelayanan desa yang menjadi simbol suatu komunitas masyarakat Bali yang terwujud sebagai *desa adat*, yaitu: 1) Balai pertemuan (*Bale Banjar*) tempat terselenggaranya rapat-rapat desa, 2) Kuburan desa (*setra*) yang biasanya terletak berdekatan dengan *pura dalem*, 3) *Perempatan desa* merupakan tempat yang dianggap keramat dan juga sebagai tempat upacara, 4) Tata ruang susunan perumahan yang mengikuti konsep *Tri Angga*, yaitu: *Utama* (tinggi dan hulu), *Madya* (tengah), dan *Nistha* (rendah dan bawah).

Desa adat sebagai suatu komunitas dengan fokus fungsinya dibidang adat dan agama, seperti; upacara *Odalan*, *Galungan*, *Nyepi (tawur kesanga)*, sedangkan dalam skala banjar adat, seperti; pemeliharaan pura, upacara perkawinan, kematian dan membangun rumah. Dalam menjalankan fungsinya itu, tiap-tiap *desa adat* mempunyai kedudukan yang bersifat otonom, dalam arti tiap *desa adat* berdiri sendiri menuruti aturan aturan (*awig-awig desa*). Bidang pemerintahan berada di tangan urusan desa dinas, menangani fungsi, antara lain; administrasi pemerintahan, pembangunan desa, upacara nasional serta keamanan desa. Dalam hal kedinasan itu, desa dinas membawahi sejumlah banjar dinas. Hubungan struktural dan fungsional antara desa dinas, desa adat, banjar dinas dan banjar adat adalah seperti terlihat dalam Gambar: 2.4.

B. Faktor Simbolik

Simbolik dalam perumahan tradisional Bali, adalah berkenaan dengan arah orientasi kosmologis. Konsepsi *Tri Angga* yang mengatur keseimbangan atau keharmonisan manusia dengan lingkungannya dalam susunan jasad/*Angga*, menjadi tiga tingkatan nilai yaitu; *Utama*, *Madya* dan *Nistha* dalam arah vertikal maupun horisontal.

Gambar 2.4
Hubungan Struktural dan Fungsional Antara Desa adat, Desa dinas,
Banjar adat dan Banjar dinas.



Sumber: Ardi P. Parimin (1986: 24)

Terdapat dua arah orientasi, yaitu; orientasi *kaja-klod* (sumbu bumi) sebagai orientasi aktivitas manusia, dengan nilai *Utama* adalah *Kaja/gunung* dan nilai *Nistha* adalah *Klod/ke laut*, juga orientasi *kangin-kauh* (sumbu matahari) merupakan sumbu spiritual sebagai aktivitas keagamaan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan nilai *Utama* adalah *Kangin/matahari terbit* dan *Nistha* adalah *Kauh/matahari terbenam*. (Universitas Udayana, 1976: 12).

Sebagaimana diketahui kegiatan masyarakat Bali pada umumnya dapat dibagi atas dua, yaitu: kegiatan yang bersifat sakral (berkaitan dengan kegiatan keagamaan), dan kegiatan yang bersifat profan (berkaitan dengan kegiatan sosial masyarakat), dan penempatan kegiatan tersebut dibedakan berdasarkan orientasi kesakralannya.

Pada masing-masing sumbu terdapat nilai *Madya* dibagian tengah, dengan demikian akan terdapat tiga tingkatan nilai; *Utama*, *Madya* dan *Nistha* dalam setiap sumbu sehingga muncul konsep *Sanga Mandala* atau *Dewata Nawa Sanga*. (Universitas Udayana, 1976: 13). *Sanga Mandala* yang dilandasi konsep *Dewata Nawa Sanga*, sembilan manifestasi dewa dalam menjaga keseimbangan alam menuju kehidupan yang harmonis. *Sanga Mandala* yang membagi ruang menjadi sembilan tingkatan nilai dengan menempatkan daerah paling utama (sakral) atau *Utamaning-utama* pada arah *Kaja-kangin*, sedang daerah yang sifatnya profan di tempatkan pada arah *Klod-kauh*.

Orientasi arah sakral dalam perumahan dapat mengarah :

- Arah sumbu jalan utama (*Kaja-klod*), sebagai perwujudan dari orientasi sumbu bumi dimana *Kaja/gunung* (yang diutamakan) dan *Klod/ke laut* (arah rendah).
- Arah *Kaja- kangin* yaitu daerah yang memiliki nilai *Utamaning utama* sesuai konsep *Sanga Mandala*.

- Elemen alam lainnya sesuai dengan karakteristik daerah, seperti; kahyangan jagat, puncak bukit, sungai, dan berbagai keadaan lainnya.

Elemen–elemen ruang yang dijadikan indikator kesakralan dalam perumahan, antara lain: 1). *Pura Puseh dan Pura Desa* pada daerah *Utama*, 2). Bangunan-bangunan *pawongan*/perumahan dan fasilitas sosial kemasyarakatan, seperti; *Bale banjar* dan *wantilan* pada daerah *Madya*, 3). Kuburan/*setra* termasuk *Pura Dalem* di daerah *Nistha* . (Universitas Udayana, 1976: 14). .

Tata letak ruang perumahan tradisional harus sesuai dengan orientasi, maka dalam menentukan atau memilih tata letak pekarangan rumah menurut aturan tradisional Bali ada beberapa pantangan yang harus diperhatikan yaitu :

- Pekarangan rumah tidak boleh bersebelahan langsung ada disebelah timur atau utara *Pura*, bila tidak dibatasi dengan lorong atau pekarangan lain seperti: sawah, ladang/sungai. Pantangan itu disebut: *Ngeluanin Pura*.
- Pekarangan rumah tidak boleh *Numbak Rurung*, atau Tusuk Sate. Artinya jalan lurus langsung bertemu dengan pekarangan rumah.
- Pekarangan rumah tidak boleh diapit oleh pekarangan/rumah sebuah keluarga lain. Larangan ini dinamakan: *Karang Apitan*.
- Pekarangan rumah tidak boleh dilingkari oleh pekarangan sebuah keluarga lain. Pantangan ini dinamakan: *Karang Kalingkuhan*.
- Pekarangan rumah tidak boleh dijatuhi oleh cucuran atap dari rumah orang lain. Pantangan ini dinamakan: *Karang Kalebon Amuk*.
- Pekarangan rumah sebuah keluarga tidak boleh berada sebelah-menyebelah jalan umum dan berpapasan. Pantangan ini dinamakan: *Karang Negen*.

- Pekarangan rumah yang sudut Barat Dayanya bertemu dengan sudut Timur Lautnya pekarangan rumah keluarga itu juga dan berada sebelah-menyebelah jalan umum, ini tidak boleh. Pantangan ini dinamakan: *Celedu Nginyah*.
- Dan lain sebagainya.

Dalam beberapa hal pantangan-pantangan tersebut ada cara penyelesaiannya, seperti; untuk menghilangkan efek negatif *numbak rurung*, di ujung gang agar didirikan *Tugu* sesuai dengan aturan filosofisnya (Universitas Udayana, 1976: 14).

C. Faktor Fungsional

Fungsional dalam perumahan tradisional Bali, adalah fungsi elemen ruang dalam kaitannya dengan orientasi kosmologis, yang tercermin pada komposisi dan formasi ruang. Konsepsi *Tri Angga* dalam susunan perumahan tradisional; *Parhyangan* adalah *Utama* dengan peruntukan *Pura*, *Pawongan* adalah *Madya* dengan peruntukan permukiman dan *Palemahan* adalah *Nistha* dengan peruntukkan diantaranya *Setra*/kuburan.

Konsepsi *Sanga Mandala* membagi ruang secara imajiner menjadi sembilan segmen. Masing-masing segmen memiliki peruntukan fungsi sesuai dengan tingkat sakral dan profannya. Konsep *Sanga Mandala* yang bersifat abstrak diterjemahkan ke dalam konsep fisik, dalam tata ruang rumah dan perumahan.

Menurut Robi Sularto (1987 :14), terdapat tiga pola desa di Bali dengan masing-masing memiliki susunan dan peruntukan; Kepala (kegiatan sakral), Badan (kegiatan sosial) dan Kaki (untuk kuburan/*Pura Dalem*). Tata ruang tradisional dalam lingkup desa (Ardi P. Parimin (1986), dibedakan; ruang *Utama* diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat sakral, ruang *Madya* bagi kegiatan yang bersifat keduniawian (sosial, ekonomi dan perumahan), dan ruang *Nistha* bagi kegiatan yang dipandang kotor mengandung limbah.

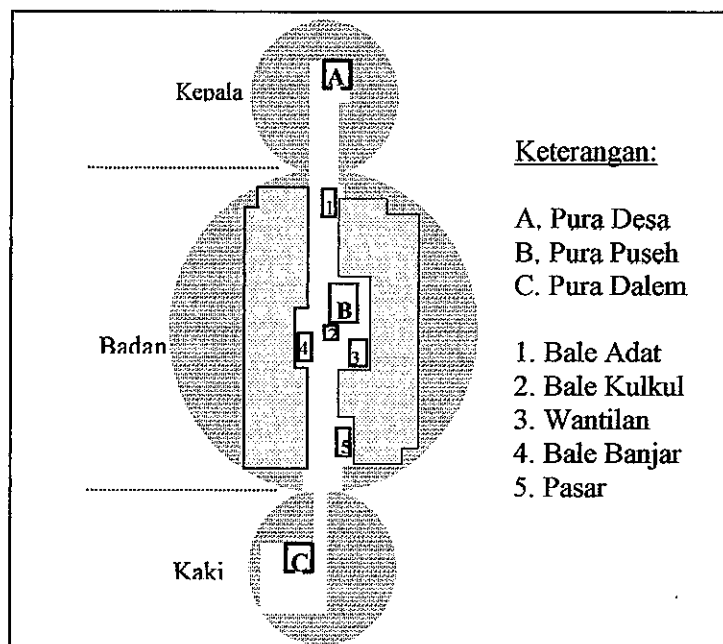
Dalam skala perumahan, penerapan konsep *Tri Angga* (sumber lain menyebut *Tri Mandala*) dan *Sanga Mandala*, melahirkan 3 macam pola tata ruang, yaitu :

a. Pola Linear

Pola linear yang terdapat pada desa-desa tradisional (Bali aga), berbentuk ruang terbuka secara linear membentang *Kaja-klod* yang membagi desa menjadi dua, dengan susunan tata nilai; *Utama, Madya* dan *Nistha*.

Pada bagian ujung Utara perumahan (*kaja*) diperuntukkan untuk *Pura* (*pura bale agung* dan *pura puseh*). Sedang di ujung selatan (*klod*) diperuntukkan untuk *Pura Dalem* (kematian) dan kuburan desa. Diantara kedua daerah tersebut terletak perumahan penduduk dan fasilitas umum (*bale banjar* dan pasar) yang terletak di plaza umum, seperti dijelaskan Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Pola Linier Perumahan Tradisional Bali



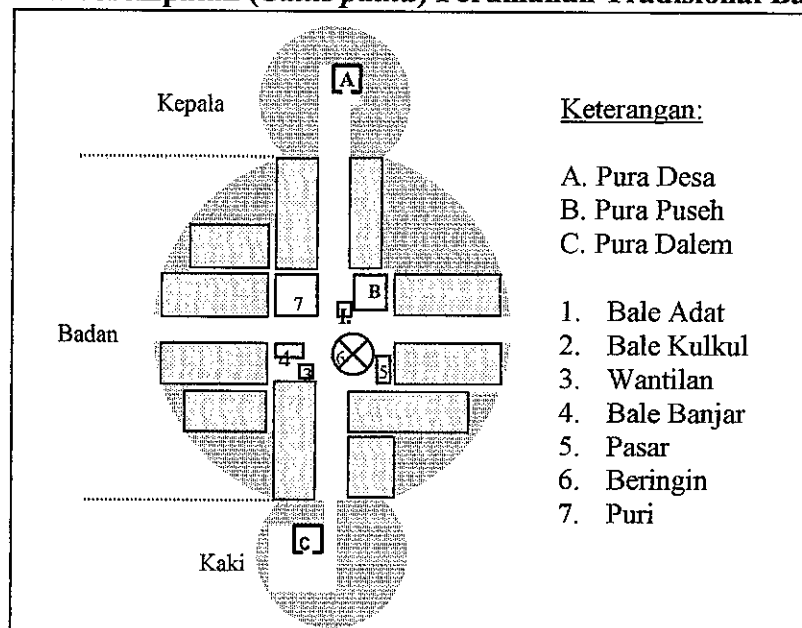
Sumber : Robi Sularto, (1987: 14)

b. Pola Perempatan/ *Catus patha*

Konsep *Sanga Mandala* dalam perumahan tradisional umumnya berlaku pada desa-desa yang memiliki pola Perempatan pada intinya (*core*). Pola Perempatan/*Pempatan*, Kaler (1983) menyebut dengan pola *Catus patha*, juga Ardi P. Parimin (1986) dan Robi Sularto (1987), menyebut pola *Crossroad* atau di Bali juga dikenal sebutan *Catur muka*, *Nyatur desa* atau *Pempatan Agung*, gambaran fisiknya merupakan; dua jalan utama menyilang desa dari perpotongan sumbu *Kaja-klod* dengan sumbu *Kangin-kauh* membentuk perempatan sebagai pusat desa.

Desa yang memiliki pola *Pempatan agung* sebagai pusat lingkungan; *Pura Puseh* dan *Pura Desa* atau Puri menempati daerah *Kaja-kangin*, *Bale Banjar* atau *Wantilan desa* daerah *Kaja-kauh*, lapangan desa daerah *Klod-kangin* dan pasar desa daerah *klod-kauh* (Bappeda Tk. I Bali dan Universitas Udayana, 1982 :20). Kuburan desa atau *setra* ditempatkan di luar desa pada arah *Klod* atau arah *Kauh* pada daerah *Nistha*. Peruntukan perumahan pada daerah *Madya*. Untuk jelasnya lihat Gambar 2.6, dibawah.

Gambar 2.6
Pola Perempatan (*Catus patha*) Perumahan Tradisional Bali

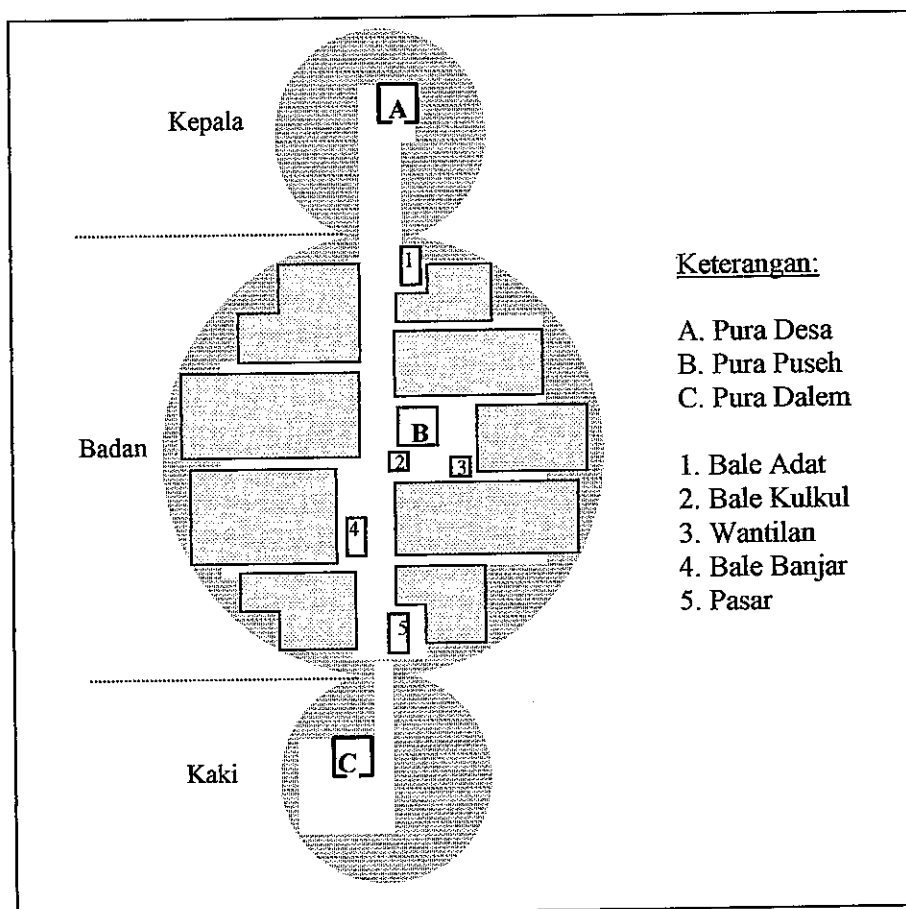


Sumber: Robi Sularto, (1987 :14)

c. Pola Kombinasi

Pola kombinasi merupakan paduan antara pola perempatan (*Catus patha*) dengan pola linear. Pola sumbu perumahan memakai pola perempatan, namun demikian sistem perletakan elemen bangunan mengikuti pola linear. Perumahan dan fasilitas umum terletak pada ruang terbuka (*plaza*) yang ada ditengah-tengah perumahan. Lokasi bagian sakral dan profan masing-masing terletak pada ujung utara dan selatan perumahan. Untuk jelasnya lihat Gambar 2.7.

Gambar 2.7.
Pola Kombinasi Perumahan Tradisional Bali



Sumber : Robi Sularto, (1987:14)

Pola tata ruang yang dikemukakan di atas merupakan penyederhanaan dari pada pola tata ruang yang pada kenyataan sangat bervariasi. Sesuai dengan kondisi dan potensi,

pola perumahan tradisional Bali umumnya sangat bervariasi sesuai dengan latar belakang terbentuknya desa tersebut, ini kelihatan pada desa-desa tradisional seperti; Tenganan dan Bugbug di Karangasem, Julah di Buleleng, Sukawana di Bangli dan yang lainnya. Munculnya variasi dalam pola tata ruang rumah dan perumahan di Bali karena adanya konsep *Tri Pramana*, sebagai landasan taktis operasional yang dikenal dengan *Desa-Kala-Patra* (tempat, waktu dan keadaan) dan *Desa-Mawa-Cara* yang menjelaskan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada landasan filosofinya, dan ini ditunjukkan oleh keragaman pola-pola desa di Bali. (Universitas Udayana, 1976: 14).

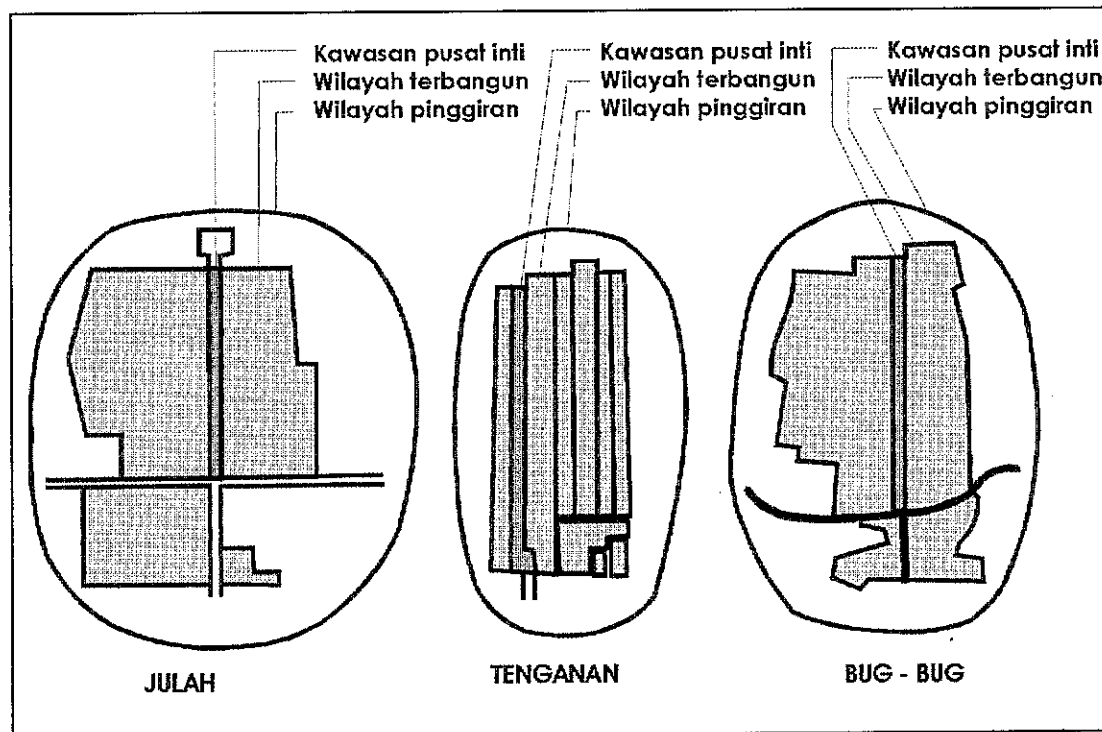
Dalam perkembangan perumahan dan variasi yang muncul, perumahan tradisional Bali dapat diklasifikasikan dalam 2 tipe, yaitu :

- a. Tipe *Bali Aga* merupakan perumahan penduduk asli Bali yang kurang dipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa. Lokasi perumahan ini terletak di daerah pegunungan yang membentang membujur di tengah-tengah Bali, sebagian beralokasi di Bali Utara dan Selatan. Bentuk fisik pola perumahan *Bali Aga* dicirikan dengan adanya jalan utama berbentuk linear yang berfungsi sebagai ruang terbuka milik komunitas dan sekaligus sebagai sumbu utama desa. Contoh perumahan *Bali Aga*: Julah (di Buleleng), Tenganan, Timbrah dan Bugbug (di Karangasem).
- b. Tipe Bali Dataran, merupakan perumahan tradisional yang banyak dipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa. Perumahan type ini tersebar di dataran bagian selatan Bali yang berpenduduk lebih besar dibanding type pertama. Ciri utama perumahan ini adalah adanya Pola perempatan jalan yang mempunyai 2 sumbu utama, sumbu pertama adalah jalan yang membujur arah utara-selatan yang memotong sumbu kedua berupa jalan membujur arah Timur-Barat (Ardi P. Parimin, 1986).

D. Faktor Morfologis

Kegiatan dalam perumahan tradisional dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) peruntukan, yaitu; peruntukan inti, peruntukan terbangun dan peruntukan pinggiran. Untuk jelasnya lihat Gambar 2.8.

Gambar: 2.8
Morfologi Perumahan Tradisional Bali



Sumber : Ardi P. Parimin (1986)

Peruntukan inti pada perumahan yang berpola linear terletak pada sumbu jalan menyatu dengan peruntukan terbangun, atau pada jalan utama yang menuju ke *pura desa*. Pada perumahan yang berpola perempatan (*Catus patha*) peruntukan inti berada pada persimpangan jalan tersebut. Peruntukan inti umumnya bangunan yang memiliki fungsi sosial, seperti; *Jineng* (lumbung desa), *Bale banjar dan Wantilan* (Parimin, 1986: 91)

Peruntukan terbangun adalah merupakan wilayah lama, berupa bangunan perumahan yang dibangun pada awal terbentuknya perumahan tersebut, biasanya berada

disekitar peruntukan inti. Peruntukan pinggiran adalah wilayah yang terletak di luar wilayah terbangun, tetapi masih di bawah kontrol desa adat. Pada beberapa *desa adat* peruntukan pinggiran ini terletak *pura desa* dan *pura dalem*.

2.4 Resume Kajian Pustaka

Pengertian rumah sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, adalah; sebagai tempat berlindung, kemudian tempat tinggal, tempat beristirahat keluarga serta melakukan hubungan sosial sampai akhirnya sebagai identitas penghuninya.

Rumah sebagai kebutuhan dasar; kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal lebih bersifat fisik (konstruksi), sedangkan berdasarkan fungsi yang nyaman lebih pada kesesuaian penghuninya (fisik dan faktor sosial budaya).

Rumah sebagai proses; karena rumah sebenarnya bukan produk selesai, melainkan sebagai suatu proses terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penghuninya.

Perubahan rumah; usaha yang dilakukan penghuni untuk menyesuaikan kebutuhan dengan merubah fisik rumahnya, melalui proses perluasan dan perombakan. Perubahan rumah sangat terkait dengan perubahan budaya, disebabkan pengaruh dari dalam dan dari luar, seperti: kebutuhan hidup termasuk tuntutan religius (agama), ekonomi dan ingkungan.

Perum Perumnas bertugas membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dalam membangun perumahan lebih mengacu pada perumahan standar jadi.

Berdasarkan pada temuan-temuan tersebut diatas, konsep tentang perubahan rumah kaitannya dengan faktor-faktor pengaruh dapat dilihat dalam Tabel II.4 di bawah.

TABEL II.4
KONSEP RUMAH DAN PERUBAHAN RUMAH

No.	Sumber Pernyataan	Konsep Rumah dan Perubahan Rumah	Variabel
1.	Yudhohusodo (1991)	Keterkaitan yang sangat erat antara rumah dan penghuninya, yaitu manusia sebagai insan sosial, insan budaya dan insan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> - Usia - Jenis kelamin - Status perkawinan - Pendidikan - Mata Pencaharian - Pendapatan
2.	Turner (1972)	Rumah memiliki makna sebagai kata benda dan sebagai kata kerja yang menunjukkan proses aktivitas yang terjadi dalam penghunian rumah.	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota keluarga - Pendapatan - Tipe rumah - Alasan perubahan
3.	Pontoh (1994) Morris dan Winter (1978)	Penghuni selalu memberi tanggapan terhadap kekurangan rumahnya, bisa bersifat pasif dengan perubahan pada penghuni, juga aktif dengan perubahan fisik rumah berupa penambahan ruang atau membongkar.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan - Tipe rumah - Alasan perubahan - Perluasan rumah - Perombakan
4.	Pontoh (1994)	Perubahan rumah dapat dilihat dari proses evolusi antara lain dengan perluasan, dan proses perbaikan antara lain dengan perombakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan rumah. - Perombakan rumah.
5.	Budihardjo (1998)	Rumah sebagai penghargaan dan aktualisasi penghuni, merupakan ukuran kesuksesan, sebagai pengembangan pribadi, simbol atau status sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Usia - Pendidikan - Mata pencaharian - Pendapatan - Anggota keluarga
6.	Suryanto (2000)	Penyebab perubahan rumah terkait dengan perubahan budaya, pengaruh dari dalam kebutuhan hidup termasuk aktivitas budaya dan ekonomi, dan dari luar berkaitan dengan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Status perkawinan - Mata pencaharian - Pendapatan - Anggota keluarga - Alasan perubahan - Faktor budaya
7.	Vincent M (1983)	Rumah sebagai identitas pribadi; untuk mengungkapkan identitas pemilik melalui bentuk perumahan adalah sosio-budaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Usia - Status perkawinan - Pendidikan - Mata pencaharian - Alasan perubahan - Faktor budaya
8.	Silas (1991)	Rumah adalah bukan hasil fisik yang sekali jadi, merupakan proses berlanjut terkait dengan mobilitas sosial ekonomi dan kebutuhan budaya penghuninya.	<ul style="list-style-type: none"> - Mata pencaharian - Pendapatan - Anggota keluarga - Alasan Perubahan - Tipe rumah - Faktor budaya

Sumber: Hasil Kajian Literatur (2002)

Rumah tradisional sebagai bagian perwujudan budaya tradisional Bali, menampung aktivitas kebutuhan hidup sehari-hari, juga menampung kegiatan kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat. Memiliki landasan filosofi untuk mencapai tujuan "*Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*" harus terjadi hubungan yang harmonis antara *Bhuana agung* (rumah/wadah) dengan *Bhuana alit* (manusia/isi), melalui unsur-unsur *Tri Hita Karana* dalam susunan yang seimbang sesuai nilai-nilai *Tri Angga* dan konsepsi *Sanga Mandala* yang menjadi pertimbangan dalam tata letak dan kegiatan. Dengan demikian dalam perumahan tradisional akan terkait dengan kebutuhan ruang aktivitas budaya, penerapan tata nilai dan orientasi kosmologis.

Konsepsi-konsepsi perumahan tradisional Bali sesuai dengan konsep *Tri Pramana* (*Desa, Kala, Patra*) yang mewujudkan pola perumahan yang bervariasi di Bali, dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor sebagai berikut:

- Faktor Sosial; yang menyangkut sistem kemasyarakatan yang dikenal *desa/banjar* (adat), dengan kegiatan kemasyarakatan dan agama yang memiliki ciri-ciri, seperti, adanya pengakuan dan atribut *banjar* dengan kelengkapan fasilitas sosialnya.
- Faktor Simbolik; berkenaan dengan arah orientasi kosmologis dalam meletakkan kegiatan sesuai sifatnya
- Faktor Fungsional; konsepsi *Tri Angga* dan *Sanga Mandala* dalam orientasi kosmos berkaitan dengan tata letak ruang, yang melahirkan pola perumahan.
- Faktor Morfologis; kegiatan-kegiatan dalam perumahan tradisional sesuai dengan pengelompokannya.

Konsepsi budaya tradisional Bali dalam rumah tradisional dapat dilihat dalam

Tabel II.5 di bawah.

TABEL II.5
KONSEP RUMAH SEBAGAI KEBUTUHAN BUDAYA TRADISIONAL BALI

No.	Sumber Pernyataan	Konsep Budaya Tradisional Bali	Variabel
1.	Sulistiyawati, (1985)	Rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup sehari-hari juga menampung kegiatan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan upacara agama - Kebutuhan tempat <i>Sanggah/ Pemerajan</i>
2.	Universitas Udayana, (1976)	Peranan rumah tradisional Bali hubungannya dengan spiritual, dalam kehidupan sehari-hari mewadahi aktivitas penghuni dalam melakukan <i>Panca Yadnya</i> sebagai realisasi <i>Panca Sradha</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan upacara agama - Kebutuhan tempat <i>Sanggah/ Pemerajan</i>
3.	Sulistiyawati, (1985)	<i>Tri Angga</i> memberi arahan tata nilai secara vertikal maupun horisontal, pedoman tata nilai untuk mencapai tujuan penyelarasan <i>Bhuana agung</i> dengan <i>Bhuana alit</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan nilai-nilai tradisional
4.	Sulistiyawati, (1985) Budihardjo, (1986) Putra, (1987)	Konsepsi <i>Sanga Mandala</i> menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan dan tata letak bangunan. Kegiatan utama/perlu ketenangan diletakkan pada daerah <i>Utama</i> , kotor/sibuk pada daerah <i>Nista</i> , dan kegiatan diantaranya ditengah. Tata letak bangunan, yaitu; <i>Sanggah/ Pemerajan</i> paling <i>Utama</i> , tempat tidur bagian tengah dan tempat pembuangan paling <i>teben/Nista</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan nilai-nilai tradisional - Kebutuhan tempat <i>Sanggah/Pemerajan</i> - Letak ruang tidur - Letak KM/WC

Sumber: Hasil Kajian Literatur (2002)

BAB III

GAMBARAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

3.1 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karangasem

3.1.1 Kebijakan Umum Pembangunan

Kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem merupakan sub sistem dan bagian integral pembangunan propinsi Bali secara keseluruhan termasuk dalam penataan ruang. Kebudayaan daerah yang berakar kuat pada *desa adat* yang dilandasi falsafah *Tri Hita Karana*, telah mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Disamping itu kebudayaan daerah telah mampu menjaga keserasian hubungan antara manusia dengan hasil karyanya, yang pada akhirnya telah mendukung terciptanya stabilitas. Kebudayaan daerah yang dijiwai agama Hindu diarahkan untuk tetap dibina dan dilestarikan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, derajat dan jati diri serta melandasi segala gerak dan langkah dalam pembangunan daerah.

Kebijakan perumahan yang diarahkan melalui peningkatan penyuluhan dan penyediaan fasilitas, memberikan arah bagi penataan ruang yaitu pembangunan perumahan dapat diserasikan dengan pengembangan tata ruang kawasan permukiman di perkotaan dan pedesaan sesuai dengan nilai-nilai tradisional.

3.1.2 Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Karangasem

Pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Karangasem sampai Pelita IV belum mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah, dimana pembangunan dilakukan dengan swadaya masyarakat. Pemerintah lebih banyak pada mengarahkan pembangunan

dengan mengembangkan prasarana dan sarana. Sampai akhirnya pada tahun 1989 Perum Perumnas melakukan rintisan dengan membangun perumahan dan ini untuk pertama kali dilakukan pembangunan rumah secara massal (*mass housing*).

Dengan keberhasilan pembangunan perumahan oleh Perum Perumnas, diikuti oleh pengembang swasta. Sampai saat ini ada 6 (enam) lokasi perumahan yang dilaksanakan pemerintah dan swasta dengan pembiayaan dari KPR BTN. Perumahan yang ada di Kabupaten Karangasem antara lain:

- Perum Perumnas Padangkerta di Kota Amlapura oleh Perum Perumnas.
- Perumahan Kecicang Indah Permai di Kota Amlapura oleh pengembang swasta.
- Perumahan Taman Asri di Kota Amlapura oleh swasta.
- Perumahan KPR-BTN Nyuh Tebel Permai Indah di Candidasa oleh swasta.
- Perumahan KPR-BTN Padangbay Permai Indah di desa Padangbay oleh swasta.
- Perumahan Wahyu Graha di Kota Amlapura oleh swasta.

3.2. Kota Amlapura

3.2.1 Kondisi Fisik

Kondisi fisik kota Amlapura akan diuraikan orientasi dalam tata nilai ruang tradisional Bali, letak geografis dan administratif, serta pemanfaatan lahan.

A. Orientasi Kota Amlapura Dalam Tata Nilai Ruang Tradisional Bali

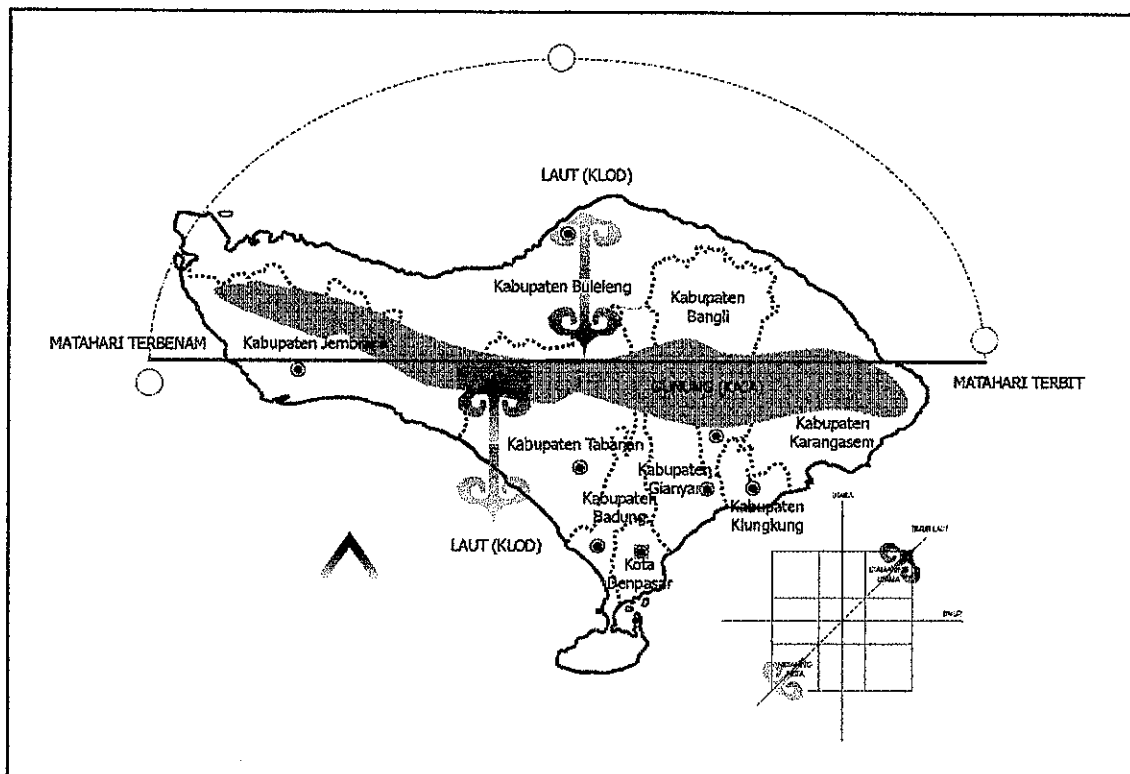
Dalam tata nilai ruang tradisional Bali terdapat dua orientasi tata nilai sebagai arah *Utamaning Utama (kaja-kangin)* yang disebabkan pengaruh sumbu bumi yaitu gunung (*kaja*) sebagai *Utama* berada di tengah-tengah Pulau Bali membujur dari barat ke timur. Pembagian orientasi tata nilai ruang tradisional Bali, yaitu:

- Bali Selatan; orientasi *Utamaning Utama (kaja-kangin)* adalah arah timur laut.

- Bali Utara; orientasi *Utamaning Utama (kaja-kangin)* adalah arah Tenggara.

Kota Amlapura yang terletak di Bali Selatan, orientasi daerah *Utamaning Utama (kaja-kangin)* adalah arah Timur laut. Untuk jelasnya orientasi Kota Amlapura dalam tata nilai tradisional Bali dapat dilihat dalam gambar 3.1.

Gambar: 3.1
Orientasi Kota Amlapura Dalam Tata Nilai Tradisional Bali



Sumber : Analisa (2002)

B. Letak Geografis dan Administratif

Secara Geografis Kota Amlapura terletak diantara $8^{\circ}24'56,8''$ – $8^{\circ}30'32,4''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}46'13''$ – $115^{\circ}54'4,9''$ Bujur Timur, serta 87 Km sebelah Timur Kota Denpasar Ibukota Propinsi Bali. Luas wilayah Kota Amlapura 4.849 Ha, atau 5,78 % dari luas wilayah Kabupaten Karangasem (83.954 Ha).

Kota Amlapura termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangasem meliputi; Kelurahan Padangkerta, Kelurahan Subagan, Kelurahan Karangasem dan Desa Pertama serta wilayah Kecamatan Bebandem meliputi; Desa Bungaya dan Desa Bungaya Kangin.

C. Pemanfaatan Lahan

Kota Amlapura walaupun merupakan kota, penggunaan lahan masih banyak untuk kegiatan agraris. Penggunaan lahan paling banyak untuk lahan sawah (30,63%), permukiman (28,47%) dan perkebunan (24,50%). Proporsi penggunaan lahan Kota Amlapura dapat dilihat dalam Tabel di bawah.

TABEL: III.1.
PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA AMLAPURA TAHUN 2000

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Lahan Sawah	1.485,25	30,63
2	Permukiman dan lainnya	1.380,51	28,47
3	Pemerintahan dan Pelayanan Umum	382,10	7,88
4	Perdagangan dan Jasa	390,82	8,06
5	Perkebunan	1.188,01	24,50
6	Kuburan	22,50	0,46
Jumlah		4.849,00	100,00

Sumber: Kecamatan Karangasem dan Bebandem Dalam Angka 2000 dan analisa (2002).

3.2.2 Kependudukan

Kependudukan antara lain menguraikan tentang jumlah dan kepadatan penduduk, mata pencaharian serta agama yang dianut penduduk kota Amlapura.

A. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk

Perkembangan penduduk Kota Amlapura selama lima tahun terakhir memperlihatkan pertumbuhan yang relatif kecil, dengan rata-rata pertumbuhan 2,08%. Dengan kepadatan penduduk kotor (bruto) dihitung dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah Kota Amlapura mencapai 10 jiwa/Ha. Perkembangan penduduk dan

kepadatan penduduk Kota Amlapura dari tahun 1996 – 2000, dapat dilihat dalam Tabel III.2 di bawah.

TABEL III.2.
PENDUDUK, PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK
KOTA AMLAPURA TAHUN 1996 –2000

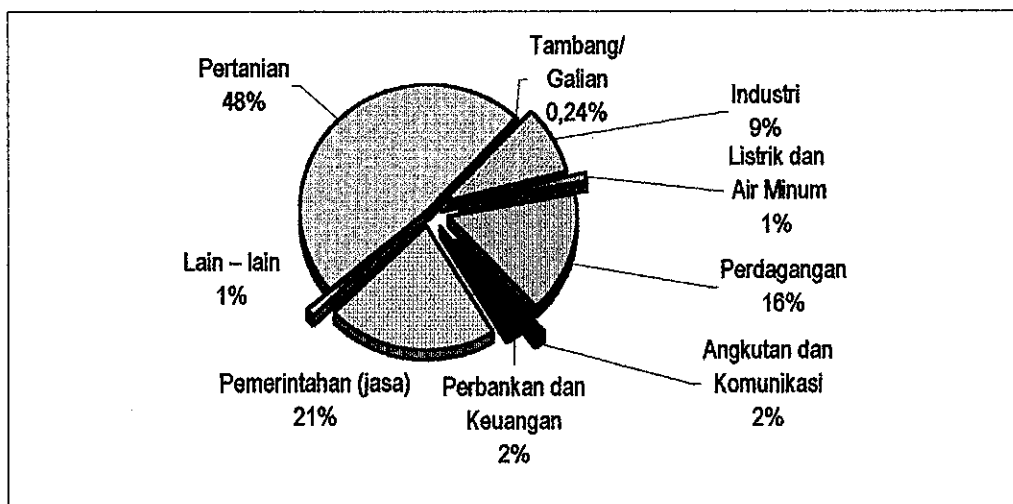
Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (jiwa/Ha)
	Laki-laki	Perempuan			
2000	23.075	23.524	46.599	0,06	10
1999	23.215	23.355	46.570	1,03	10
1998	22.991	23.103	46.094	0,75	10
1997	22.679	23.074	45.753	6,96	9
1996	21.489	21.285	42.774		9
Pertumbuhan rata-rata (%)				2,20	

Sumber; Kecamatan Karangasem dan Bebandem Dalam Angka Tahun 2000 dan analisa, (2002).

B. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kota Amlapura sesuai angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia, kebanyakan penduduk masih tergantung pada pertanian yaitu sebesar 47,98%, kemudian Pemerintahan (jasa) 21,35% dan Perdagangan menempati urutan ketiga dengan 15,79%. Komposisi mata pencaharian penduduk kota Amlapura dapat dilihat dalam Gambar 3.2 di bawah.

Gambar 3.2
Mata Pencaharian Penduduk Kota Amlapura Tahun 2000

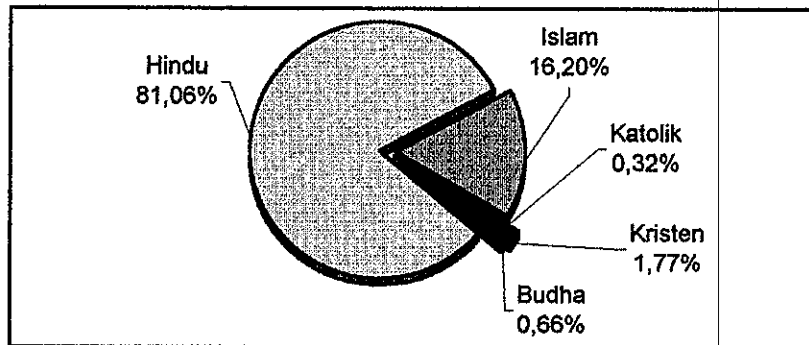


Sumber; Kecamatan Karangasem dan Bebandem Dalam Angka Tahun 2000 dan analisa, (2002).

C. Agama

Penduduk Kota Amlapura paling banyak menganut agama Hindu (85,33%) dan yang lain antara lain menganut; agama Islam, Kristen, Katolik dan Budha. Penduduk sesuai agama yang dianut dapat dilihat dalam Gambar 3.3. di bawah :

Gambar 3.3
Penduduk Kota Amlapura Dirinci Menurut Agama Tahun 2000



Sumber: Analisa (2002)

3.2.3 Lembaga Pemerintahan dan Adat

Di Kota Amlapura seperti halnya di Bali konsep desa memiliki dua pengertian, yaitu *desa adat* dan *desa dinas*. *Desa adat* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu yang secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. *Desa dinas* adalah satu kesatuan wilayah administratif di bawah kecamatan. Jumlah desa dinas dan adat di Kota Amlapura dapat dilihat dalam Tabel III.3. di bawah.

TABEL III.3
LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN ADAT KOTA AMLAPURA TAHUN 2000

Lembaga Pemerintahan Dan Adat	Desa	Banjar
Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Kelurahan • 3 Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • 72 Banjar/ dusun
Adat	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Desa adat 	<ul style="list-style-type: none"> • 80 Banjar

Sumber: Kecamatan Karangasen dan Bebandem Dalam Angka Tahun 2000

3.3 Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura

3.3.1 Gambaran Umum

Sejak berdirinya Perum Perumnas tahun 1974 pengadaan perumahan dilaksanakan dengan pembiayaan melalui kredit pemilikan rumah BTN (KPR BTN), sedangkan tugas utama daripada perusahaan milik negara ini adalah menghadirkan perumahan rakyat yang lengkap dengan prasarana dan sarana. Dengan kebutuhan perumahan yang besar dan mendesak mengakibatkan pola pengadaan perumahan memakai cara-cara yang dapat dilakukan secara murah, cepat dan menghasilkan jumlah yang banyak.

Kota Amlapura sebagai ibukota Kabupaten Karangasem pada tahun 1989 mendapat pembangunan perumahan oleh Perum Perumnas wilayah VI cabang Bali, diatas lahan seluas 7,68 Ha, terletak di kelurahan Padangkerta, lokasinya 3 Km dari pusat kota. Pembangunan perumahan diatas lahan tidak produktif berupa tegalan bekas lahar, meliputi tipe Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana (RSS 21, RS D21 dan RS D36) dilengkapi dengan persediaan lahan untuk fasilitas umum. Gambaran lingkungan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dapat dilihat dalam Gambar 3.4 dan Tabel III.4 di bawah.

TABEL III.4
PEMBANGUNAN RUMAH DAN FASILITAS UMUM PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA TAHUN 1994

Pembangunan Rumah			Lahan Untuk Fasilitas Umum
Tipe	Jumlah	Prosentase	
• RSS 21	412 unit	67,43 %	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat ibadah (Pura, Mesjid dan Gereja) • Taman kanak-kanak • SD • Lapangan olah raga • Puskesmas • Balai RT • 5 unit Tempat bermain
• RS D21	170 unit	27,82 %	
• RS D36	29 unit	4,75 %	
Total Rumah	611 unit	100,00 %	

Sumber: Perum Perumnas Wilayah VI Cabang Propinsi Bali



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMILAPURA

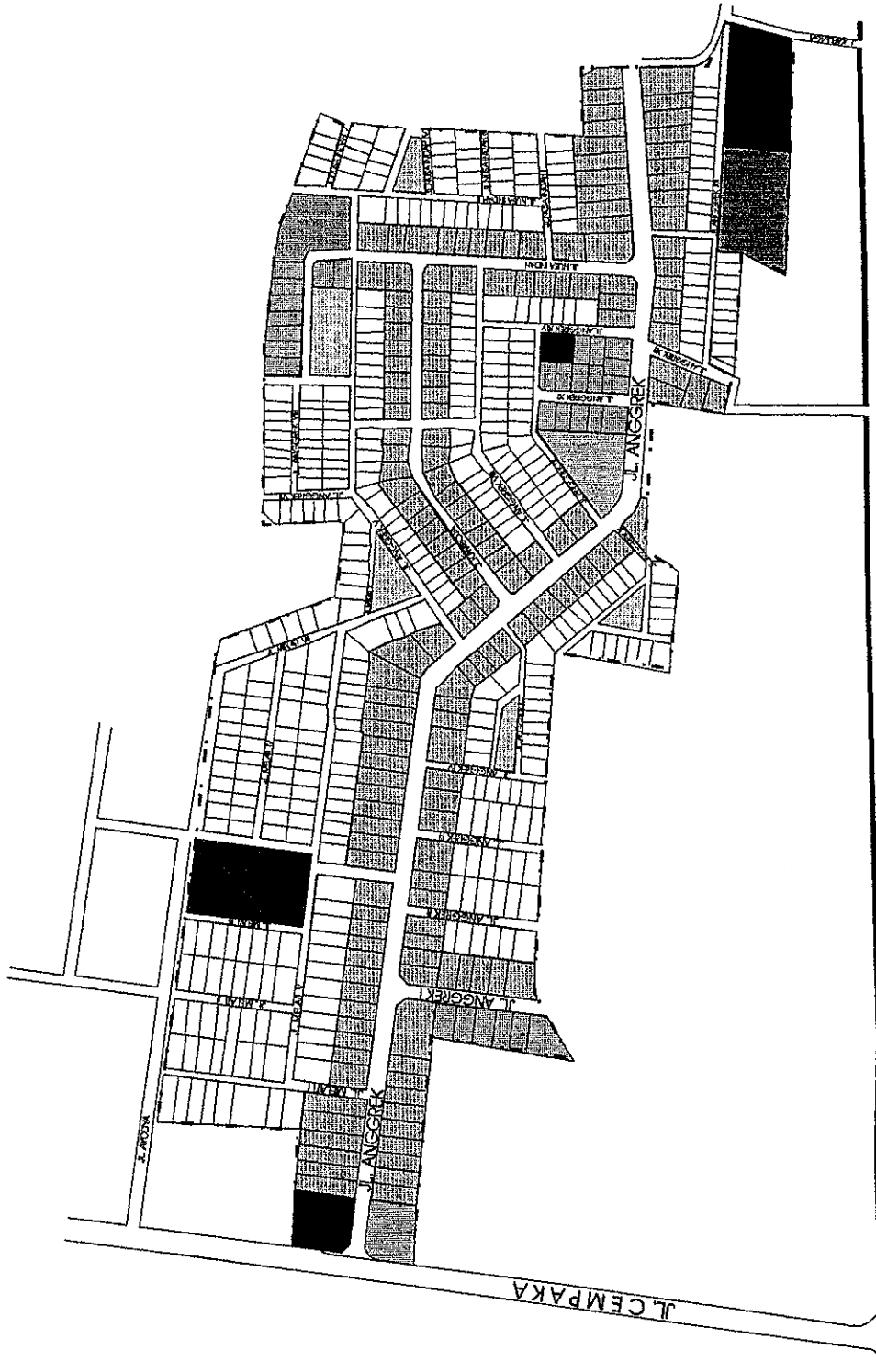
PETA : PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
KOTA AMILAPURA TAHUN 1994

LEGENDA :

- [Pattern] = RUMAH TYPE RS D 36
- [Pattern] = RUMAH TYPE RS D 21
- [Pattern] = RUMAH TYPE RSS 21
- [Pattern] = SD
- [Pattern] = TK
- [Pattern] = PURA
- [Pattern] = MESJID
- [Pattern] = GEREJA
- [Pattern] = LAPANGAN OLAH RAGA
- [Pattern] = TEMPAT BERMAIN
- [Pattern] = BALAI RT
- [Pattern] = PUSKESMAS
- [Pattern] = KANTOR UNIT
- [Pattern] = BALAI RT

NO.GBR	SKALA
3.4	0 25 50 75 100M
NO.HAL	
74	

SUMBER : PERUM PERUMNAS WILAYAH VI
CABANG BALI



JL. SURAPATI

Keberhasilan pembangunan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura karena mampu merubah lahan tidak produktif, serta memberi dampak bagi pembangunan perumahan, yang diikuti pembangunan beberapa perumahan oleh pengembang swasta (developer). Di lingkungan Perum Perumnas saat ini telah terjadi pembauran antar penghuni yang terbentuk menjadi 8 (delapan) komunitas (lingkungan/*banjar*) dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu (77,5 %).

3.3.2 Karakteristik Penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura

A. Usia Kepala Keluarga

Kepala Keluarga penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura memiliki usia antara 26 tahun sampai 55 tahun, dimana sebagian besar (76,1%) berusia antara 36 – 45 tahun dan sebagian kecil (8,5%) berusia antara 46 – 55 tahun. Lebih jelas usia Kepala Keluarga penghuni dapat dilihat dalam tabel di bawah.

TABEL III.5
USIA KEPALA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

Usia Kepala Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
• 26 – 35 tahun	11	15,5
• 36 – 45 tahun	54	76,1
• 46 – 55 tahun	6	8,5
• > 55 tahun	0	0,0
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

B. Jenis Kelamin dan Status Perkawinan

Konsep *Mekurenan* (orang berumah tangga) di Bali mengenal *Purusha* (sifat laki) dan *Pradana* (sifat perempuan). Ini memungkinkan perempuan menjadi *Purusha* (sebagai Kepala Keluarga) apabila tidak keluar dari rumah asal. Dari 71 KK (*Purusha*) penghuni

Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura yang dijadikan responden 93,0% laki-laki dan 7,0% perempuan. Sedangkan dari status perkawinan 98,6% dalam status kawin.

C. Pendidikan Kepala Keluarga

Kepala Keluarga penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura paling rendah berpendidikan SLTP dan paling tinggi Sarjana (S1) disamping ada yang berpendidikan Diploma. Komposisi pendidikan Kepala Keluarga penghuni dapat dilihat dalam tabel di bawah.

TABEL III.6
PENDIDIKAN KEPALA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
• SMP	3	4,2
• SMA	38	53,5
• Sarjana	28	39,4
• Lainnya (Diploma)	2	2,8
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

D. Mata Pencaharian

Kepala Keluarga penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura memiliki mata pencaharian, antara lain: PNS/ABRI, pegawai swasta, pengusaha/wiraswasta serta lainnya (pegawai THL), dimana sebagian besar (67,6%) sebagai PNS/ABRI. Untuk jelasnya mata pencaharian Kepala Keluarga penghuni dapat dilihat dalam Tabel.III.7. di bawah.

TABEL III.7.
MATA PENCAHARIAN KEPALA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

Mata Pencaharian	Frekuensi	Persentase (%)
• PNS/ABRI	48	67,6
• Swasta	14	19,7
• Pengusaha/Wiraswasta	5	7,0
• Lainnya (THL)	4	5,6
Total	71	100,0

Sumber: Analisa (2002)

E. Pendapatan Kepala Keluarga

Pendapatan Kepala Keluarga penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura sangat bervariasi, mulai yang kurang dari 500 ribu rupiah sampai dengan di atas 1.250 ribu rupiah. Pendapatan rata-rata terbesar antara 1 juta rupiah sampai dengan 1.250 ribu rupiah. Selengkapnya pendapatan Kepala Keluarga penghuni dapat dilihat dalam Tabel III.8. di bawah.

TABEL III.8.
PENDAPATAN KEPALA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

Pendapatan (ribu rupiah)	Frekuensi	Persentase (%)
Kurang dari 500	4	5,6
500 – 750	7	9,9
750 – 1.000	11	15,5
1.000 – 1.250	31	43,7
> 1.250	18	25,4
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

F. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura berkisar antara 2 jiwa sampai dengan 6 jiwa, dimana paling banyak (59,2%) memiliki anggota keluarga 4 jiwa. Jumlah anggota keluarga dapat dilihat dalam Tabel III.9 di bawah.

TABEL III.9
ANGGOTA KELUARGA PENGHUNI PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
• 2 jiwa	2	2,8
• 3 jiwa	2	2,8
• 4 jiwa	42	59,2
• 5 jiwa	22	31,0
• 6 jiwa	3	4,2
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

3.3.3 Faktor Budaya Tradisional Bali Dalam Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura

A. Pelaksanaan Upacara dan Jenis Upacara Agama di Rumah

Penghuni Perumahan Perum Perumnas yang beragama Hindu umumnya melaksanakan upacara agama di rumah dengan berbagai jenis upacara (*Panca Yadnya*). Namun sebagai pendatang dengan rumah yang dimiliki sekarang ada kalanya penghuni juga melakukan upacara agama di rumah asal atau pada kedua rumahnya. Sebagian besar (77,5%) penghuni melaksanakan upacara agama di rumah sekarang juga rumah asal, jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

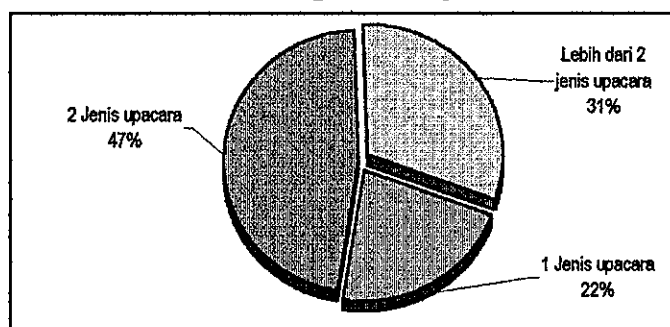
TABEL III.10.
PELAKSANAAN UPACARA AGAMA DI RUMAH

Pelaksanaan Upacara Agama di Rumah	Erekuensi	Persentase (%)
• Di Rumah Sekarang (Perum Perumnas)	9	12,7
• Rumah Sekarang dan Asal	55	77,5
• Tidak Melaksanakan/ Kembali ke Rumah Asal	7	9,9
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

Jenis upacara agama yang dilaksanakan sangat bervariasi, mulai yang hanya melaksanakan 1 jenis sampai lebih dari 2 jenis upacara, dimana sebagian besar (42,3%) melaksanakan 2 jenis upacara. Jenis upacara agama yang paling sering dilakukan yaitu: *Manusa Yadnya*, *Dewa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya* (lihat lampiran) dan pelaksanaan jenis upacara agama oleh penghuni dapat dilihat dalam Gambar 3.5 di bawah.

Gambar 3.5
Pelaksanaan Jenis Upacara Agama di Rumah



Sumber: Analisa (2002)

B. Tempat *Sanggah/Pemerajan* Dalam Petak Rumah

Untuk dapat melaksanakan kegiatan upacara agama Hindu di rumah akan memerlukan *Sanggah/Pemerajan* (tempat sembahyang). Penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura sebagian besar (77,5%) menganggap perlu disediakan tempat kosong untuk mendirikan *Sanggah/Pemerajan*. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

TABEL III.11
KEBUTUHAN TEMPAT *SANGGAH/PEMERAJAN* DALAM PETAK RUMAH

Tempat <i>Sanggah</i> Dalam Petak Rumah	Frekuensi	Persentase (%)
• Perlu	55	77,5
• Ragu-ragu	9	12,7
• Tidak Perlu	7	9,9
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

C. Kegiatan Upacara dan Jenis Upacara Agama di Perumahan

Selain upacara agama di rumah penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura juga melaksanakan kegiatan upacara agama di *Pura Banjar* (*Pura* di lingkungan perumahan). Namun juga ada kemungkinan dilakukan di *Pura Banjar* asal penghuni atau kedua-duanya. Penghuni yang melakukan kegiatan agama di *Pura Banjar* sekarang dan asal paling banyak (59,2%), untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

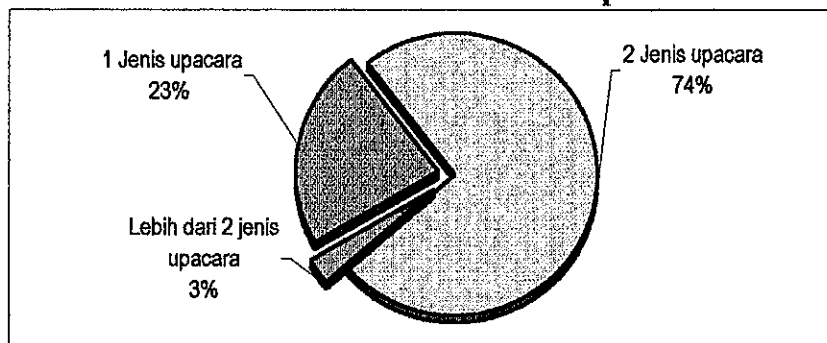
TABEL III.12
PELAKSANAAN UPACARA AGAMA DI *PURA BANJAR*

Pelaksanaan Upacara Agama di <i>Pura Banjar</i>	Frekuensi	Persentase (%)
• <i>Pura Banjar</i> sekarang	24	33,8
• <i>Pura Banjar</i> sekarang dan asal	42	59,2
• Tidak melaksanakan	5	7,0
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

Sedangkan jenis upacara yang dilakukan juga bervariasi antara lain; *Dewa Yadnya*, *Rsi Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*. Dengan melaksanakan upacara, mulai dari 1 jenis sampai lebih dari 2 jenis upacara (data terlampir). Penghuni yang melaksanakan 2 jenis upacara mencapai 69,0% dan 1 jenis upacara 21,1%. Pelaksanaan jenis upacara di *Pura Banjar* oleh penghuni dapat dilihat dalam Gambar 3.6 di bawah.

Gambar 3.6
Pelaksanaan Jenis Upacara Agama Di *Pura Banjar*
Perum Perumnas Kota Amlapura



Sumber: Analisa (2002)

D. Tempat *Pura Banjar* Dalam Perumahan

Untuk kegiatan upacara umat Hindu di lingkungan perumahan diperlukan *Pura Banjar*. Dengan disediakan 1 tempat *Pura* dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura, sebagian besar (56,3%) penghuni mengatakan tidak cukup, (35,2%) mengatakan cukup dan sisanya ragu-ragu. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel.III.13 di bawah.

TABEL III.13
KEBUTUHAN TEMPAT *PURA* DALAM PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

Tempat <i>Pura</i>	Frekuensi	Persentase (%)
• Cukup	25	35,2
• Ragu-ragu	6	8,5
• Tidak cukup	40	56,3
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

Selain kegiatan upacara agama di *Pura Banjar* penghuni juga ada yang melaksanakan kegiatan agama, seperti *Bale Banjar* (56,3%), *Pempatan* (28,2%) dan tempat lainnya (15,5%). Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

TABEL III.14
PELAKSANAAN UPACARA AGAMA SELAIN DI *PURA BANJAR*

Upacara Agama Selain di <i>Pura Banjar</i>	Frekuensi	Persentase (%)
• <i>Bale Banjar</i>	40	56,3
• <i>Pempatan/Perempatan</i> jalan	20	28,2
• Lainnya	11	15,5
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

E. Lembaga Kemasyarakatan

Sebagai persyaratan untuk kemudahan administrasi pemerintahan, dalam lingkungan Perumahan Perum Perumnas dibentuk RT/Banjar Dinas. Namun setelah terjadi pembauran antar penghuni, sebagai kebutuhan adat seperti pada umumnya di Bali, juga terbentuk lembaga kemasyarakatan tradisional atau *Banjar Adat*. Persepsi penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura, sebagian besar (71,8%) menganggap cukup dibentuk Banjar Dinas, disamping juga ada yang menginginkan Banjar Dinas dan *Banjar Adat*. Lembaga kemasyarakatan dalam perumahan dapat dilihat dalam Tabel III.15 di bawah.

TABEL III.15.
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PERUMAHAN PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

Lembaga Kemasyarakatan	Frekuensi	Persentase (%)
• Banjar Dinas	51	71,8
• <i>Banjar Adat</i>	7	9,9
• Banjar Dinas dan <i>Banjar Adat</i>	13	18,3
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

F. Kegiatan Kemasyarakatan

Kegiatan kemasyarakatan penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura sebagian besar (49,3%) melaksanakan kegiatan kemasyarakatan Banjar Dinas sekaligus *Banjar Adat* dan sebagian (40,8%) hanya menginginkan Banjar Dinas. Persepsi penghuni terhadap kegiatan kemasyarakatan dalam perumahan dapat dilihat dalam tabel di bawah.

TABEL III.16
KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

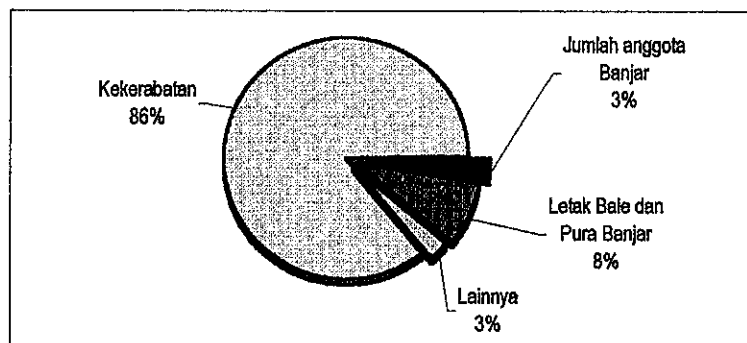
Kegiatan Kemasyarakatan	Frekuensi	Persentase (%)
• Banjar Dinas	29	40,8
• <i>Banjar Adat</i>	7	9,9
• Banjar Dinas dan <i>Banjar Adat</i>	35	49,3
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

G. Alasan Ikut Banjar

Dalam memilih ikut Banjar Dinas maupun *adat*, penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura sebagian besar (85,9%) menganggap kekerabatan sebagai alasan ikut Banjar, disamping juga ada karena letak *Bale Banjar* dan *Pura Banjar* (8,5%). Alasan penghuni dalam memilih ikut Banjar dapat dilihat dalam Gambar.3.7. di bawah.

Gambar 3.7
Alasan Ikut Banjar Dalam Perumahan Perum Perumnas
Di Kota Amlapura



Sumber: Analisa, (2002)

H. Tempat *Bale Banjar* Dalam Perumahan

Untuk kegiatan kemasyarakatan, penghuni perumahan memerlukan Balai pertemuan atau *Bale Banjar*. Dengan disediakan 1 tempat Balai RT (tempat pertemuan) dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura sebagian besar (56,3%) penghuni mengatakan tidak cukup dan sebagian (36,6%) mengatakan cukup, disamping juga ada yang ragu-ragu. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah.

TABEL III.17
KEBUTUHAN TEMPAT BALAI RT (TEMPAT PERTEMUAN) DALAM PERUMAHAN PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

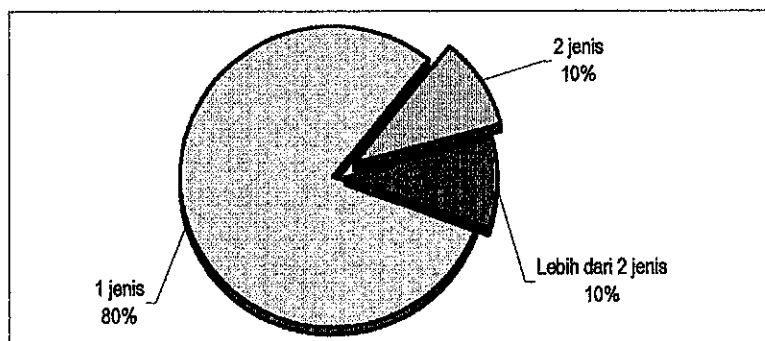
Tempat Balai RT (Tempat Pertemuan)	Frekuensi	Persentase (%)
• Cukup	26	36,6
• Ragu-ragu	5	7,0
• Tidak cukup	40	56,3
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

I. Konsepsi dan Nilai-nilai Perumahan Tradisional Bali

Pengetahuan dan pengertian penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura terhadap konsepsi dan nilai-nilai tradisional Bali. Sebagian besar (80,3%) penghuni mengenal 1 jenis khususnya *Tri Hita Karana* (lihat lampiran). Penghuni yang mengerti konsepsi dan nilai-nilai perumahan tradisional Bali dapat dilihat dalam gambar.

Gambar: 3.8
Pengetahuan Terhadap Konsepsi dan Nilai-Nilai Perumahan Tradisional Bali



Sumber: Analisa (2002)

J. Penerapan Nilai-nilai Perumahan Tradisional Bali

Penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura menganggap perlu penerapan nilai-nilai tradisional Bali dalam rumah maupun perumahan. Sebagian besar (73,2%) penghuni menyatakan perlu penerapan nilai-nilai tradisional dalam rumah, juga dalam perumahan mencapai 71,8%. Persepsi penghuni terhadap penerapan nilai-nilai perumahan tradisional Bali dapat dilihat dalam tabel.

TABEL III.18.
PENERAPAN NILAI-NILAI TRADISIONAL BALI
DALAM RUMAH DAN PERUMAHAN

Penerapan Nilai-Nilai Tradisional Bali	Rumah		Perumahan	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
• Perlu	52	73,2	51	71,8
• Ragu-ragu	11	15,5	11	15,5
• Tidak perlu	8	11,3	9	12,7
Total	71	100,0	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

K. Letak Ruang Tidur dan KM/WC

Penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura, menganggap letak ruang dalam rumah harus sesuai dengan tata nilai ruang tradisional, yaitu; ruang tidur pada daerah *Utama* sedangkan KM/WC pada daerah *Nistha*. Sebagian besar (73,2%) penghuni menganggap ruang tidur harus pada daerah *Utama*, juga sebagian besar (70,4%) penghuni menginginkan KM/WC pada daerah *Nistha*. Persepsi kesesuaian tata letak ruang tidur dan KM/WC dapat dilihat dalam tabel di bawah.

TABEL III.19
KESESUAIAN TATA LETAK RUANG TIDUR DAN KM/WC

Tata Letak	Ruang Tidur		KM/WC	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
• <i>Utama</i> (R. Tidur)	52	73,2	7	9,9
• Bebas	14	19,7	14	19,7
• <i>Nistha</i> (KM/WC)	5	7,0	50	70,4
Total	71	100,0	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

L. Letak *Pura Banjar* dan *Bale Banjar*

Dalam tata ruang perumahan tradisional Bali letak *Pura Banjar* dan *Bale Banjar* adalah pada daerah *Kaja-kangin/Utama*. Sebagian besar (71,8%) penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura menganggap tata letak *Pura Banjar* dan *Bale Banjar* harus sesuai dengan tata nilai ruang tradisional, serta sebagian (28,2%) yang menganggap bebas. Persepsi penghuni terhadap tata letak *Pura Banjar* dan *Bale Banjar* dapat dilihat dalam tabel.

TABEL III.20.
KESESUAIAN TATA LETAK PURA BANJAR DAN BALE BANJAR

Tata Letak	<i>Pura Banjar</i>		<i>Bale Banjar</i>	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
• <i>Utama</i>	51	71,8	51	71,8
• Bebas	20	28,2	20	28,2
Total	71	100,0	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

3.3.4 Perubahan Rumah dan Fasilitas Umum Dalam Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura

A. Perubahan Rumah dan Jenis Perubahan Rumah

Penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura yang telah melakukan perubahan rumah mencapai 91,6% sedangkan sisanya belum melakukan perubahan atau sebatas pemeliharaan. Penghuni yang melakukan perubahan rumah dengan perluasan sebesar 63,4% dan perombakan total sebesar 28,2%. Perubahan rumah pada masing-masing tipe rumah dan jenis perubahan yang dilakukan dapat dilihat dalam Tabel III.21 di bawah.

TABEL III.21
PERUBAHAN DAN JENIS PERUBAHAN PADA BERBAGAI TIPE RUMAH

Tipe Rumah	Perubahan Fisik rumah					
	Melakukan Perubahan				Tidak Melakukan Perubahan	
	Perluasan		Perombakan			
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
• Tipe RSS 21	30	42,3	12	16,9	3	4,2
• Tipe RS D21	14	19,7	6	8,5	3	4,2
• Tipe RS D36	1	1,4	2	2,8	-	-
Total	45	63,4	20	28,2	6	8,4%
	65 (91,6%)					

Sumber: Analisa, (2002)

B. Alasan Perubahan Rumah

Penghuni Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura yang melakukan perubahan pada rumahnya memiliki alasan yang bervariasi, seperti; berkaitan dengan kebutuhan ruang untuk anggota keluarga, tuntutan aktivitas agama dan nilai-nilai tradisional Bali serta sosial ekonomi dan budaya. Sebagian besar (52,1%) penghuni memiliki alasan merubah rumah karena tuntutan agama dan nilai-nilai tradisional Bali. Alasan penghuni merubah rumah dapat dilihat dalam Tabel III.22 di bawah.

TABEL III.22.
ALASAN PENGHUNI MERUBAH RUMAH

Alasan	Frekuensi	Persentase (%)
• Kebutuhan ruang untuk anggota keluarga	11	15,5
• Agama dan nilai-nilai tradisional Bali	37	52,1
• Sosial ekonomi dan budaya	17	23,9
• Tidak Melakukan Perubahan Rumah	6	8,4
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

C. Perubahan Fasilitas Umum

Data dari observasi lapangan menunjukkan telah terjadi perubahan pada lahan-lahan yang diperuntukkan fasilitas umum, antara lain: tempat bermain, tempat Taman Kanak-kanak, tempat *Pura*, lapangan olah raga dan Balai RT berubah fungsi menjadi

Balai Pertemuan (*Bale Banjar* yang dilengkapi *Pura Banjar*). Perubahan fasilitas umum dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura dapat dilihat dalam Tabel III. 23 dan lokasi perubahan dapat dilihat dalam Gambar 3.9.

TABEL III.23.
PERUBAHAN FASILITAS UMUM PERUMAHAN PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

No	Jenis Fasilitas Umum	Eksisting Th. 1994	Eksisting Th. 2002	
			Juml.	Keterangan Perubahan
1	Pura	1 kav.	8 unit	<i>Bale dan Pura Banjar</i>
2	Masjid	1 kav.	1 unit	Mushola
3	Gereja	1 kav.	1 kav.	Belum dibangun
4	Puskesmas	1 kav.	1 kav.	Belum dibangun
4	TK	1 kav	-	<i>Bale dan Pura Banjar</i>
5	SD	1 kav.	1 kav.	Belum dibangun
6	Lapangan olah raga	1 kav.	1 kav.	Sebagian menjadi <i>Bale dan Pura Banjar</i>
7	Tempat bermain	5 kav.	1 kav.	4 lokasi untuk <i>Bale dan Pura Banjar</i>
8	Balai RT	1 kav.	-	<i>Bale dan Pura Banjar</i>

Sumber: Survei, (2002)

D. Alasan Perubahan Fasilitas Umum

Penyebab perubahan fasilitas umum dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura, antara lain: sebagian besar (53,5%) karena alasan kebutuhan adat, (7,0%) karena tidak dibangun dan selebihnya karena alasan lain atau tidak sesuai kebutuhan. Persepsi penghuni tentang alasan perubahan fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel III.24.
Alasan Perubahan Fasilitas Umum Dalam Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura

Alasan	Frekuensi	Persentase (%)
• Kebutuhan adat	38	53,5
• Tidak sesuai kebutuhan	1	1,4
• Tidak dibangun	5	7,0
• Lainnya	2	2,8
• Tidak ada perubahan	25	35,2
Total	71	64,8

Sumber: Analisa, (2002)
















PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

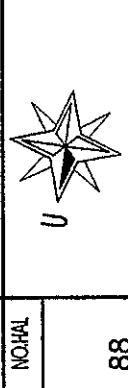
PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMINAS
DI KOTA AMILAPURA

PETA : PERUMAHAN PERUM PERUMINAS
KOTA AMILAPURA TAHUN 2002

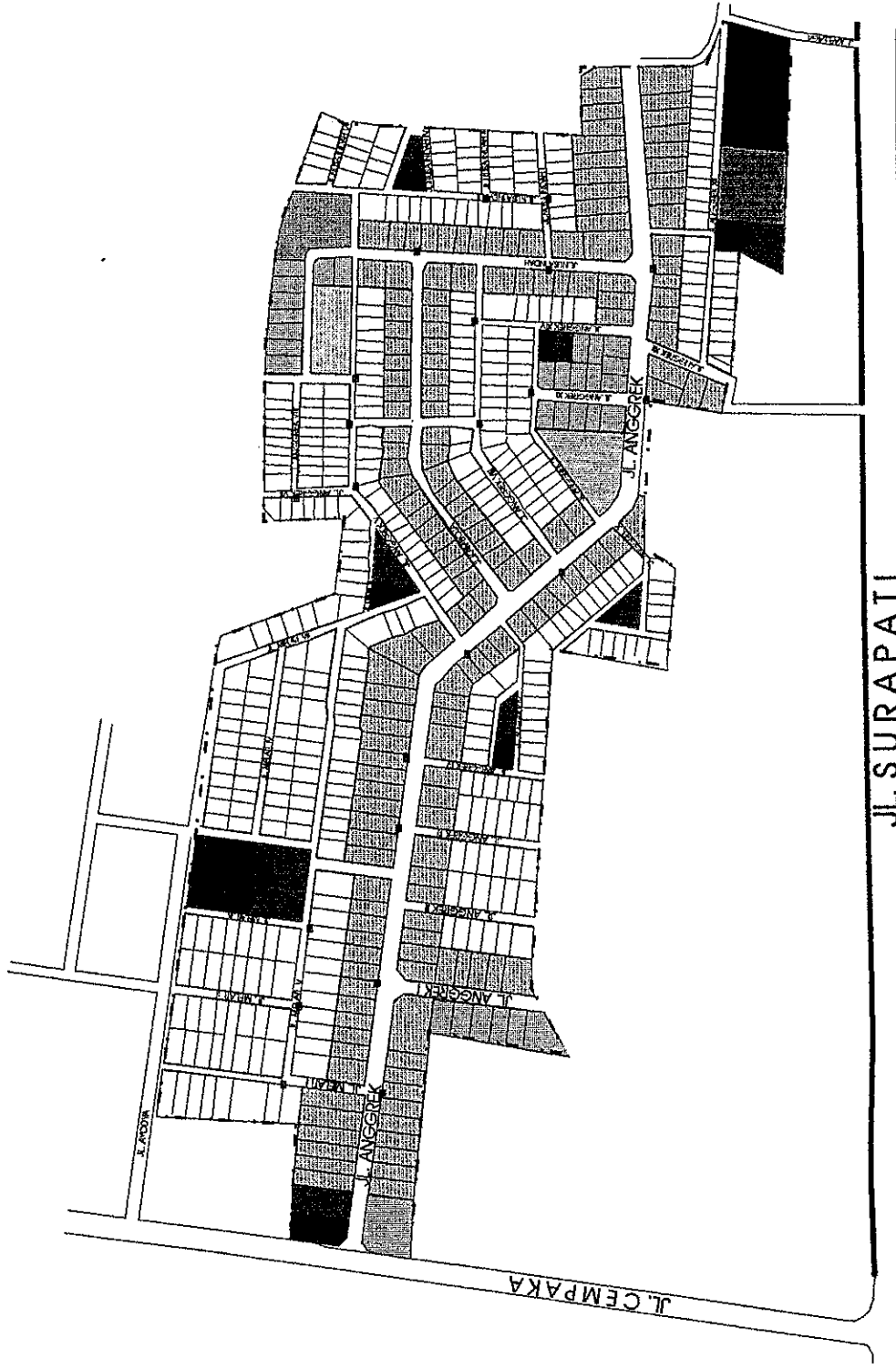
LEGENDA :

-  = EKS. RUMAH TYPE RS D 36
-  = EKS. RUMAH TYPE RS D 21
-  = EKS. RUMAH TYPE RSS 21
-  = RENCANA SD
-  = PURA BANJAR
-  = MUSHOLA
-  = RENCANA GEREJA
-  = LAPANGAN OLAH RAGA
-  = TEMPAT BERMAIN
-  = BALE BANJAR
-  = RENCANA PUSKESMAS
-  = KANTOR UNIT
-  = SANGGAH PENUNMBAK RURUNG

NO.GBR	SKALA
3.9	0 25 50 75 100M



NO.HAL	SUMBER : SURVEI (2002)
88	



E. Perubahan Fasilitas Umum Menjadi *Pura Banjar* dan *Bale Banjar*

Perubahan fasilitas umum dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura menjadi *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*. Sebagian besar (67,6%) penghuni menyatakan setuju, sebesar (22,5%) menyatakan ragu-ragu dan (9,9%) tidak setuju. Persepsi penghuni terhadap perubahan fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah.

TABEL III.25
FASILITAS UMUM YANG BERUBAH MENJADI
BALE BANJAR DAN PURA BANJAR

Pendapat	Frekuensi	Persentase (%)
• Setuju	48	67,6
• Ragu-ragu	16	22,5
• Tidak setuju	7	9,9
Total	71	100,0

Sumber: Analisa, (2002)

BAB IV

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS

4.1 Analisis Perubahan Perumahan Perum Perumnas

4.1.1 Perubahan Rumah

Perubahan rumah dilihat dari proses perubahan dan perbaikan rumah bisa melalui perluasan/penambahan keluar dan perombakan rumah. Perluasan rumah menurut Parwoto dalam Pontoh (1994: 27), adalah perluasan keluar/ekspansi, bukan perbanyakkan dengan menyekat ruangan (subdivisi) atau modifikasi. Sedangkan Naispospos dalam Pontoh (1994: 27), menyebutkan perombakan rumah adalah perubahan struktur fisik secara total, bukan hanya penggantian bahan tanpa mengubah jenis dan jumlah ruang.

Rumah tipe RSS 21, RS D21 dan RS D36 yang dimiliki penghuni perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura yang merupakan standar Perumnas, setelah dihuni banyak mengalami perubahan untuk memenuhi kebutuhan penghuninya (*housing adjustment*), ini disebabkan karena pengaruh dari dalam maupun luar. Data suvei lapangan (2002), menunjukkan kondisi rumah banyak mengalami perubahan, sudah tidak bisa dibedakan lagi menurut tipenya. Dari 71 responden yang diteliti 91,6% diantaranya telah merubah rumahnya, sedangkan sisanya belum melakukan perubahan.

Penghuni yang melakukan perubahan (63,4%) dengan perluasan dan (28,2%) melalui perombakan. Bila dikaitkan dengan pengertian rumah, bahwa pada awalnya rumah merupakan tempat berlindung dari bahaya gangguan fisik, kemudian rumah sebagai tempat tinggal dan beristirahat keluarga serta melakukan hubungan sosial, sampai menjadi identitas penghuninya. Pengertian rumah akan selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan yang dihadapi penghuninya. Sementara itu, ketentuan pembangunan

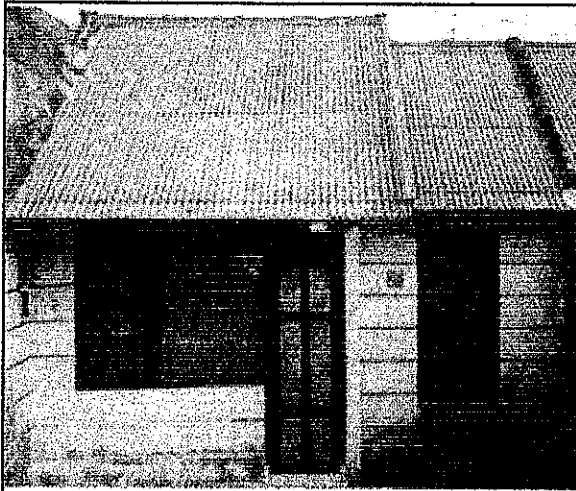
rumah sederhana Perum Perumnas dengan KPR BTN, memungkinkan penghuni dapat bertempat tinggal untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan layak. Melihat latar belakang penghuni sebagian besar (77,5%) orang Bali yang beragama Hindu, yang memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap rumah tradisional tidak semata menyangkut aspek fisik tapi juga non fisik sesuai budaya tradisional. Rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat. Memiliki landasan filosofi, konsepsi dan nilai-nilai agar terjadi hubungan yang harmonis antara rumah sebagai wadah dengan penghuni sebagai pelaku aktivitas.

Dengan melihat fenomena perubahan rumah yang ada, ini berkaitan dengan pengertian rumah sesuai dengan kebutuhan rumahnya. Perubahan rumah dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura diakibatkan kebutuhan rumah, antara lain:

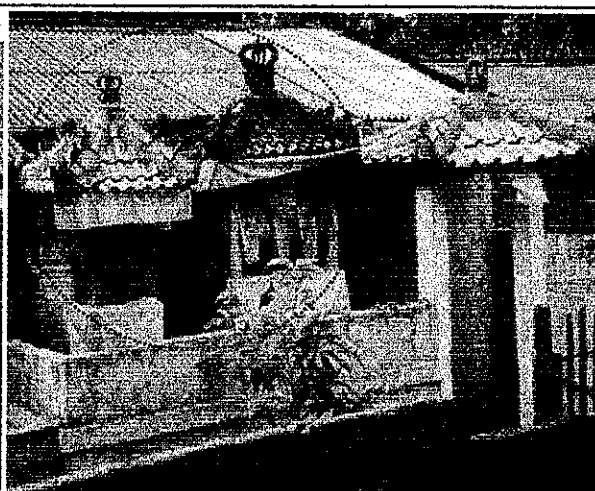
4.1.1.1 Perubahan Akibat Kebutuhan Ruang Kegiatan Keagamaan

Menurut Nurdin dalam Suryanto (2000 :II-25), penyebab perubahan rumah sangat terkait dengan budaya. Tuntutan religius (agama) akan menuntut ruang aktivitas (aktivitas budaya) yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan rumah, yang merupakan pengaruh dari dalam (*endogen*). Penghuni melakukan perubahan rumah dengan perluasan sebesar 63,4% dan perombakan sebesar 28,2%. Alasan penghuni merubah rumahnya, adalah berkaitan dengan kebutuhan ruang karena tambahan anggota keluarga dan pendapatan (15,5%), sosial ekonomi dan budaya (23,9%), serta yang paling besar (52,1%) karena adanya tuntutan aktivitas agama dan nilai-nilai tradisional. Perubahan rumah dengan tambahan *Sanggah/ Pemerajan* dapat dilihat dalam Gambar 4.1. di bawah.

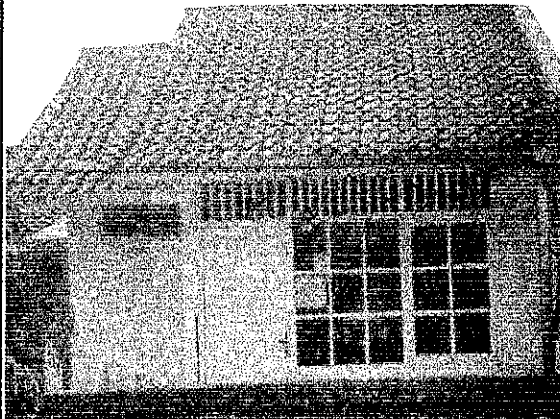
Gambar 4.1
Perubahan Rumah Berdasarkan Kebutuhan Kegiatan Keagamaan



Rumah Tipe RSS 21 Yang
 Sudah di Finishing



Perubahan Rumah Tipe RSS 21 Dengan Tambahan
Sanggah/Pemerajan



Rumah Tipe RS D21 Yang Belum Berubah
 (sesuai standard)



Perubahan Rumah Tipe RS D21 Dengan Tambahan
Sanggah/Pemerajan



Rumah Tipe RS D36 Yang Belum Berubah
 (sesuai standard)



Perubahan Rumah Tipe RS D36 Dengan Tambahan
Sanggah/Pemerajan

Sumber: Data lapangan (2002)

Rumah bagi sebagian orang Bali adalah Rumah tradisional yang dapat menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti; tidur, makan, istirahat juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat (Sulistiyawati. dkk, 1985: 15). Orang-orang Hindu di Bali melaksanakan upacara *Panca Yadnya* (lima persembahan/*Yadnya*, yaitu: *Dewa Yadnya*, *Rshi Yadnya*, *Manusa Yadnya*, *Pitra Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*). Mempercayai adanya *Atman* pada kehidupan (bagian *Panca Srada*), bahwa terdapat kehidupan lain bagi orang yang telah meninggal (leluhur), oleh karena itu sebagai manusia memiliki kewajiban menyembah leluhurnya yang telah menjadi *Atman*. Peranan rumah bagi orang Bali (tradisional) sebagai ruang-ruang tradisional mewadahi aktivitas penghuninya dalam melakukan *Panca Yadnya* sebagai realisasi *Panca Sradha* (Universitas Udayana, 1976: 8). Sehingga bagi yang keluar dari rumah asal akan tetap memiliki kewajiban melaksanakan upacara ke rumah asal. Sebagian besar (77,5%) penghuni melaksanakan upacara agama di rumah sekarang dan rumah asal, serta yang melaksanakan upacara agama hanya di rumahnya sekarang mencapai 12,7%. Penghuni kebanyakan (42,3%) melaksanakan 2 jenis upacara, dan (28,2%) melaksanakan sampai 3 jenis upacara, dengan jenis upacara *Dewa Yadnya*, *Manusa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*.

Akibat dari kegiatan upacara agama membutuhkan ruang aktivitas atau tempat sembahyang, maka dengan demikian dalam petak rumah diperlukan tempat mendirikan *Sanggah/Pemerajan* (tempat sembahyang umat Hindu di Bali). Penghuni perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, sebagian besar (77,5%) menganggap perlu disediakan tempat kosong untuk mendirikan *Sanggah/Pemerajan* dalam petak rumahnya.

Kebutuhan ruang untuk aktivitas agama menyebabkan perubahan rumah dalam perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura, baik fungsi maupun jenis ruang. Fungsi yang

semula hanya terbatas pada kegiatan sehari-hari, seperti; tidur, memasak dan makan, menerima tamu serta keperluan mandi/WC dengan ruang-ruangnya sesuai standar, bertambah untuk kegiatan sembahyang yang disertai kebutuhan ruang berupa *Sanggah/Pemerajan*.

4.1.1.2 Perubahan Akibat Kebutuhan Nilai-Nilai Tradisional Bali

Rumah tradisional sebagai wadah kehidupan dan tempat pelaksanaan upacara agama, memiliki landasan filosofi untuk mencapai tujuan *Moksah* (kesejahteraan) harus terjadi hubungan yang harmonis antara rumah/wadah (*Bhuana agung*) dengan manusia/isi (*Bhuana alit*), yang akan tercapai bila terjadi keseimbangan dan keselarasan melalui unsur-unsur *Tri Hita Karana*. Untuk tercapai keseimbangan dalam susunan jasad/*angga*, *Tri Angga* mengatur dengan tingkatan nilai (*Utama*, *Madya* dan *Nista*), yang melahirkan konsep *Sanga Mandala*.

Konsepsi *Sanga Mandala* menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan dan tata letak ruang. Kegiatan yang memerlukan ketenangan diletakkan pada daerah *Utama*, yang dianggap kotor/sibuk diletakkan di *teben* pada daerah *Nista*, sedangkan kegiatan diantaranya diletakkan ditengah. Tata letak bangunan, yaitu; *Sanggah/Pemerajan* pada daerah *Utamaning Utama*, kegiatan rumah tangga termasuk tempat tidur bagian tengah dan tempat pembuangan sampah paling *teben/Nista* (Sulistyawati. dkk; 1985: 10-11).

Kegiatan yang memerlukan ketenangan sebagai indikator adalah ruang tidur, karena kebutuhan ruang ini mutlak ada dalam rumah dan tata letak dalam rumah tradisional pada daerah *Utama*. Menurut (Budihardjo, 1986; Putera. dkk, 1987), *Bale Meten* yang berfungsi sebagai tempat tidur dalam zoning rumah tradisional terletak pada daerah *Madyaning Utama*.

Bangunan rumah Perum Perumnas yang monolit (satu masa) sangat berbeda dengan rumah tradisional (*compound*) termasuk dalam kebutuhan dan jenis ruang, seperti kamar mandi/WC adalah kebutuhan modern yang tidak dikenal dalam rumah tradisional dan sebaliknya rumah Perumnas memiliki ruang yang terbatas antara lain: ruang tidur, dapur, ruang tamu dan KM/WC. Masuknya pengaruh teknologi dan kehidupan modern tidak bisa ditolak, untuk memenuhi kegiatan mandi, cuci dan kakus sebagai kebutuhan modern, maka diperlukan kamar mandi dan WC dalam rumah, bila dilihat kegiatan yang bersifat kotor maka sebaiknya diletakkan pada daerah *Nista*. Maka sebagai indikator kegiatan yang kotor dipakai kamar mandi/WC karena fungsinya yang paling memungkinkan baik dalam rumah tradisional maupun rumah Perum Perumnas. Penelitian yang dilakukan Gelebet tentang Pengaruh Teknologi Pada Pemukiman Tradisional (1984:57), ditemukan hampir semua rumah memiliki sumur dan kamar mandi. Juga dalam upaya pelestarian nilai-nilai tradisional dari pengaruh kehidupan modern menurut Suyadnya (1997:10), KM/WC dapat diletakkan pada daerah *teben/Nista*.

Tata letak ruang juga dipengaruhi orientasi kosmologis setempat, seperti halnya rumah di Kota Amlapura Ibukota Kabupaten Karangasem, daerah *Utamaning Utama* sebagai tempat *Sanggah Pemerajan* yaitu pada arah timur laut. Menurut Parimin (1986), pola tata ruang rumah di Bali sangat bervariasi, seperti; desa Bugbug, Timrah, Bungaya (desa tradisional di Kabupaten Karangasem) daerah *Utamaning Utama* pada arah timur laut.

Kondisi rumah Perum Perumnas yang standar bentuk *Kopel/Duplek*, tentu akan sulit memenuhi kebutuhan tata letak yang sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Misalnya dalam satu tipe saja, rumah yang menghadap utara, timur, selatan atau barat akan memiliki tata letak ruang dengan tata nilai yang berbeda. Untuk jelasnya akan dianalisis berdasarkan

varian denah masing-masing tipe yang dibangun dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura.

Dengan melihat tata letak tempat *Sanggah/Pemerajan*, ruang tidur serta kamar mandi/WC dari varian denah dapat diketahui rumah yang tidak sesuai dengan tata nilai tradisional, antara lain:

- Tipe RSS 21 tata letak ruang yang sejajar :
 - * Denah 1, 2, 3 dan 4 tidak sesuai karena KM/WC berdekatan dengan tempat *Sanggah* dan letaknya lebih *Utama* dari ruang tidur.
 - * Denah 5, 6, 7 dan 8 sudah sesuai tetapi kecendrungan untuk berubah cukup besar karena tempat *Sanggah* dekat jalan sangat strategis untuk dikembangkan fungsi lain (lihat Gambar 4.2).
- Tipe RS D21 tata letak ruang bervariasi :
 - * Denah 2, 3, 5, 6 dan 8 tidak sesuai karena KM/WC dekat tempat *Sanggah* dan lebih *Utama* dari ruang tidur.
 - * Denah 1, 4 dan 7 sudah sesuai tetapi denah 7 cenderung berubah karena tempat *Sanggah* dekat jalan sangat strategis. (lihat Gambar 4.3)
- Tipe RS D36 tata letak ruang bervariasi :
 - * Denah 1, 2, 3, 4, 5 dan 8 tidak sesuai karena KM/WC dekat tempat *Sanggah* dan lebih *Utama* dari ruang tidur.
 - * Denah 6 dan 7 sudah sesuai tetapi cenderung berubah karena tempat *Sanggah* dekat jalan sangat strategis. (lihat Gambar 4.4)

Bagi yang memiliki kepercayaan dan keyakinan dengan rumah tradisional Bali masih memungkinkan penerapan nilai-nilai tradisional dalam rumah modern. Penerapan prinsip-prinsip rumah tradisional agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, diperhitungkan dari segi kemajuan dan tuntutan jaman, seperti; persediaan tanah, kebutuhan ruang, fungsi dan kemampuan serta keyakinan penghuninya selaku pemilik dan pemakai. Menurut Subandi (1990), ini dapat ditampilkan melalui prinsip tata ruang dan tata letak, tata bangunan, sistem struktur dan konstruksi, ergonomi, serta ornamen dan bahan khas tradisional Bali.



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

T E S I S

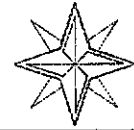
**PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUMUMNAS
DI KOTA AMLAPURA**

**VARIAN DENAH RUMAH TYPE RSS 21 DALAM
PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMLAPURA**

KETERANGAN :

- Denah : 1,2,3,4 Tidak Sesuai Tata Nilai Tradisional karena KM/WC dekat tempat Sanggah dan letaknya lebih Utama dan ruang Tidur.
- Denah : 5,6,7,8 Sesuai Tata Nilai Tradisional dilihat dari letak Sanggah berjauhan dengan KM/WC dan letak ruang Tidur lebih Utama.

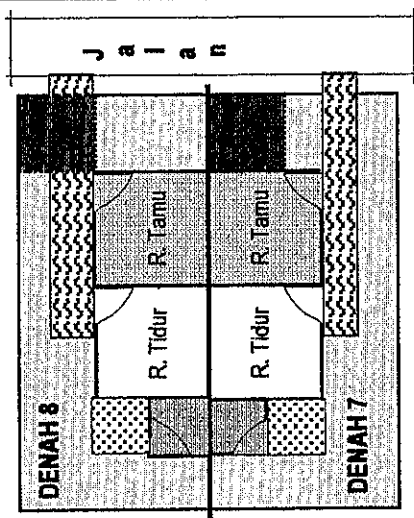
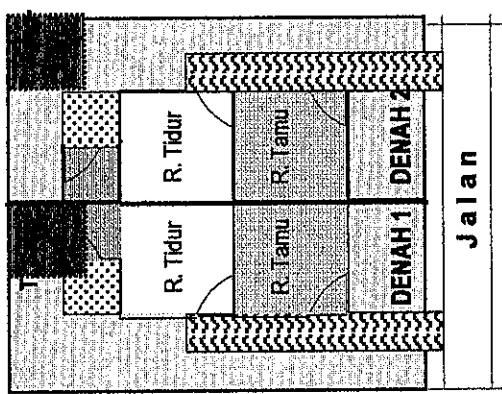
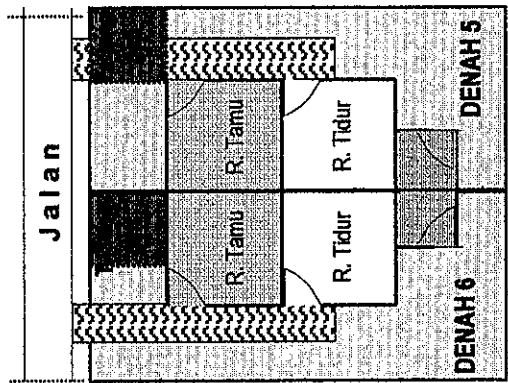
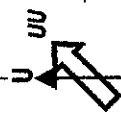
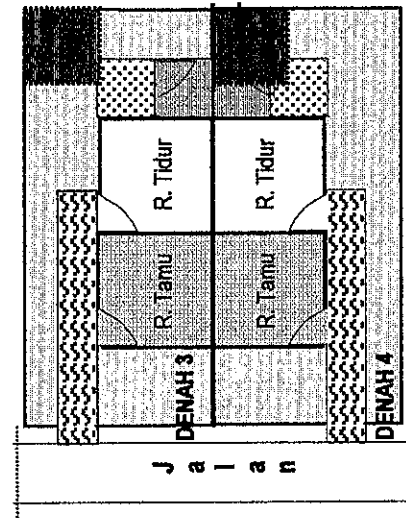
U



SKALA :

NO.GAMBAR : 4.2 HAL. : 97

**SUMBER :
ANALISA (2002)**





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUMUMNAS
DI KOTA AMLAPURA

VARIAN DENAH RUMAH TYPE RS D21 DALAM
PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMLAPURA

KETERANGAN :

- Denah : 2,3,5,6,8 Tidak Sesuai Tata Nilai Tradisional karena letak *Sanggah* dekat KM/WC dan lebih *Utama* dari letak ruang Tidur
- Denah : 1,4 dan 7 Sesuai Tata Nilai Tradisional dilihat dari letak *Sanggah* yang jauh dengan KM/WC dan ruang Tidur lebih *Utama*

U



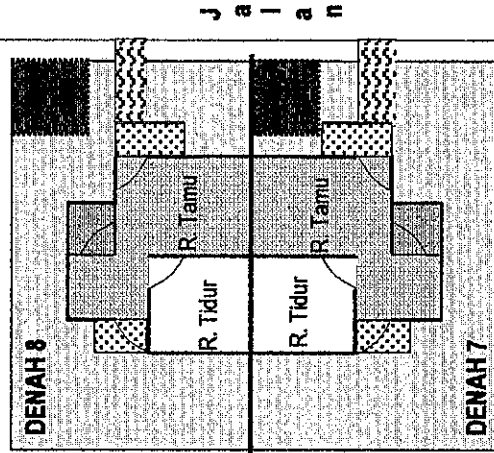
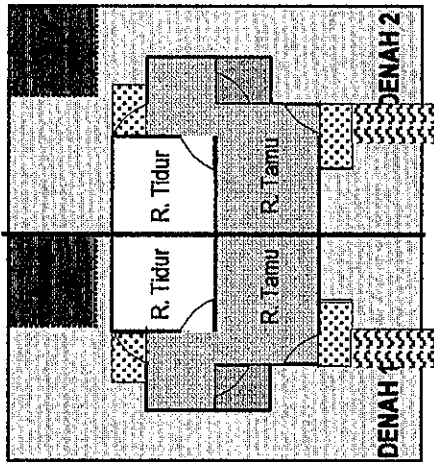
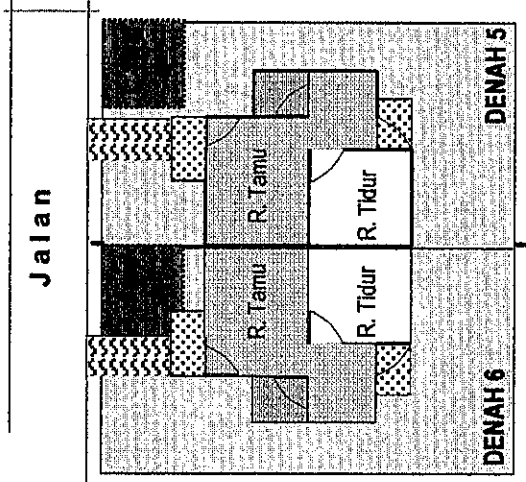
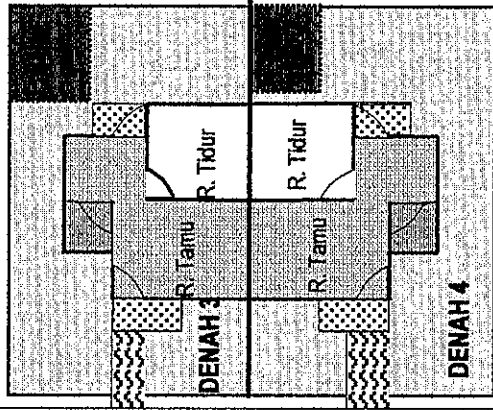
SKALA :

NO.GAMBAR : 4.3

HAL.: 98

SUMBER :

ANALISA (2002)





**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TESIS

**PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUMINAS
DI KOTA AMLAPURA**

**VARIAN DENAH RUMAH TYPE RS D36 DALAM
PERUMAHAN PERUM PERUMINAS
DI KOTA AMLAPURA**

KETERANGAN:

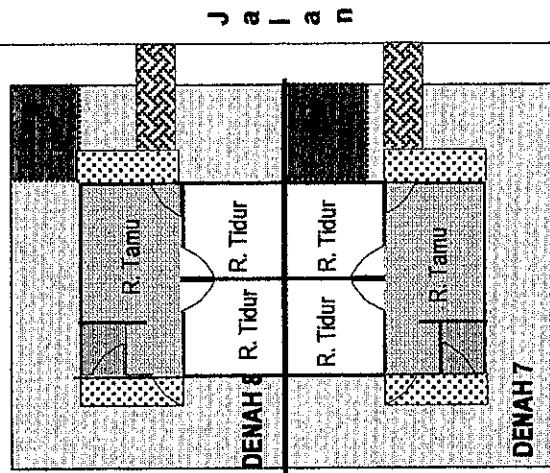
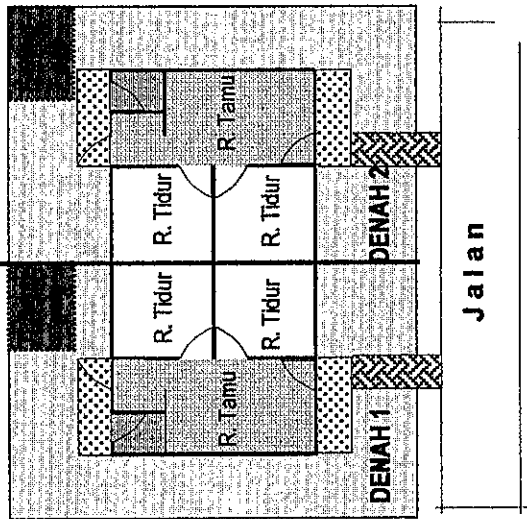
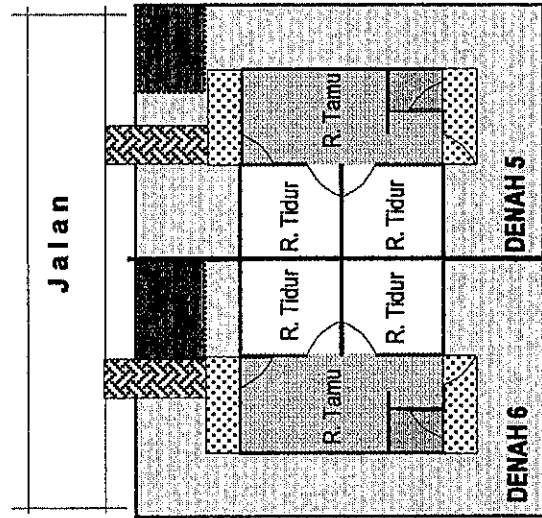
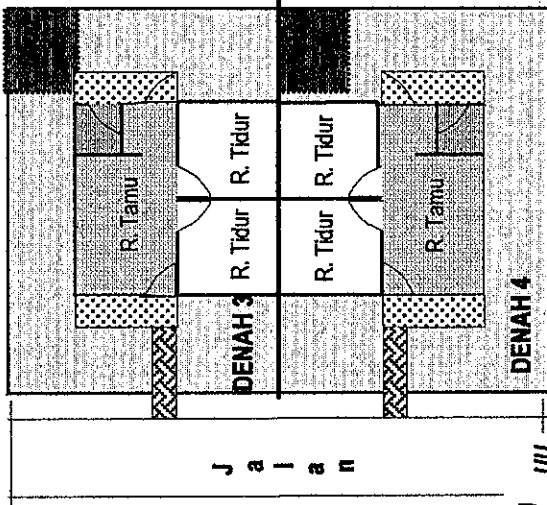
- Denah : 1,2,3,4,5,8 Tidak Sesuai Tata Nilai Tradisional karena letak Sanggah dekat KMWC dan lebih Utama dari letak ruang Tidur
- Denah : 6 dan 7 Sesuai Tata Nilai Tradisional dilihat dari letak Sanggah jauh dengan KMWC dan ruang Tidur lebih di Utama

U

SKALA:

NO.GAMBAR : 4.4 HAL.: 99

SUMBER :
ANALISA (2002)



Nilai-nilai tradisional dalam perumahan di Bali merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem budaya. Dari 71 responden yang diteliti, sebagian besar (73,2%) menganggap perlu penerapan nilai-nilai tradisional, (15,5%) ragu-ragu dan (11,3%) tidak perlu. Bila dikaitkan dengan letak ruang tidur sebanyak 73,2% meletakkan sesuai dengan tata nilai tradisional yaitu pada daerah *Utama* dan 19,7% tidak memperhatikan atau bebas. Letak KM/WC sebanyak 70,4% meletakkan sesuai dengan tata nilai tradisional pada daerah *Nistha* dan 19,7% secara bebas. Berkaitan dengan tata letak ruang tidur dan KM/WC agar sesuai dengan nilai-nilai tradisional, bisa jadi merupakan alasan penghuni melakukan perombakan rumahnya (lihat uji *Chi-square* 4.2.B). Sebab menurut (Purwita, 1987: 4), dari tiga wujud budaya (sistem budaya, sistem sosial dan unsur-unsur fisik), yang paling mudah berubah adalah unsur-unsur fisik kemudian sistem sosial, sedangkan paling sulit berubah adalah sistem budaya, dengan demikian maka yang berubah sebetulnya adalah modus/penataannya.

Terhadap perubahan rumah adalah sebagai proses "*Housing is a process*" yang dikemukakan Turner (1972), rumah bukan sekedar kondisi fisik yang berada dibawah standar tapi menyangkut manusiawi dan nilai sosial budaya dari proses bermukim. Jadi kecenderungan perubahan rumah pada perumahan yang dibangun secara masal (*mass housing*) sangat sering terjadi, apalagi pada kondisi masyarakat yang memiliki karakteristik budaya yang khas.

Perumahan yang mengacu pada standar produk jadi (*finished product*), sering timbul ketidaksesuaian antara rumah dengan penghuni. Maka kebanyakan rumah yang dibangun dengan bantuan KPR-BTN langsung dibongkar begitu dihuni. Kekhasan lokal dalam tata cara hidup, perilaku, kebiasaan dan adat istiadat telah menciptakan jati diri masyarakat setempat (Budihardjo; 1998; 38). Penghuni perumahan Perum Perumnas Kota

Amlapura, sebagian besar (80,3%) mengerti tentang konsepsi dan nilai-nilai perumahan tradisional Bali, seperti *Tri Hita Karana*, *Tri Angga/ Tri Mandala* dan *Sanga Mandala*. Perombakan rumah dilakukan selain memenuhi kebutuhan ruang juga menyesuaikan tata letak Sanggah/Pemerajan, ruang tidur dan KM/WC. Perombakan rumah untuk menyesuaikan nilai-nilai tradisional, dapat dilihat dalam Gambar 4.5. dan 4.6.

Gambar 4.5
Perubahan Rumah Untuk Menyesuaikan Tata Nilai Tradisional



Sumber: Data lapangan (2002)



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

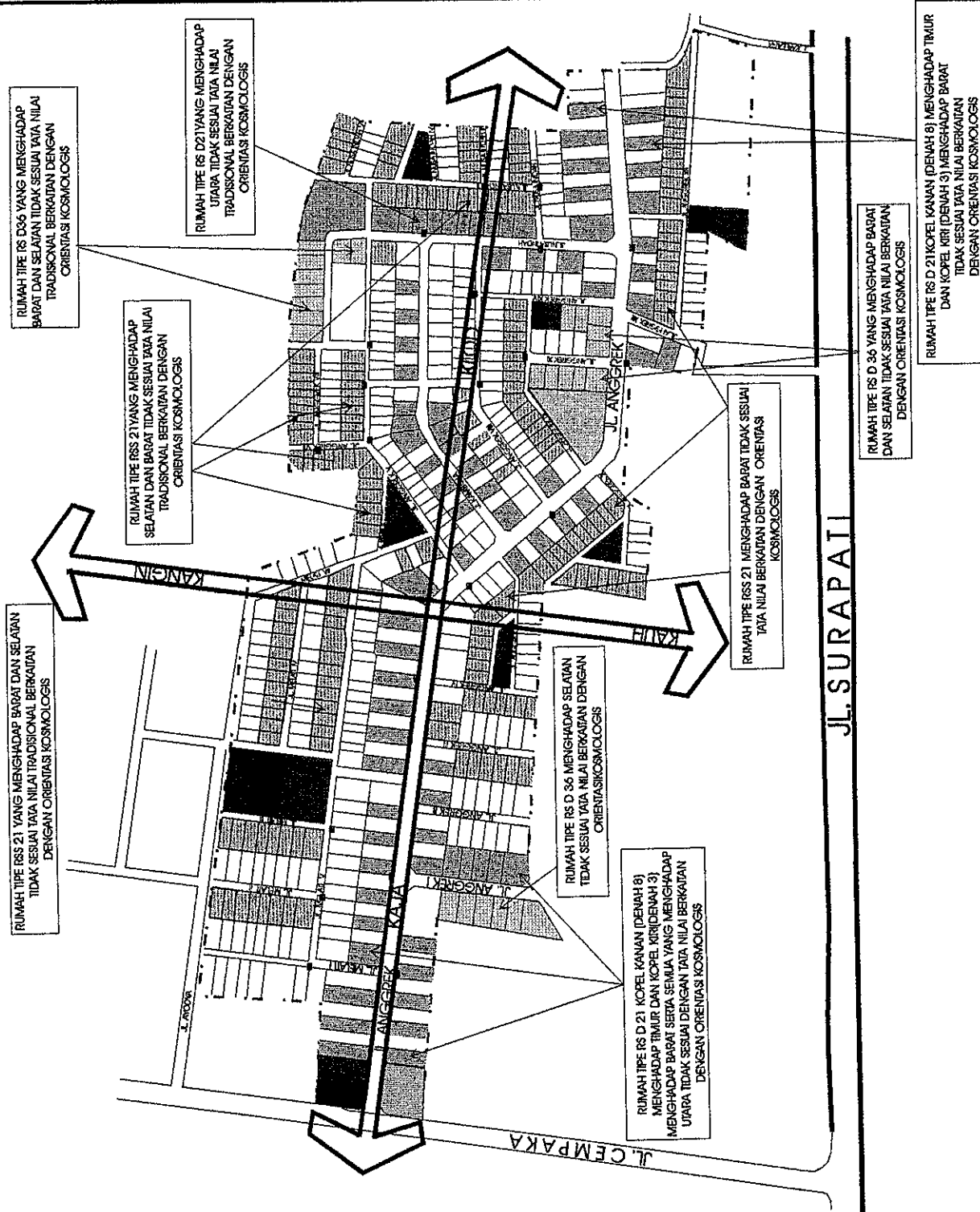
PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUMIHAN
DI KOTA AMILAPURA

PEETA : KECENDERUNGAN PERUBAHAN RUMAH
 AKIBAT TATA NILAI TRADISIONAL

LEGENDA :

- = RUMAH YG SESUAI TATA NILAI
- = RUMAH TIPE RSS 21 YG TIDAK SESUAI TATA NILAI
- = RUMAH TIPE RS D 21 YG TIDAK SESUAI TATA NILAI
- = RUMAH TIPE RS D 36 YG TIDAK SESUAI TATA NILAI

NO.GBR	SKALA
4,6	0 25 50 75 100 M
NO.HAL	
102	
SUMBER : ANVALISA (2002)	



4.1.2 Perubahan Kawasan Perumahan

Perumahan di Bali, yang disebut *desa* (adat) adalah suatu tempat (wadah) kesatuan wilayah administratif maupun adat, merupakan fenomena hubungan timbal balik antara wadah dengan isi. Dengan demikian konsep *desa* memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, *desa adat* sebagai suatu kesatuan wilayah tempat warga (*krama*) secara bersama-sama melaksanakan upacara-upacara dan berbagai kegiatan sosial (fungsi pelaksanaan keagamaan Hindu); kedua, *desa dinas/perbekalan* sebagai kesatuan wilayah administrasi yang mengatur administrasi pemerintahan (Sudharma; 1971:11).

Desa dalam skala yang lebih kecil disebut *banjar* (sub unit *desa*), juga terdapat *banjar dinas* maupun *banjar adat* bahkan untuk *banjar-banjar* yang besar bisa dibagi lagi berdasarkan *tempekan* atau sub unit dari *banjar*. Dengan fenomena tersebut diatas, pembangunan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, selain munculnya bangunan perumahan (fisik) akan disertai munculnya komunitas masyarakat, dengan berbagai alternatif, seperti; *desa dinas* dan *adat*, *banjar dinas* dan *adat*, *tempekan*, bahkan mungkin hanya *desa dinas*, *banjar dinas* sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian *desa* (adat), yang merupakan kebutuhan masyarakat Bali, menurut (Sulistyawati, 1985: 3), adalah suatu tempat kehidupan yang utuh dan bulat yang terdiri dari 3 unsur, yaitu: unsur *kahyangan tiga* (pura *desa*), unsur *krama desa* (warga), dan *karang desa* (wilayah). Unsur *kahyangan tiga* menunjukkan perumahan memiliki fungsi keagamaan (ritual) selain kehidupan sosial sehari-hari, dan ini menjadikan *desa* memiliki atribut tiga tempat pemujaan dengan tata letak sesuai orientasi kosmologis atau simbolik. Unsur *krama desa*, warga *desa* dalam satu lembaga adat melakukan aktivitas keagamaan (sakral) dan sosial kemasyarakatan (profan) dengan fasilitas sosial dalam tata ruang, untuk mencapai keharmonisan dalam lingkungan buatan atau fungsional. Unsur

karang desa/palemahan, perumahan memiliki wilayah untuk permukiman, fasilitas keagamaan dan fasilitas sosial sesuai dengan tata ruang tradisional, yang melahirkan morfologi desa. Menurut Gelebet (1984: 48), perumahan atau permukiman tradisional merupakan tempat tinggal yang berpola tradisional dengan perangkat lingkungan dengan latar belakang norma-norma dan nilai-nilai tradisional.

Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, mayoritas penghuni orang Bali yang beragama Hindu (77,5%), memiliki latar belakang kepercayaan dan keyakinan tentang perumahan tradisional untuk menyesuaikan kebutuhan sosial dan adat menunjukkan ada perubahan dalam perumahannya.

Observasi lapangan menunjukkan, terjadi perubahan kawasan perumahan dilihat dari perubahan fasilitas umum, antara lain; Balai RT, tempat Pura, 4 lokasi tempat bermain, taman kanak-kanak dan sebagian lapangan olah raga berubah menjadi *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*. Penyebab perubahan fasilitas umum, (53,5%) karena kebutuhan adat, (7,0%) karena tidak dibangun, (2,8%) lainnya dan (1,4%) tidak sesuai dengan kebutuhan. Juga perubahan-perubahan elemen ruang lainnya yang terkait dengan konsepsi dan nilai-nilai perumahan tradisional. Untuk melihat perubahan kawasan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, berkaitan dengan pengaruh budaya tradisional akan dikaji dari beberapa faktor perumahan tradisional.

4.1.2.1 Perubahan Akibat Faktor Sosial

Pembangunan perumahan dalam suatu ruang kota, harus disadari bukan berarti pembangunan fisik semata melainkan akan disertai terbentuknya komunitas baru dengan kegiatan kemasyarakatannya. Maka menjadi suatu ketentuan dasar dalam perencanaan perumahan Perum Perumnas dengan KPR BTN harus menyediakan tanah untuk fasilitas

umum, seperti: gedung pertemuan, peribadatan, kesehatan, pendidikan, tempat bermain dan lainnya. Perum Perumnas dalam pembangunan perumahan di Kota Amlapura menyediakan lahan fasilitas umum untuk kegiatan sosial, yaitu; Balai RT sebagai tempat pertemuan, dan kegiatan keagamaan berupa tempat Pura, Mesjid dan Gereja. Dengan demikian, dalam perumahan yang baru diharapkan penghuni membentuk satu komunitas RT dan dapat melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk agama. (lihat Gambar 4.7 dan 4.8)

Gambar 4.7
Sebagian Fasilitas Umum Yang Telah Dibangun Warga Perum Perumnas



Sumber: Data lapangan (2002)










PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUMI PERUMINAS
DI KOTAMALAPURA

PETA : ORIENTASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN
DAN KEAGAMAAN

LEGENDA :

-  = BALAI RT
-  = PURA
-  = MUSHOLA
-  = GEREJA
-  = ORIENTASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN
-  = ORIENTASI KEGIATAN KEAGAMAAN
-  = ORIENTASI KEGIATAN KEAGAMAAN YG BERKAITAN DGN BUDAYA TRADISIONAL

NO.GBR

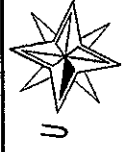
4.8

SKALA



NO.PAL

106



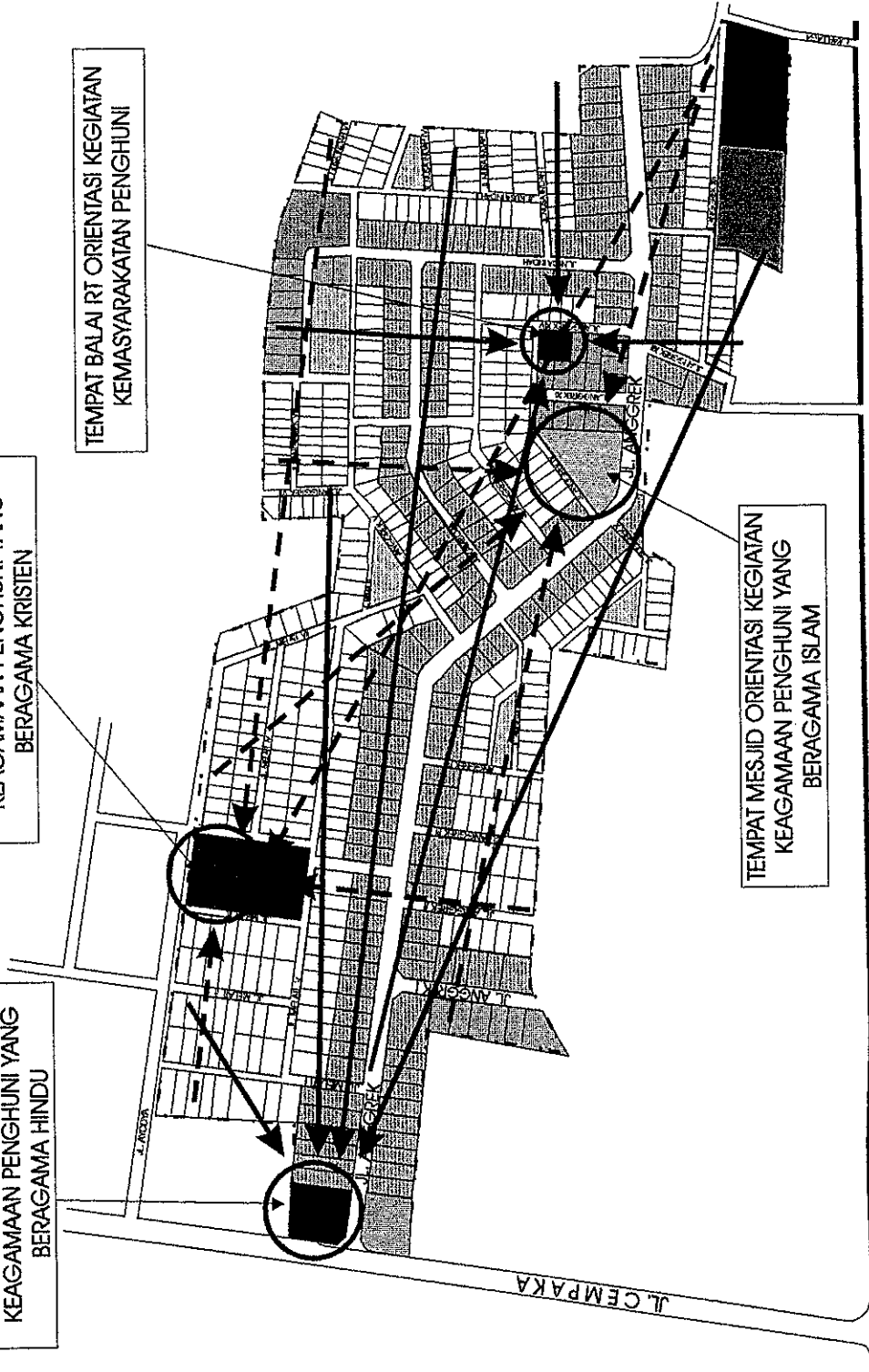
SUMBER : ANALISA (2002)

TEMPAT GEREJA ORIENTASI KEGIATAN
KEAGAMAAN PENGHUNI YANG
BERAGAMA KRISTEN

TEMPAT PURA ORIENTASI KEGIATAN
KEAGAMAAN PENGHUNI YANG
BERAGAMA HINDU

TEMPAT BALAI RT ORIENTASI KEGIATAN
KEMASYARAKATAN PENGHUNI

TEMPAT MESJID ORIENTASI KEGIATAN
KEAGAMAAN PENGHUNI YANG
BERAGAMA ISLAM



JL. SURAPATI

Dalam perkembangannya setelah terjadi pembauran dan semakin eratnya kekerabatan antar penghuni, membawa perubahan sistem kemasyarakatan baik dalam jenis maupun jumlahnya. Dari 71 responden, sebagian besar (71,8%) menganggap cukup dibentuk banjar dinas, (18,3%) banjar dinas dan *banjar adat* serta (9,9%) hanya *banjar adat*. Proses perubahan sistem kemasyarakatan tidak begitu jelas karena menurut informasi penghuni dan catatan formal dari Kelurahan Padangkerta; dalam perumahan Perum Perumnas pada awalnya terbentuk 2 RT/lingkungan, berubah menjadi 5 RT/lingkungan, kemudian sampai ditetapkan sebagai daerah definitif dengan batas-batas wilayah menjadi 7 RT/lingkungan, dan sampai saat ini menjadi 8 RT/lingkungan dengan masing-masing memiliki warga, wilayah dan Balai pertemuan.

Dalam lingkungan yang mayoritas penghuninya beragama Hindu dan tercipta toleransi agama yang cukup tinggi, lembaga kemasyarakatan yang muncul bukan hanya dinas (administrasi pemerintahan) tetapi juga lembaga adat berkaitan dengan kegiatan agama khususnya bagi warga yang beragama Hindu. Kegiatan kemasyarakatan, sebagian besar (49,3%) melaksanakan kegiatan kemasyarakatan banjar dinas juga *banjar adat*, (40,8%) kegiatan banjar dinas, dan (9,9%) kegiatan *banjar adat*.

Toleransi dilihat dari keberadaan Balai pertemuan yang dilengkapi *Pura banjar* (tempat sembahyang Hindu), walaupun umat lain tidak terlibat dalam kegiatan persembahyangan tapi fasilitas sosial tersebut sebagai milik bersama. Dalam skala yang lebih kecil (sub unit desa), dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura sudah terbentuk *banjar adat* selain banjar dinas. *Banjar* sebagai lembaga tradisional merupakan bagian *desa* (adat) yang memiliki tiga unsur (*kahyangan tiga, krama desa dan karang desa*), hanya saja unsur *kahyangan tiga* berupa fasilitas sosial kemasyarakatan, yaitu *Bale*

banjar yang dilengkapi *Pura banjar* sebagai tempat pertemuan, kegiatan sosial, upacara agama dan orientasi warga (Gelebet, 1984: 59).

RT/lingkungan (sub unit desa) atau sebagian memberi nama *banjar* (dinas dan adat), merupakan bagian Kelurahan Padangkerta (dinas) dan *Desa adat* Kertasari. Masuknya *banjar* di lingkungan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura ke dalam Kelurahan Padangkerta maupun *Desa adat* Kertasari sangat memungkinkan, hal ini karena terdapat variasi hubungan desa-desa di Bali. Menurut Parimin (1986:25) terdapat variasi hubungan antara desa adat dengan desa dinas/perbekalan. Keberadaan *banjar* dinas dan *banjar adat* dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura bisa dilihat dari ciri-ciri, sebagai berikut:

- Adanya pengakuan sebagai *banjar* dinas dan *banjar adat*;

Adanya pengakuan formal (legitimasi) dengan masuknya *banjar* (sementara RT/lingkungan) di lingkungan perumahan Perum Perumnas ke dalam wilayah Kelurahan Padangkerta dan *wewengkon* (wilayah) *Desa adat* Kertasari. Pengakuan secara formal sebagai bagian *Desa adat* Kertasari, dilihat dari ijin yang diberikan kepada warga Perum Perumnas, seperti; memanfaatkan *Kulkul* (alat komunikasi tradisional/kentongan) dalam keadaan darurat, sembahyang di *Kahyangan Tiga* serta mengubur mayat di *Setra* (kuburan).

Adanya perasaan cinta terhadap wilayah yang diwujudkan dengan pelaksanaan upacara agama untuk keselamatan dan kesejahteraan warga sampai dengan membangun *Pura banjar*. Agama Hindu mengajarkan agar manusia mengharmoniskan alam semesta dengan segala isinya, dalam kaitan ini *Bhuana agung* adalah lingkungan buatan dan *Bhuana alit* adalah manusia yang mendirikan dan menggunakan wadah tersebut (Subandi, 1990). Penghuni, sebagian besar (59,2%) melaksanakan upacara agama di *Pura banjar*

perumahan dan asal, serta 33,8% hanya di *Pura banjar* perumahan, diantaranya (74,0%) melaksanakan sampai 2 jenis upacara, (23,0%) 1 jenis, dan (3,0%) lebih dari 2 jenis, meliputi upacara *Dewa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*.

Dalam lingkungan perumahan dengan segala keterbatasan sebagai pendatang baru, telah muncul rasa kepribadian kelompok (kekerabatan) yang dimungkinkan karena akses, penghuni memilih ikut banjar (86%) karena alasan kekerabatan, (8%) letak *Bale* dan *Pura banjar*, dan masing-masing (3%) alasan jumlah anggota banjar dan lainnya. Terbentuknya *banjar adat* juga bisa dilihat dari wilayah dengan batas-batas tertentu yang disebut *palemahan*, adanya warga (*krama*) dan adanya *Pura banjar* sebagai pusat pemujaan warga. Perubahan sistem kemasyarakatan, merubah aktivitas kemasyarakatan dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura termasuk kebutuhan fasilitas sosialnya. (lihat Gambar 4.9 dan 4.10).

- Keberadaan fasilitas sosial dan keagamaan

Banjar adat sebagaimana halnya *desa adat* di Bali, memiliki atribut yang terkait dengan unsur-unsur *Tri Hita Karana*, yaitu: sebagai *Atma* adalah *Bale banjar* yang dilengkapi *Bale Kulkul* dan *Pura banjar*, sebagai *Prana* adalah *Pawongan/krama banjar* (warga) dan sebagai *Angga* adalah *Palemahan* (wilayah).

Lembaga tradisional *banjar adat* yang terbentuk di perumahan Perum Perumnas semua memiliki *Bale banjar* lengkap dengan *Pura Banjar*. Memiliki *pawongan* (khusus yang beragama Hindu), yaitu; paling sedikit 22 KK (*Banjar Canti Graha/RT 8*) sampai dengan paling banyak 79 KK (*Banjar Eka Canti/RT 1*). Menurut jumlah anggota, dibedakan *banjar* besar yaitu bagi yang memiliki anggota lebih dari 50 *kuren* (KK) dan *banjar* kecil memiliki anggota kurang dari 50 *kuren* (Universitas Udayana, 1976: 14).



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMILAPURA

PETA : BANJAR / RT DALAM PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS KOTA AMILAPURA

LEGENDA :

- = BATAS WILAYAH BANJAR
- = BALE BANJAR
- = PURA BANJAR
- = RENCANA SD
- = MUSHOLA
- = RENCANA GEREJA
- = LAPANGAN OLAH RAGA
- = TEMPAT BERMAIN
- = RENCANA PUSKESMAS
- = KANTOR UNIT

SKALA



NO.GBR

4,9

NO.HAL

110

SUMBER : ANALISA (2002)

WILAYAH BANJAR/RT 1 DENGAN FASILITAS
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
WARGA YANG BERAGAMA HINDU

WILAYAH BANJAR/RT 2 DENGAN FASILITAS
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
WARGA YANG BERAGAMA HINDU

WILAYAH BANJAR/RT 4 DENGAN FASILITAS
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
WARGA YANG BERAGAMA HINDU

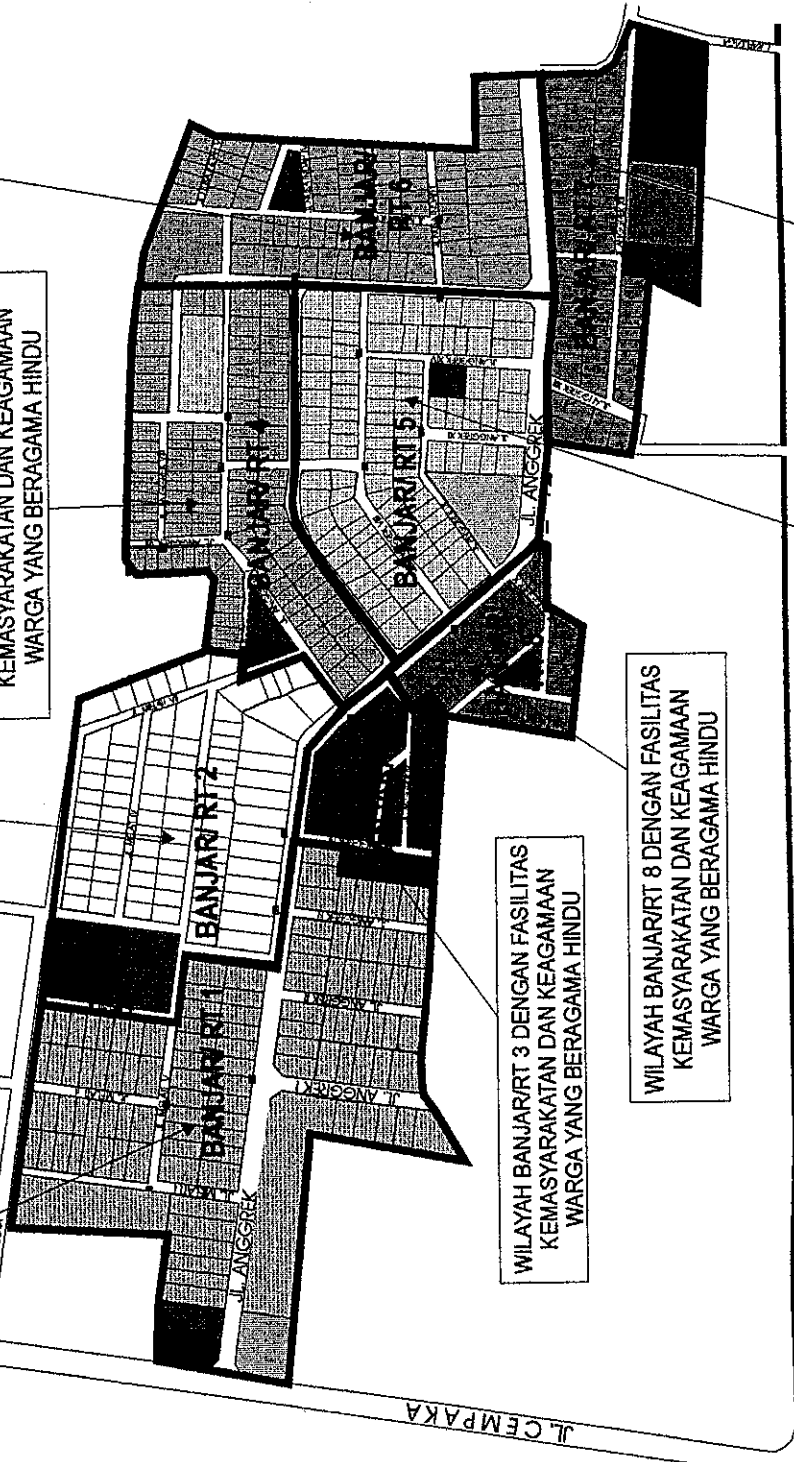
WILAYAH BANJAR/RT 6 DENGAN FASILITAS
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
WARGA YANG BERAGAMA HINDU

WILAYAH BANJAR/RT 3 DENGAN FASILITAS
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
WARGA YANG BERAGAMA HINDU

WILAYAH BANJAR/RT 8 DENGAN FASILITAS
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
WARGA YANG BERAGAMA HINDU

WILAYAH BANJAR/RT 5 DENGAN FASILITAS
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
WARGA YANG BERAGAMA HINDU

WILAYAH BANJAR/RT 7 DENGAN FASILITAS
KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN
WARGA YANG BERAGAMA HINDU



JL. SURAPATI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUMI PERUMNAS
DI KOTA ANGLAPURA

PEJA : ORIENTASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN
DAN KEAGAMAAN BANJAR

LEGENDA :

- = BATAS WILAYAH BANJAR
- = BALE BANJAR
- = PURA BANJAR
- = ORIENTASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN
- = ORIENTASI KEGIATAN KEAGAMAAN

NO.GBR

4.10

SKALA

0 25 50 75 100 M

NO.HAL

111



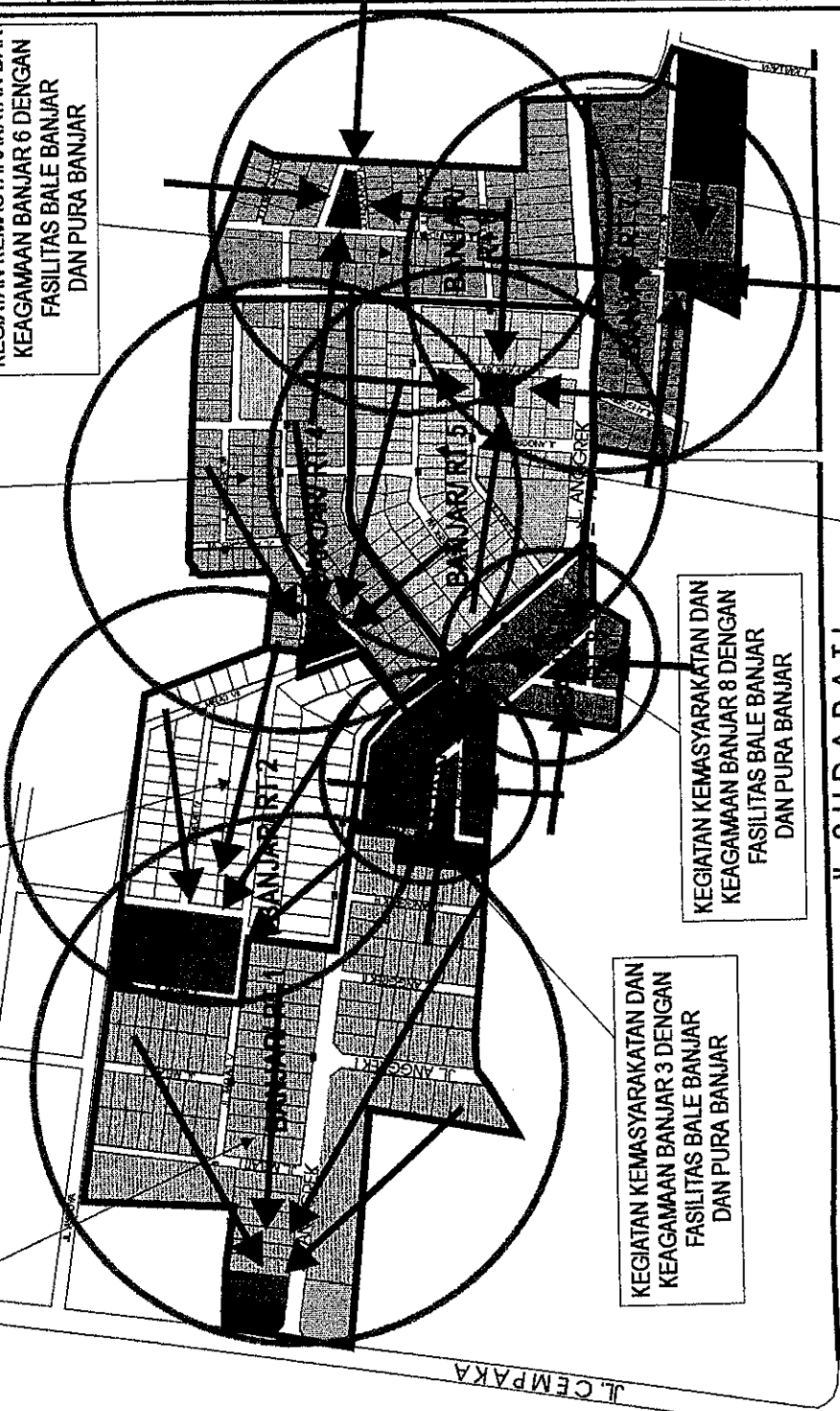
SUMBER : ANALISA (2002)

KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN BANJAR 4 DENGAN
FASILITAS BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN BANJAR 6 DENGAN
FASILITAS BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN BANJAR 2 DENGAN
FASILITAS BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN BANJAR 1 DENGAN
FASILITAS BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR



KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN BANJAR 3 DENGAN
FASILITAS BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN BANJAR 8 DENGAN
FASILITAS BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN BANJAR 5DENGAN
FASILITAS BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN BANJAR 7DENGAN
FASILITAS BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

Palemahan yaitu keseluruhan perumahan warga termasuk yang tidak masuk *banjar adat* (selain warga Hindu) dengan fasilitas sosial *Bale Banjar* untuk tempat pertemuan yang terletak pada daerah strategis.

Perubahan dalam sistem kemasyarakatan sebagai komunitas baru dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, antara lain: jenis lembaga pemerintahan (*banjar dinas/RT*) berkembang dengan terbentuknya lembaga adat (*banjar adat*) termasuk jumlahnya menjadi 8 komunitas dan ini mempengaruhi kebutuhan fasilitas umum.

Dengan disediakan 1 tempat Balai RT dan tempat *Pura* dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, sebagian besar (56,3%) penghuni mengatakan tidak cukup, (36,6%) cukup, dan (7,0%) ragu-ragu. Bertambahnya lembaga kemasyarakatan dengan kegiatan kemasyarakatan mengakibatkan kebutuhan tempat *Bale Banjar* dan *Pura Banjar* meningkat yang mengakibatkan perubahan pada fasilitas umum lainnya, seperti: tempat bermain, tempat Taman Kanak-kanak, tempat *Pura*, lapangan olah raga. Penghuni, sebagian besar (67,6%) menyatakan setuju perubahan fasilitas umum menjadi *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*. Keberadaan lembaga kemasyarakatan dengan fasilitas sosial dan keagamaan, dapat dilihat dalam Gambar 4.11

Gambar 4.11.

***Bale Banjar dan Pura Banjar* Dalam Perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura**



Fasilitas sosial kemasyarakatan dan agama Banjar/RT 5 berupa *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*

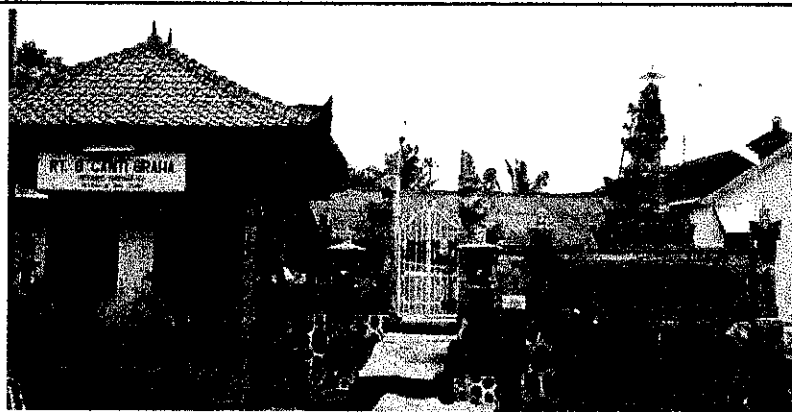
Sumber: Data Lapangan (2002)



Fasilitas sosial kemasyarakatan dan agama Banjar/RT 6 berupa *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*



Fasilitas sosial kemasyarakatan dan agama Banjar/RT 3 berupa *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*



Fasilitas sosial kemasyarakatan dan agama Banjar/RT 8 berupa *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*



Fasilitas sosial kemasyarakatan dan agama Banjar/RT 4 berupa *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*



Sumber: Data Lapangan, (2002)

4.1.2.2 Perubahan Akibat Faktor Simbolik

Perumahan tradisional Bali memiliki orientasi kosmologis yang menjadi pedoman dalam tata letak ruang sesuai dengan sifat kegiatan, sehingga tercipta keharmonisan dalam lingkungan. Seperti diketahui, kegiatan masyarakat dalam perumahan (*desa*) ada yang bersifat sakral (kegiatan agama/ritual) dan bersifat profan (kegiatan sosial) dengan masing-masing memiliki tempat sesuai peruntukkannya. Maka simbolik dalam perumahan tradisional, sebenarnya berkenaan dengan elemen-elemen alam atau ruang yang dijadikan orientasi sebagai arahan dalam penataan ruang. Hal ini juga yang menyebabkan pola-pola tradisional memiliki kesamaan, dan yang membedakan karena kondisi setempat yang bersifat lokal dan wilayah.

Penataan ruang pemukiman dengan segala fasilitas dan kelengkapannya di Pulau Bali memiliki pola dasar yang sama, yaitu orientasi bangunan kearah jaringan-jaringan jalan utara-selatan atau timur-barat (Pemda Tk.I Bali, 1984: 25).

Konsepsi *Tri Angga* memberi arahan tata nilai (*Utama, Madya, Nista*), merupakan pedoman dalam mencapai hubungan yang harmonis *Bhuana agung* dengan *Bhuana alit*. Orientasi kosmologis dalam tata letak perumahan menjadi pedoman dalam meletakkan kegiatan berdasarkan sifatnya (sakral atau provan). Kegiatan dalam perumahan ada dua, yaitu; kegiatan keagamaan yang bersifat sakral dan kegiatan sosial kemasyarakatan bersifat provan, yang masing-masing memiliki orientasi. Orientasi tata nilai, berdasarkan sumbu bumi (*kaja-klod*) merupakan orientasi aktivitas manusia dan sumbu matahari (*kangin-kauh*) sebagai orientasi aktivitas keagamaan. (Universitas Udayana, 1976: 12). Perwujudan dalam perumahan dapat mengarah pada sumbu jalan utama *Kaja-klod* dengan *Kaja/gunung (Utama) dan Klod/ke laut (Nistha)*, dengan meletakkan bangunan yang dianggap sakral pada daerah *Utamaning Utama*, atau perwujudan lainnya yang bersifat lokal.

Maka dalam perumahan tradisional di Bali, sumbu jalan utara-selatan atau timur-barat merupakan perwujudan simbolik orientasi yang menjadi pedoman penempatan fasilitas sosial. Dalam perumahan Perum Perumnas dengan kondisi yang telah jadi, sudah tentu sulit mewujudkan suatu yang ideal, sesuai dengan kebutuhan orientasi. Jaringan jalan dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, sebagian ada yang sesuai dengan sumbu utara-selatan dan timur barat atau sesuai dengan perwujudan orientasi yang diinginkan, dan sebagian lagi perwujudannya diagonal yang tidak sesuai orientasi. (lihat Gambar 4.12 dan 4.13).

Gambar 4.12
Sumbu Jalan *Kaja-klod* Dalam Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura



Suasana lingkungan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura pada sumbu jalan utama *Kaja-klod*, tampak latar belakang Gunung Agung

Sumber: Data Lapangan (2002)

Menyikapi kondisi fisik yang ada, masyarakat yang percaya dan meyakini nilai-nilai tradisional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perumahan. Karena pada intinya penataan ruang bertujuan agar fungsi yang ada tidak saling mengganggu sehingga terwujud keharmonisan dalam ruang yang menjadikan warganya lebih mudah mencapai kesejahteraan. Penghuni, sebagian besar (71,8%) perlu penerapan nilai-nilai tradisional dalam perumahan, (15,5%) ragu-ragu, dan (12,7%) tidak perlu. Dan mengetahui konsepsi dan nilai-nilai tradisional, diantaranya; (80,3%) mengetahui 1 jenis, dan masing-masing (10,4%) mengetahui 2 sampai lebih konsepsi dan nilai-nilai tradisional seperti; *Tri Hita Karana*, *Tri Angga* dan *Sanga Mandala*. Budaya tradisional Bali bukan suatu yang mandeg (statis) tapi fleksibel, adaptif, kreatif dan dinamis sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Menurut Mantra (1996: 31), secara keseluruhan gerak perubahan masyarakat dan kebudayaan Bali dalam kerangka modernisasi dan globalisasi cenderung menuruti konsep *continuity in changes*.








PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA MALAPURA

PETA: ARAH ORIENTASI KOSMOLOGI

LEGENDA :

-  = RUMAH TYPE RS D 36
-  = RUMAH TYPE RS D 21
-  = RUMAH TYPE RSS 21
-  = SESUAI ARAH ORIENTASI KOSMOLOGI
-  = TIDAK SESUAI ARAH ORIENTASI KOSMOLOGI

NO.GBR

SKALA

4.13



NO.HAL

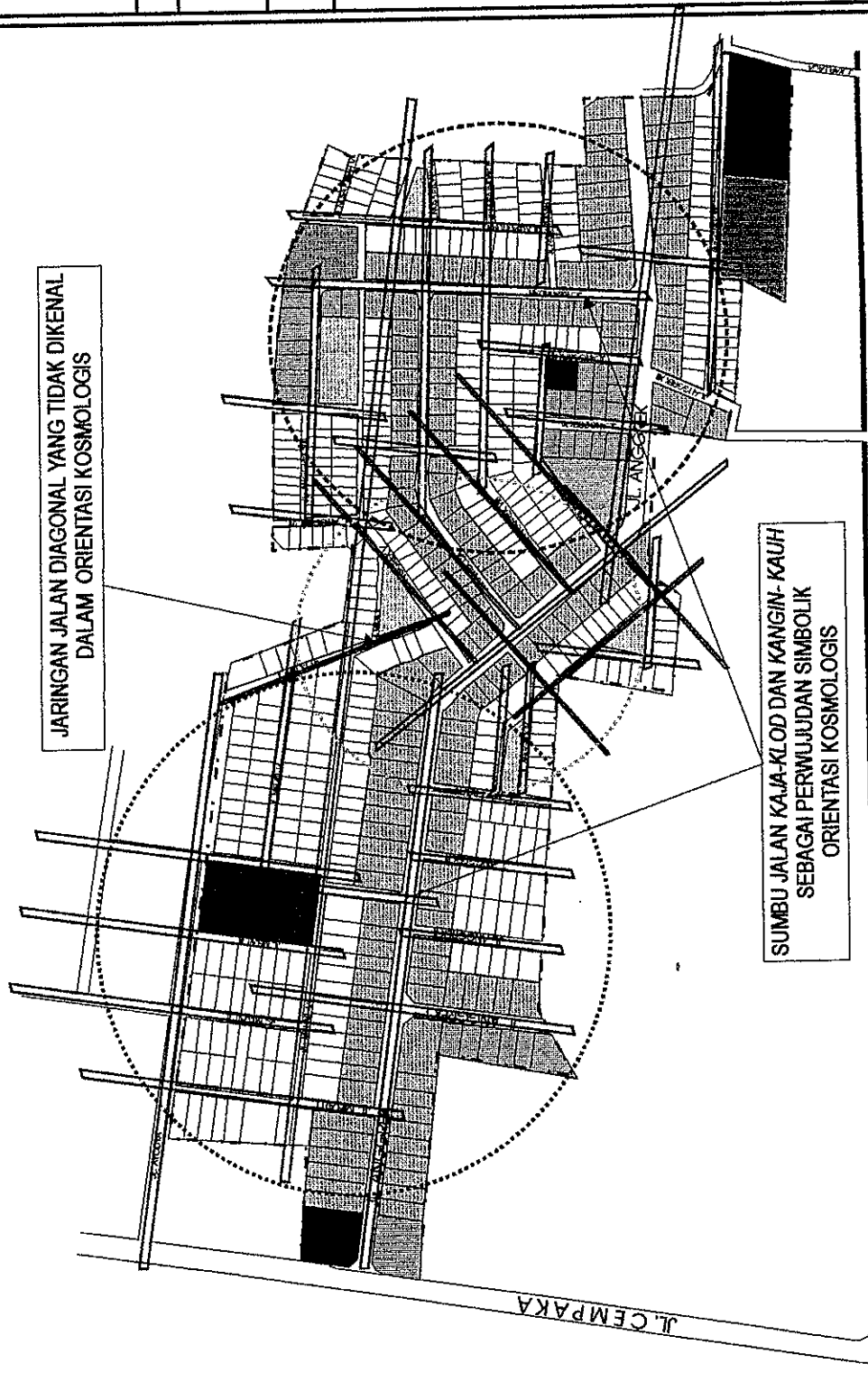
U



117

SUMBER : ANALISA (2002)

JARINGAN JALAN DIAGONAL YANG TIDAK DIKENAL
DALAM ORIENTASI KOSMOLOGIS



SUMBU JALAN KAJA-KLOD DAN KANGIN-KAUH
SEBAGAI PERWILJUDAN SIMBOLIK
ORIENTASI KOSMOLOGIS

JL. SURAPATI

JL. CEMPAKA

Budaya tradisional memiliki potensi untuk berkembang, pembaharuan dan berubah melalui konsep-konsep, antara lain: *Rwa-bhineda*, konsep dualistik dalam hidup (baik-buruk, sakral-profan, hulu-teben), pengaruhnya adalah dinamis dan menerima kenyataan dan menimbulkan perjuangan untuk menuju lebih baik; *Desa-Kala-Patra*, menyesuaikan diri dengan tempat waktu dan keadaan dalam menghadapi permasalahan.

Dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, adanya pengaruh budaya melalui penerapan nilai-nilai tradisional telah menyebabkan perubahan pada fasilitas umum. Dan terkait dengan penempatan kegiatan sesuai sifat kegiatannya dalam orientasi kosmologis, mengakibatkan perubahan dalam lingkungan.

Simbolik dalam perumahan Perum Perumnas Kota Amlapura, terwujud dari upaya yang dilakukan penghuni dengan menempatkan *Bale Banjar* dan *Pura Banjar* pada daerah *Utama*. Penghuni, sebagian besar (71,8%) menganggap tata letak *Pura Banjar* dan *Bale Banjar* harus sesuai dengan tata nilai ruang tradisional, dan (28,2%) menganggap bebas. Dengan demikian, *Bale Banjar* dan *Pura Banjar* dijadikan sebagai indikator sakral dalam lingkup banjarnya masing-masing. Dari 8 *banjar* yang ada; 3 *banjar* orientasi arah sakral pada perwujudan sumbu jalan *Kaja-klod* dengan letak *Bale Banjar* dan *Pura Banjar* pada daerah *Utamaning Utama*, dan 5 *banjar* melalui perwujudan inti (*core*) daerah *Madyaning Madya* dalam wilayah (*palemahan*) banjarnya. (lihat Gambar 4.14)

Pola perumahan di Bali yang bervariasi, tidak terlepas dari faktor potensi dan kondisi alam, seperti; Desa Bugbug dan Tenganan (di Kabupaten Karangasem), merupakan desa tradisional dengan *plaza* di tengah (Bappeda Propinsi Bali dan Universitas Udayana, 1982: 20-21).



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

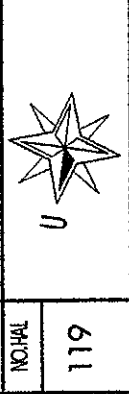
PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMLAJURA

PEETA: SIMBOLIK BANJAR DALAM PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAJURA

LEGENDA:

- = BATAS WILAYAH BANJAR
- = BALE BANJAR
- = PURA BANJAR
- = SIMBOLIK PADA SUMBU
JALAN KAJA-KLUD
- = SIMBOLIK PADA INTI
- = SANGGAH PENJUMBAK
RURUNG

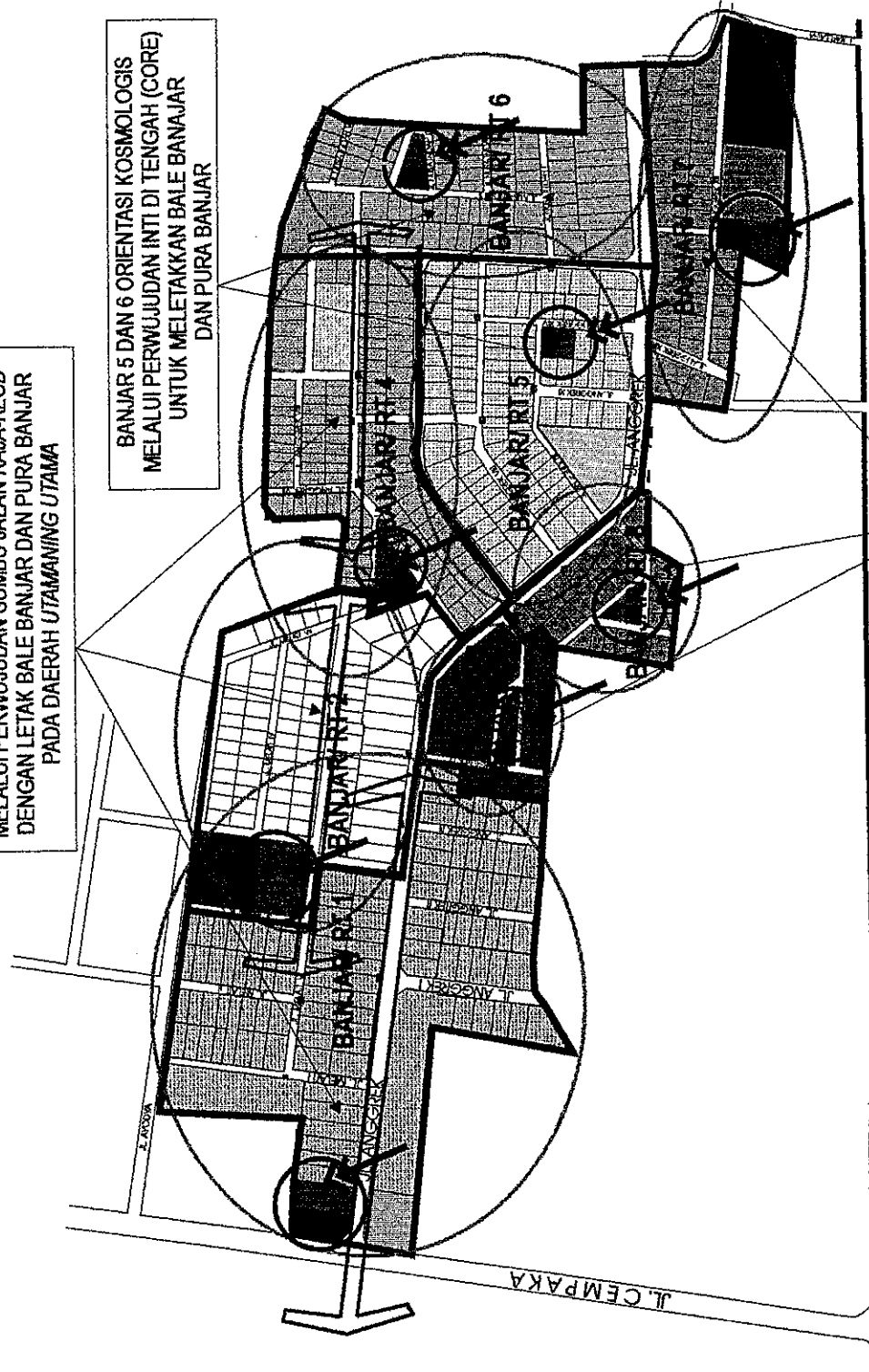
NO.GBR	SKALA
4,14	0 25 50 75 100 M



SUMBER : ANALISA (2002)

BANJAR 1,2 DAN 4 ORIENTASI KOSMOLOGIS
MELALUI PERWUJUDAN SUMBU JALAN KAJA-KLUD
DENGAN LETAK BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
PADA DAERAH UTAMANING UTAMA

BANJAR 5 DAN 6 ORIENTASI KOSMOLOGIS
MELALUI PERWUJUDAN INTI DI TENGAH (CORE)
UNTUK MELETAKKAN BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

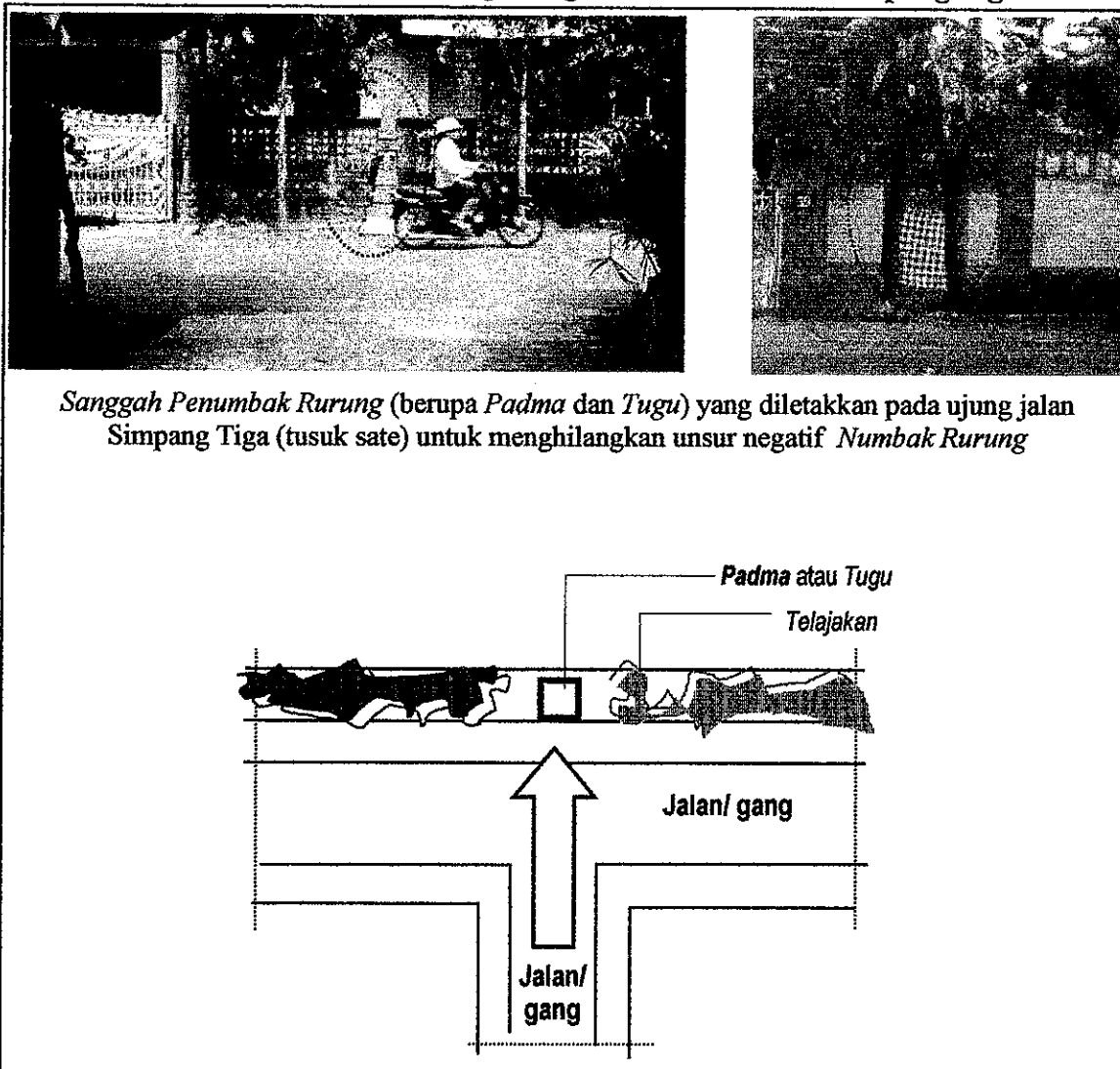


BANJAR 3,8 DAN 7 ORIENTASI KOSMOLOGIS
MELALUI PERWUJUDAN INTI DI TENGAH (CORE)
UNTUK MELETAKKAN BALE BANJAR
DAN PURA BANJAR

JL. SURAPATI

Selain orientasi yang menjadi pertimbangan dalam penataan perumahan adalah adanya pantangan-pantangan dalam meletakkan pekarangan rumah sesuai aturan perumahan tradisional Bali. Diantaranya, pekarangan rumah tidak boleh *Numbak Rurung* (tusuk sate) artinya jalan lurus langsung bertemu pekarangan rumah. Bila tidak bisa dihindari persimpangan tiga, pada satu sisi jalan harus dibangun *Sanggah Penumbak Rurung*. (lihat Gambar 4.15 dengan notasi pertigaan)

Gambar 4.15
***Sanggah Penumbak Rurung* Yang di Letakkan Pada Simpang Tiga**



Sanggah Penumbak Rurung (berupa *Padma* dan *Tugu*) yang diletakkan pada ujung jalan Simpang Tiga (tusuk sate) untuk menghilangkan unsur negatif *Numbak Rurung*

Sumber: Data lapangan dan Analisa (2002)

4.1.2.3 Perubahan Akibat Faktor Fungsional

Aspek fungsional dalam perumahan tradisional Bali adalah bagaimana menempatkan fungsi kedalam elemen ruang dalam kaitannya dengan orientasi kosmologis. Konsepsi *Sanga Mandala* yang membagi ruang menjadi sembilan segmen, dimana masing-masing elemen ruang memiliki fungsi sesuai dengan tingkat kesakralannya. Komposisi dan formasi ruang sesuai konsep *Tri Angga* dan *Sanga Mandala* berlaku secara makro maupun mikro, dalam skala rumah, banjar atau desa .

Seperti penjelasan dalam simbolik, munculnya variasi pola tata ruang desa-desa di Bali karena pendekatan orientasi kosmologis yang berbeda sesuai kondisi lokal. Melahirkan orientasi yang mengarah pada sumbu jalan *Kaja-klod* (akan mengarah pola linier), dan mengarah pada *plaza* sebagai inti (akan mengarah pola *Pempatan*). Pada desa-desa dataran yang memiliki inti (*core*) umumnya memiliki pola *Pempatan*, sedangkan pada desa-desa pegunungan yang memiliki inti sepanjang sumbu jalan utama memiliki pola linier (Universitas Udayana, 1982: 21).

Melihat perwujudan ruang perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, secara garis besar dapat digambarkan; terdiri dari dua zona perumahan yang dipisahkan jaringan jalan penghubung utama (Damaja 8m), masing-masing zona terdiri dari rumah-rumah yang dihubungkan jalan lingkungan (Damaja 5m) dan jalan lingkungan pembantu (Damaja 2m). Orientasi kegiatan masyarakat mengarah pada jalan penghubung utama, yang menghubungkan tempat Pura dan Balai RT secara terpisah. Melihat gambaran tersebut maka yang terbentuk adalah pola linier, untuk jelasnya lihat Gambar 4.16.

Fungsi ruang selain untuk rumah dan sirkulasi, juga untuk fasilitas umum yang memiliki fungsi tempat ibadah (Pura, Mesjid, Gereja), pendidikan (TK dan SD), Puskesmas, sosial kemasyarakatan (Balai RT, tempat bermain dan lapangan olah raga).



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMLAPURA

PETA: POJA LINER DALAM PERUMAHAN
PERUM PERUMNAS DI KOTA AMLAPURA

LEGENDA :

- [Pattern] = RUMAH TYPE RS D 36
- [Pattern] = RUMAH TYPE RS D 21
- [Pattern] = RUMAH TYPE RSS 21
- [Pattern] = SD
- [Pattern] = TK
- [Pattern] = PURA
- [Pattern] = MESJID
- [Pattern] = GEREJA
- [Pattern] = LAPANGAN OLAH RAGA
- [Pattern] = TEMPAT BERMAIN
- [Pattern] = BALAI RT
- [Pattern] = PUSKESMAS
- [Pattern] = KANTOR UNIT
- [Pattern] = BALAI RT

NO.GBR

SKALA



NO.HAL



122

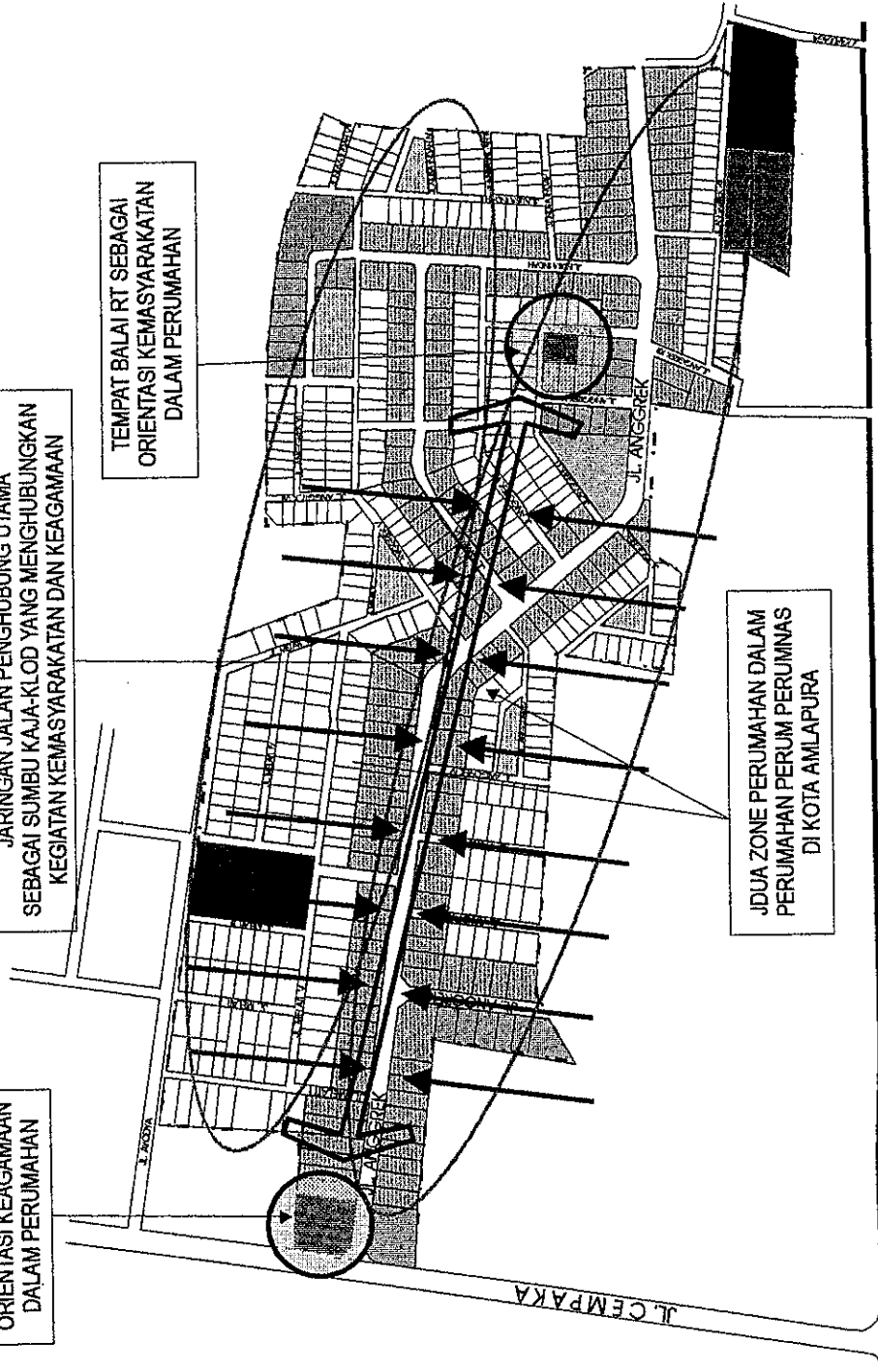
SUMBER : HASIL ANALISA (2002)

TEMPAT PURA SEBAGAI
ORIENTASI KEAGAMAAN
DALAM PERUMAHAN

JARINGAN JALAN PENGHUBUNG UTAMA
SEBAGAI SUMBU KAJA-KLOD YANG MENGHUBUNGKAN
KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN KEAGAMAAN

TEMPAT BALAI RT SEBAGAI
ORIENTASI KEMASYARAKATAN
DALAM PERUMAHAN

JDUA ZONE PERUMAHAN DALAM
PERUMAHAN PERUM PERUMNAS
DI KOTA AMLAPURA



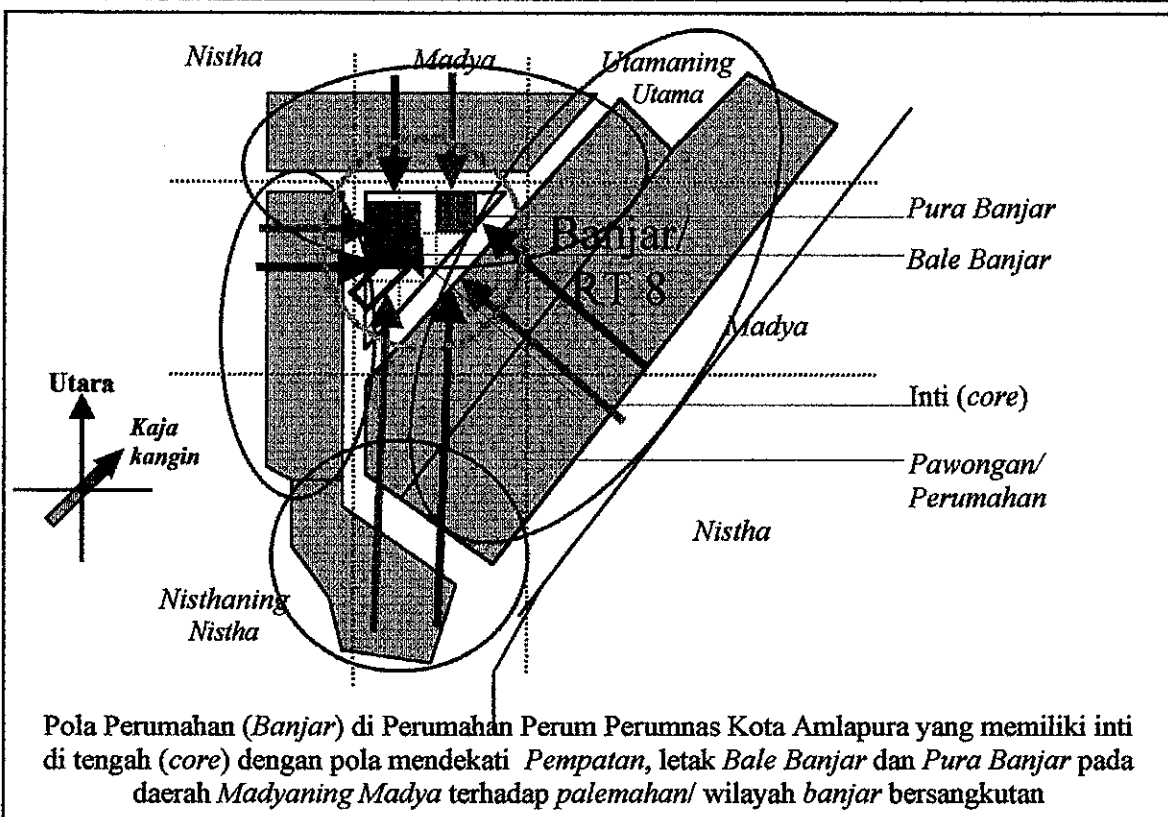
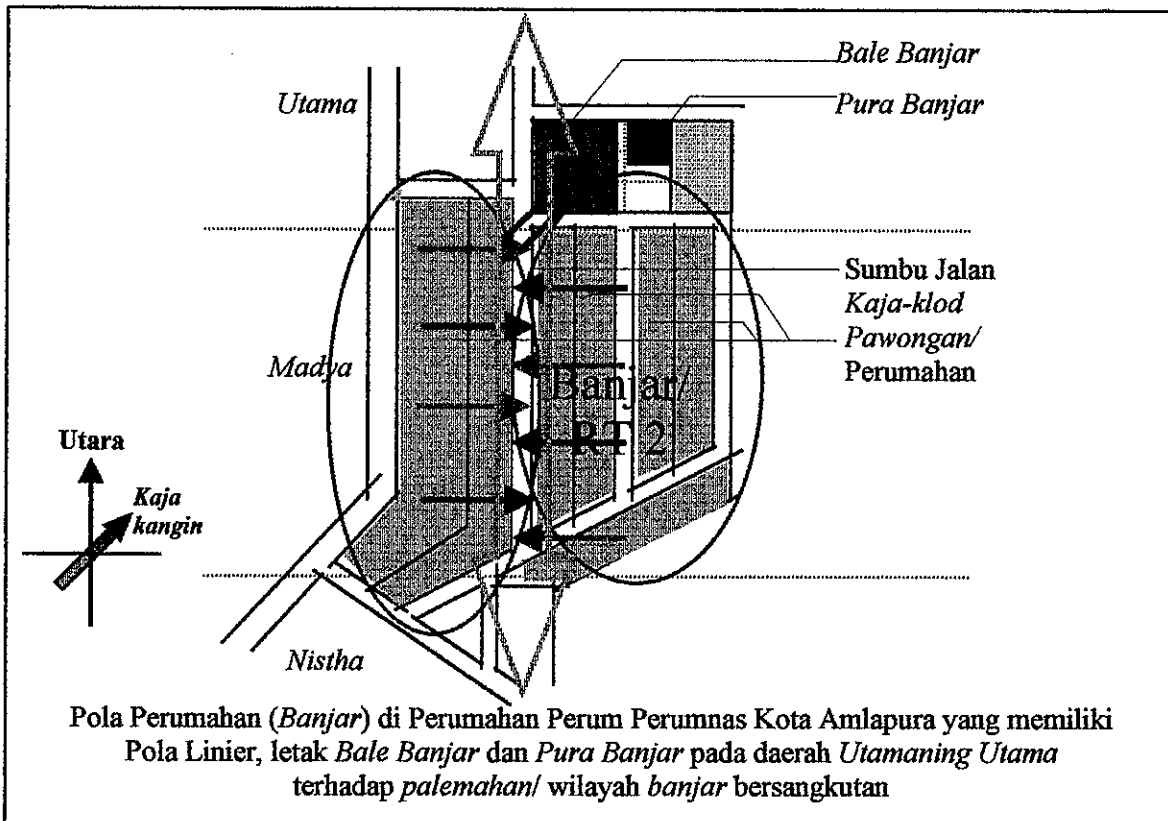
JL. SURAPATI

Dalam perkembangannya karena kebutuhan ruang untuk aktivitas budaya beberapa fasilitas umum mengalami perubahan fungsi, yang berarti telah terjadi perubahan ruang secara fungsional. Perubahan fungsional akan disertai dengan perubahan penataan ruang sesuai dengan fungsinya yang baru. Sebagaimana dijelaskan di depan, penataan ruang perumahan berkaitan dengan fungsi elemen ruang sesuai orientasi kosmologis.

Dengan adanya perubahan fungsi ruang dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, secara makro tidak akan mempengaruhi pola linier yang sudah terbentuk dengan jalan penghubung utama sebagai sumbu *Kaja-klod* (lihat kembali Gambar 4.16). Perubahan ruang secara fungsional, secara mikro akan mempengaruhi penataan ruang berkaitan fungsi elemen ruang dengan orientasi kosmologis setempat, juga interaksi ruang dengan fungsi rumah di wilayah banjaranya. Dari 3 banjar yang memiliki orientasi pada sumbu jalan *Kaja-klod* membentuk pola linier, dan 5 banjar yang memiliki orientasi di tengah pada inti (*core*) membentuk pola banjar mendekati pola *Pempatan*. Faktor fungsional dalam penataan ruang, dilakukan pada *Bale Banjar* dan *Pura Banjar* mengikuti konsep *Sanga Mandala*, dengan letak pada daerah *Utamaning Utama*. Menurut Parimin (1986 :51), terdapat 2 tipe pola tata ruang perumahan (*desa*) di Bali, yaitu: pola Linier dan pola *Crossroad/pempatan*. Untuk jelasnya lihat Gambar 4. 17.

Terbentuknya 8 banjar yang mengakibatkan perubahan ruang secara fungsional, mempengaruhi penataan ruang sampai akhirnya membentuk pola-pola banjar tersendiri. Terhadap perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, bukan saja menimbulkan perubahan fungsi fasilitas umum tapi dengan munculnya sub inti baru juga mempengaruhi interaksi ruang secara keseluruhan dan merubah pola perumahan menjadi bervariasi. Menurut Sularto (1987 :14), pola desa di Bali di kelompokkan menjadi tiga, yaitu: *Linear Pattern*, *Combination*, dan *Crossroad Pattern*. (lihat Gambar 4.18).

Gambar 4.17

Pola Perumahan (*Banjar*) Dalam Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura

Sumber: Analisa, (2002)



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUM PERUMINAS
DI KOTA AMILAPURA

PEJA: POLA GABUNGAN DALAM PERUMAHAN
PERUM PERUMINAS DI KOTA AMILAPURA

LEGENDA :

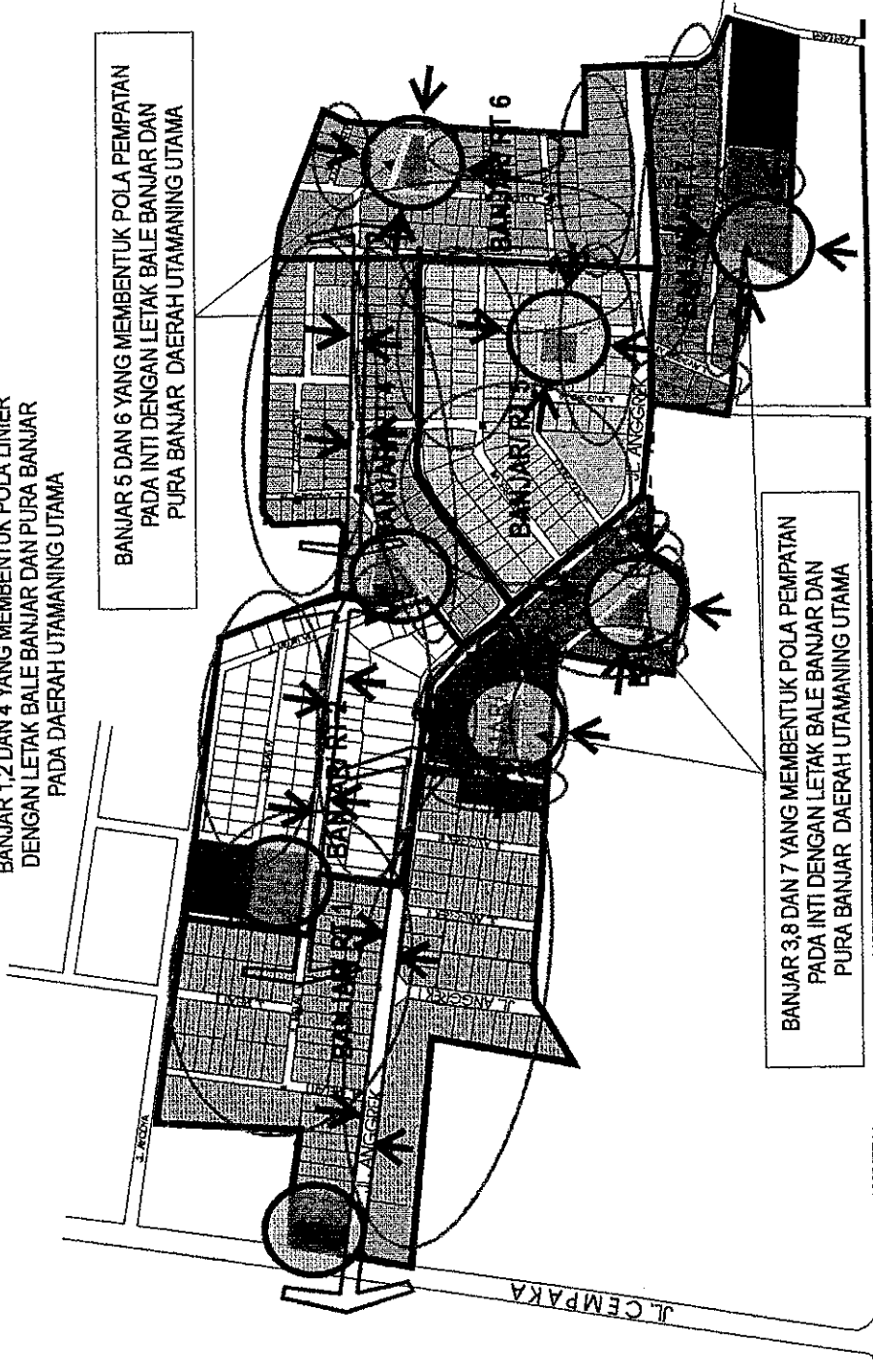
- = BATAS WILAYAH BANJAR
- = BALE BANJAR
- = PURA BANJAR
- = POLA LINIER
- = POLA PEMPATAN

NO.GRR	SKALA
4.18	0 25 50 75 100 M
NOHAL	
125	
SUMBER : ANALISA (2002)	

BANJAR 1,2 DAN 4 YANG MEMBENTUK POLA LINIER
DENGAN LETAK BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
PADA DAERAH UTAMAMING UTAMA

BANJAR 5 DAN 6 YANG MEMBENTUK POLA PEMPATAN
PADA INTI DENGAN LETAK BALE BANJAR DAN
PURA BANJAR DAERAH UTAMAMING UTAMA

BANJAR 3,8 DAN 7 YANG MEMBENTUK POLA PEMPATAN
PADA INTI DENGAN LETAK BALE BANJAR DAN
PURA BANJAR DAERAH UTAMAMING UTAMA



UPI-POSTAK-UNDIP

4.1.2.4 Perubahan Akibat Faktor Morfologi

Morfologi ruang perumahan tradisional di Bali sangat bervariasi sesuai dengan *Desa-Kala-Patra*, tapi tetap memiliki ciri-ciri susunan ruang yang sederhana dalam peruntukkan lahan yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; peruntukan inti (fasilitas keagamaan dan sosial), peruntukan terbangun (perumahan warga) dan peruntukan pinggiran (wilayah tidak terbangun sebagai sumber mata pencaharian). Pola-pola perumahan tradisional Bali sangat dipengaruhi potensi dan kondisi alam lingkungan lokasi desa (Bappeda Tingkat I Bali dan Universitas Udayana, 1982: 21).

Dan bila dilihat dari keberadaan desa-desa tradisional tersebut, lebih banyak dipengaruhi potensi ekonomi masyarakat terkait dengan sumber mata pencaharian. Desa petani umumnya berorientasi ke tengah dengan ruang terbuka untuk pelayanan bersama, memiliki pola *Catus patha*. Sedangkan desa nelayan memanjang menghadap laut dengan ruang terbuka dekat pantai, memiliki pola linier. Kondisi alam desa-desa pegunungan berorientasi ke puncak gunung sebagai tempat pemujaan bersama, memiliki pola linier. Bentuk fisik ruang atau morfologi merupakan hasil bentukan kehidupan sosial, ekonomi, budaya bahkan politik (Soetomo; diktat kuliah).

Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura diatas lahan 7,68 Ha merupakan kawasan perumahan dan sebagian besar sebagai daerah terbangun. Susunan ruang terdiri atas bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana tidak bersusun dengan lahan untuk fasilitas umum, dengan struktur jalan meliputi; jalan penghubung utama sebagai akses utama menuju jaringan jalan ke pusat kota, jalan lingkungan pembagi dan jalan-jalan lingkungan pembantu. (lihat eksisting tahun 1994, Gambar 3.3).

Perumahan yang dibangun bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui KPR BTN, maka sebagai persyaratan kepemilikan calon penghuni harus

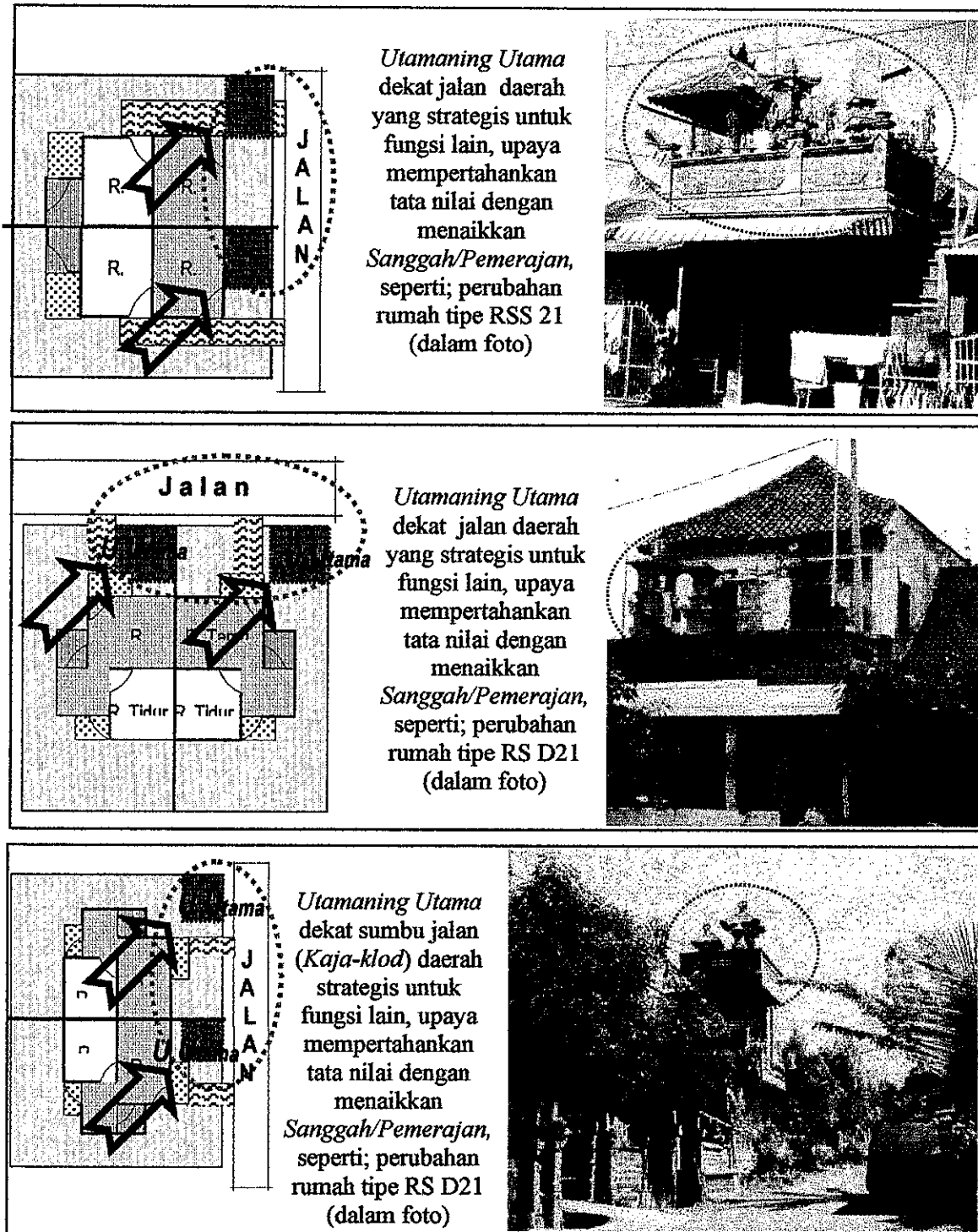
memiliki mata pencaharian. Penghuni, sebagian besar (67,6%) sebagai PNS/ABRI, (19,7%) swasta, (7,0 %) pengusaha, dan (5,6%) lainnya.

Masuknya pengaruh budaya dalam perumahan membutuhkan ruang untuk aktivitas budaya. Rumah yang terdiri dari: tipe RSS 21, RS D21 dan RS D36 sesuai standar hanya memiliki ruang tidur, dapur dan ruang tamu serta KM/WC, setelah dihuni mengalami perubahan dengan tambahan ruang untuk upacara agama Hindu (*Sanggah/Pemerajan*). Penelitian yang dilakukan Gelebet (1984: 52) dalam perumahan, tempat pemujaan merupakan bagian yang paling bertahan dibandingkan dengan bangunan lainnya. Tambahan *Sanggah/Pemerajan* dalam petak rumah, tata letak harus sesuai dengan orientasi kosmologis, pada daerah *Utamaning Utama*. Orientasi kosmologis setempat, *Utamaning Utama* pada arah timur laut, dengan demikian rumah yang terletak di barat dan selatan jalan akan memiliki orientasi *Utama* dekat jalan yang strategis untuk kegiatan lain (garase, warung). Dengan kondisi yang terbatas sedangkan tuntutan kegiatan agama membutuhkan ruang yang sesuai nilai-nilai tradisional, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menaikkan *Sanggah/Pemerajan* (bertingkat). Tanpa mengurangi maknanya, untuk penyatuan unsur *Purusha* (*akasa/angkasa*) dan *Pradana* (*pertiwi/bumi*), tempat pemujaan pada bangunan bertingkat dihubungkan dengan pipa yang diisi tanah. Fenomena ini sangat memungkinkan terjadi perubahan morfologi ruang dari satu lapis menjadi bersusun.

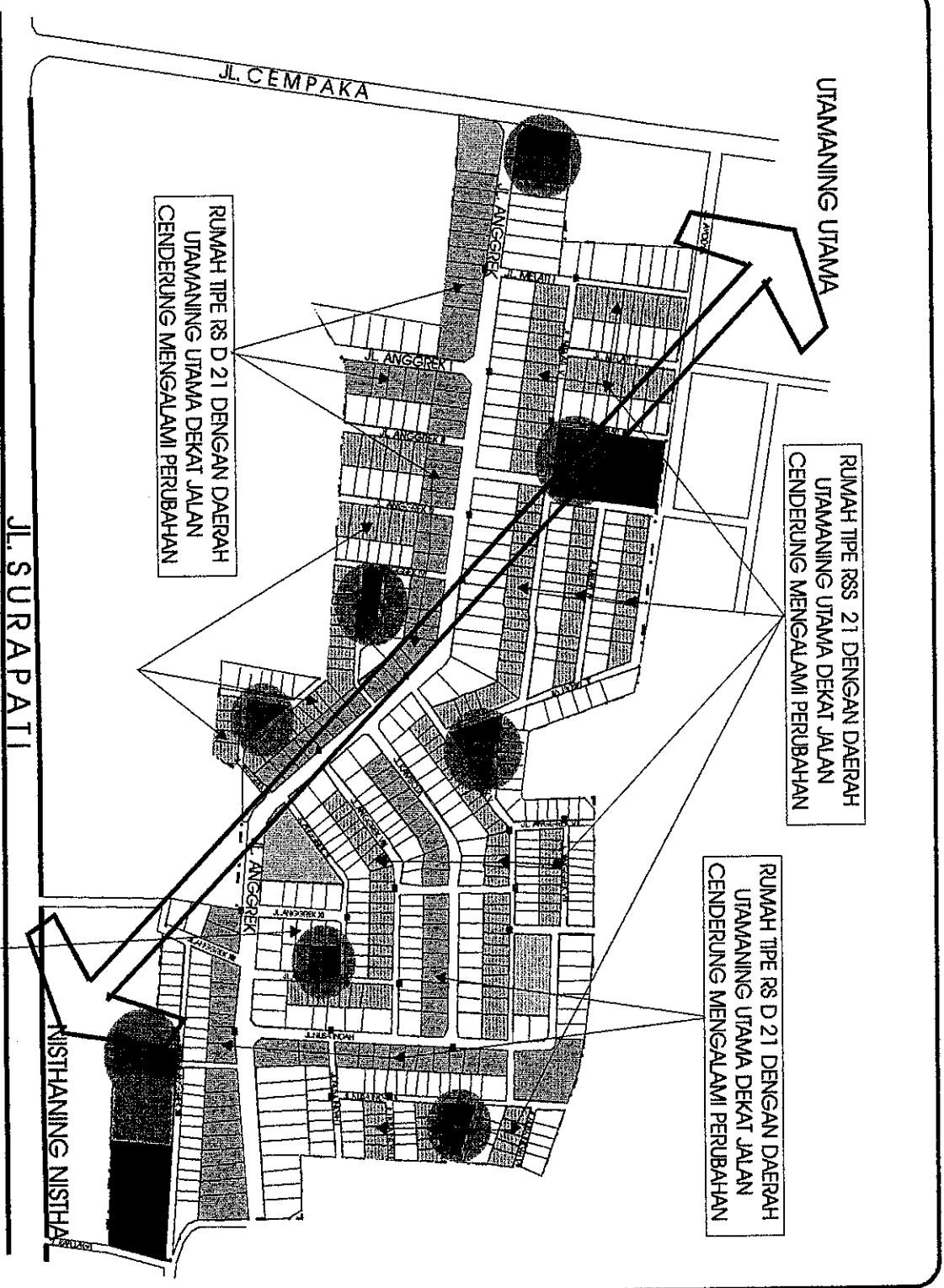
Dalam uraian di depan sudah banyak dijelaskan, pengaruh budaya telah menyebabkan perubahan fungsi pada fasilitas umum menjadi fasilitas sosial kemasyarakatan. Secara morfologi, telah terjadi perubahan kuantitas dan kualitas ruang. Ruang yang semula memiliki satu fungsi menjadi memiliki fungsi lebih, dan semakin intensif aktivitas dalam ruang logikanya terjadi peningkatan kualitas ruang, apalagi dengan meningkatnya hirarki ruang. Perubahan kuantitas ruang akibat kebutuhan aktivitas

keagamaan dan tata nilai tradisional, dari rumah tidak bersusun menjadi bertingkat, dapat dilihat dalam Gambar 4. 19.

Gambar 4.19
Bentuk Ruang Perumahan Perum Perumnas Di Kota Amlapura



Sumber: Data Lapangan dan Analisa (2002)



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PEKARUHI BUDAYA TRADISIONAL BALU TERHADAP PERUBAHAN PERUMAHAN PERUMI PERUMAS DI KOTA MALAPURA

PEJA : MOROLOG PERUMAHAN PERUMI PERUMAS DI KOTA MALAPURA

LEGENDA :

- = ORIENTASI BERLAWANGAN DNG JALAN
- = RS D 21 UTAMANING UTAMA DEKAT JALAN
- = RSS 21 UTAMANING UTAMA DEKAT JALAN
- = RSS 21 UTAMANING UTAMA DEKAT JALAN
- = FASILITAS UJUMU YG BERUBAH UNTUK BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
- = BALE BANJAR
- = PURA BANJAR

NO.GBR SKALA



NO.HAL

129



4.2 Analisis Faktor Pengaruh Perubahan Rumah Perum Perumnas

Dalam analisis sebelumnya sudah dijelaskan terjadi perubahan rumah pada perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, dengan perluasan maupun perombakan sehingga menimbulkan perubahan tampilan bangunan rumahnya. Perubahan rumah yang terjadi, sebagai akibat kebutuhan ruang aktivitas keagamaan (aktivitas budaya) dan penerapan nilai-nilai tradisional. Menurut Nurdin dalam Suryanto (2000: II-25), penyebab perubahan rumah bisa dari dalam (*endogeen*) atau dari luar (*exogeen*), faktor dari dalam berkaitan dengan kebutuhan hidup, aktivitas ekonomi dan budaya, sedangkan dari luar berkaitan kebutuhan penghuni terhadap lingkungan.

Untuk mengkaji keterkaitan perubahan rumah dengan budaya tradisional Bali, maka akan dianalisis perubahan rumah berkaitan dengan kebutuhan hidup sesuai dengan karakteristik penghuni untuk menggambarkan kebutuhan penghuni, faktor budaya karena kebutuhan ruang aktivitas budaya dan alasan penghuni merubah rumah untuk melihat pengaruh luar.

4.2.1 Karakteristik Penghuni Terhadap Perubahan Rumah

Diantara karakteristik penghuni yang dilihat keterkaitannya dengan perubahan rumah, yaitu: usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, anggota keluarga, mata pencaharian dan pendapatan. Maslow dalam Budihardjo (1998:57), rumah sebagai penghargaan merupakan ukuran kesuksesan penghuni, dan aktualisasi penghuni sebagai pengembangan pribadi, simbol atau status sosial penghuninya. Hayward dalam Budihardjo (1998:55), rumah sebagai pengejawantahan jati diri, sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya.

Hasil tabulasi silang (*crosstab*) antara variabel-variabel karakteristik penghuni dengan perubahan rumah, dapat dilihat dalam Tabel IV.1 di bawah.

TABEL IV.1
HASIL CROSSTAB KARAKTERISTIK PENGHUNI
DENGAN PERUBAHAN RUMAH

Karakteristik Penghuni	Perubahan Rumah			
	Crosstab X^2 (hitung) dgn X^2 (tabel)	Signifikan	Koefisien Kontingensi	Ket: Ada/Tidak Hubungan
Usia	2,009 < 9,487	0,734	0,116	Tidak ada/Lemah
Jenis Kelamin	0,816 < 5,991	0,665	0,107	Tidak ada/Lemah
Status Perkawinan	0,586 < 5,991	0,746	0,090	Tidak ada/Lemah
Pendidikan	4,215 < 12,591	0,648	0,237	Tidak ada/Lemah
Anggota Keluarga	7,448 < 15,507	0,489	0,308	Tidak ada/Lemah
Mata Pencaharian	14,237 > 12,591	0,027	0,409	Ada/Lemah
Pendapatan	8,132 < 15,507	0,421	0,321	Tidak ada/Lemah

Sumber: Analisa (2002)

Hasil analisis memperlihatkan, hanya mata pencaharian Kepala Keluarga dari karakteristik penghuni yang menunjukkan terdapat hubungan atau pengaruh dengan perubahan rumah dan hubungannya lemah. Dari responden yang diteliti, sebagian besar (67,6%) kepala keluarga memiliki mata pencaharian sebagai PNS/ABRI. Sedangkan variabel lainnya seperti; usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, anggota keluarga, dan pendapatan tidak ada kaitan.

Dengan hasil analisis keterkaitan perubahan rumah dengan karakteristik penghuni, menunjukkan terdapat hubungan atau pengaruh antara mata pencaharian sebagai identitas penghuni dengan perubahan rumah Perum Perumnas di Kota Amlapura. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran C.1.

4.2.2 Budaya Tradisional Terhadap Perubahan Rumah

Faktor-faktor budaya tradisional yang dilihat keterkaitannya dengan perubahan rumah, antara lain; pelaksanaan upacara agama, kebutuhan tempat *Sanggah/Pemerajan*

dan kaitannya dengan pelaksanaan upacara agama, penerapan nilai-nilai tradisional Bali, letak ruang tidur dan kaitannya dengan nilai-nilai tradisional Bali, serta letak KM/WC dan kaitannya dengan nilai-nilai tradisional Bali.

Rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti; tidur, makan, istirahat juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat. (Sulistyawati. dkk, 1985: 15). Kamar mandi/WC sebagai kebutuhan modern dijadikan indikator, karena dapat dikenali kegiatannya yang bersifat kotor atau menimbulkan limbah dan keberadaanya dalam perumahan tradisional sudah tidak asing lagi yang letaknya pada daerah *Nista*.

Tata nilai tradisional sangat erat hubungannya dengan agama dan adat, yang mengakibatkan masing-masing kegiatan memiliki tempat sesuai dengan nilainya. *Tri Angga* memberi arahan tata nilai, merupakan pedoman untuk mencapai tujuan penyelarasan *Bhuana agung* dengan *Bhuana alit*, sedangkan konsepsi *Sanga Mandala* menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan dan tata letak bangunan dalam pekarangan rumah (Sulistyawati. dkk, 1985: 7-10). Tata letak ruang tidur dan kamar mandi/WC dijadikan indikator karena diketahui kegiatannya memiliki sifat kegiatan yang berlainan, yakni ruang tidur bersifat tenang dan dalam rumah tradisional terletak pada daerah *Utama* atau lebih utama dari tempat kamar mandi/WC yang berkonotasi kotor.

Menurut Vincent M. (1983:35), rumah sebagai identitas pribadi, untuk mengungkapkan identitas pemilik melalui bentuk perumahan adalah sosio-budaya:

Hasil *crosstab* antara faktor-faktor budaya tradisional dengan perubahan rumah, dapat dilihat dalam Tabel IV.2 di bawah.

TABEL IV.2
HASIL CROSSTAB FAKTOR-FAKTOR BUDAYA TRADISIONAL BALI
DENGAN PERUBAHAN RUMAH

Budaya Tradisional	Perubahan Rumah			
	Crosstab X^2 (hitung) dgn X^2 (tabel)	Signifikan	Koefisien Kontingensi	Ket: Ada/Tidak Hubungan
Upacara agama	71,62 > 9,487	0,000	0,709	Ada/ Kuat
Tempat <i>Sanggah</i>	77,839 > 9,487	0,000	0,723	Ada/ Kuat
Tempat <i>Sanggah</i> dgn Upacara agama	25,913 > 3,841	0,000	0,566	Ada/ Kuat
Penerapan Nilai-Nilai Tradisional	48,781 > 9,487	0,000	0,638	Ada/ Kuat
Letak ruang tidur	66,436 > 9,487	0,000	0,695	Ada/ Kuat
Ruang tidur dgn nilai Tradisional	8,000 > 5,991	0,018	0,707	Ada/ Kuat
Letak KM/WC	58,007 > 9,487	0,000	0,671	Ada/ Kuat
Letak KM/WC dgn nilai Tradisional	11,333 > 9,487	0,023	0,766	Ada/ Kuat

Sumber: Analisa (2002)

Hasil analisis memperlihatkan, faktor-faktor budaya tradisional yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara agama, kebutuhan tempat *Sanggah Pemerajan* menunjukkan terdapat kaitan yang erat dan kuat terhadap perubahan rumah. Begitupun jika dikaitkan langsung antara pelaksanaan upacara agama dengan kebutuhan tempat *Sanggah Pemerajan* masih menunjukkan hubungan atau pengaruh yang kuat. Dari 71 responden yang diteliti 77,5% penghuni melaksanakan upacara di rumahnya yang sekarang juga di rumah asal dan 12,7% melaksanakan upacara hanya di rumahnya sekarang. Sedangkan yang menganggap perlu tempat *Sanggah/Pemerajan* dalam petak rumahnya mencapai 77,5%. Dapat disimpulkan perubahan rumah dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura berkaitan atau dipengaruhi oleh budaya tradisional.

Kemudian faktor budaya tradisional yang berhubungan dengan penerapan nilai-nilai tradisional serta pengaruh terhadap kesesuaian tata letak ruang tidur, kamar mandi/WC, juga menunjukkan hubungan yang erat dan kuat. Penghuni yang dijadikan responden 73,2% perlu penerapan nilai-nilai tradisional dalam rumah, dan yang

meletakkan ruang tidur pada daerah *Utama* (73,2%) serta kamar mandi pada daerah Nista (70,4%). Dapat disimpulkan perubahan rumah dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura sangat dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai tradisional Bali termasuk kesesuaian tata letak ruang tidur maupun kamar mandi/WC.

Dengan hasil analisis keterkaitan perubahan rumah dengan faktor-faktor budaya tradisional, menunjukkan terdapat hubungan atau pengaruh antara perubahan rumah pada perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dengan budaya tradisional Bali. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran C.1.

4.2.3 Alasan Merubah Rumah Terhadap Perubahan Rumah

Dalam upaya pengadaan rumah secara massal hasilnya adalah produk jadi (*finished product*). Pengadaan perumahan masih menekankan pada pencapaian target fisik semata dengan perencanaan model yang prototipe tanpa memperdulikan potensi dan kemampuan penghuni rumah. Perum Perumnas dalam pengadaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, membangun rumah klasifikasi sederhana sesuai standar (tipikal). Menurut Pontoh (1994: 27), penghuni akan selalu memberi tanggapan terhadap kekurangan rumahnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai yang diinginkan, bisa bersifat pasif dengan perubahan pada penghuni, juga bisa aktif dengan perubahan fisik pada rumahnya.

Dengan kepemilikan awal rumah tipe RSS 21, RS D21 atau RS D36, sampai saat ini kondisi rumah sudah jauh berubah, maka akan dikaji alasan penghuni merubah rumahnya, apakah berkaitan dengan kebutuhan ruang semata untuk keperluan anggota keluarga, karena kebutuhan aktivitas agama dan nilai-nilai tradisional atau karena alasan sosial ekonomi dan budaya. Menurut Silas (1991: 11), rumah adalah sebagian yang utuh

dari permukiman dan bukan semata-mata hasil fisik yang sekali jadi, merupakan proses berlanjut terkait dengan mobilitas sosial ekonomi dan kebutuhan budaya penghuninya.

Hasil *crosstab* antara variabel alasan penghuni merubah rumah dikaitkan dengan pendidikan kepala keluarga, mata pencaharian, pelaksanaan upacara agama dan penerapan nilai-nilai tradisional dengan perubahan rumah, dapat dilihat dalam Tabel IV.3 di bawah.

TABEL IV.3
HASIL CROSSTAB FAKTOR ALASAN MERUBAH RUMAH
DENGAN PERUBAHAN RUMAH

Alasan Merubah Rumah	Perubahan Rumah			
	<i>Crosstab</i> X ² (hitung) dgn X ² (tabel)	Signifikan	Koefisien Kontingensi	Ket: Ada/Tidak Hubungan
Tipe Rumah	3,174 < 9,487	0,529	0,207	Tidak ada/Lemah
Alasan Merubah Rumah	71,621 > 12,591	0,000	0,709	Ada/ Kuat
Alasan dengan Pendidikan	SMA (38,440 > 12,591)	0,000	0,708	Ada/ Kuat
Alasan dengan Mata Pencaharian	PNS/ABRI 49,039 > 12,591	0,000	0,711	Ada/ Kuat
Alasan dengan Upacara agama	7,000 > 3,841	0,008	0,707	Ada/ Kuat
Alasan dengan Nilai Tradisional	10,000 > 9,487	0,040	0,745	Ada/ Kuat

Sumber: Analisa (2002)

Tabel hasil analisis memperlihatkan, tipe rumah awal yang dimiliki penghuni tidak terdapat kaitan dengan perubahan rumah. Faktor yang menunjukkan pengaruh kuat, adalah; alasan merubah rumah dalam kaitannya dengan pendidikan, mata pencaharian, pelaksanaan upacara agama dan penerapan nilai-nilai tradisional. Dari 71 responden yang diteliti 91,6 % telah melakukan perubahan rumah, diantaranya (52,1%) memiliki alasan kebutuhan agama dan nilai-nilai tradisional, (23,9%) alasan sosial ekonomi dan budaya dan (15,5%) alasan kebutuhan ruang untuk anggota keluarga.

Bila dikaitkan alasan merubah rumah, mata pencaharian dan pendidikan sebagai karakteristik penghuni dengan perubahan rumah, menunjukkan hubungan yang kuat. Dapat disimpulkan responden yang sebagian besar (67,6%) bermata pencaharian PNS/ABRI serta

(53,5%) berpendidikan SMA, berpengaruh terhadap alasan penghuni melakukan perubahan rumah.

Juga keterkaitan antara alasan merubah rumah dengan pelaksanaan upacara agama dan penerapan nilai-nilai tradisional terhadap perubahan rumah, menunjukkan hubungan yang kuat. Responden yang sebagian besar (77,5%) melaksanakan upacara agama di rumah sekarang juga di rumah asalnya, serta (73,2%) menganggap perlu penerapan nilai-nilai tradisional, berpengaruh pada alasan penghuni melakukan perubahan rumahnya.

Jadi dapat disimpulkan alasan penghuni perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dalam melakukan perubahan rumah sangat dipengaruhi tingkat pendidikan, mata pencaharian kepala keluarga, juga pelaksanaan upacara agama dan penerapan nilai-nilai tradisional. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran C.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Temuan Studi

Pemerintah melalui Perum Perumnas wilayah VI cabang Bali mengadakan pembangunan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, Ibukota Kabupaten Karangasem-Bali. Pembangunan diatas lahan 7,68 Ha, menghasilkan 611 unit rumah standar masing-masing 412 unit (67,43%) tipe RSS 21, 170 unit (27,82%) tipe RS D21 dan 29 unit (4,75%) tipe RS D36. Serta menyediakan lahan untuk fasilitas umum, antara lain: tempat ibadah (Pura, Mesjid dan Gereja), Taman Kanak-kanak, SD, lapangan olah raga, Puskesmas, Balai RT dan 5 unit tempat bermain.

Pemilik sebagian besar (77,5%) adalah orang Bali yang beragama Hindu, yang memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap perumahan tradisional sebagai wadah aktivitas kehidupan sehari-hari, pelaksanaan upacara agama dan adat. Rumah tradisional sebagai perwujudan budaya, tidak semata menyangkut fisik tapi juga non fisik memiliki filosofi, konsepsi serta nilai-nilai yang dilandasi agama Hindu.

Penghuni, dari 71 responden (77,5%) melaksanakan upacara agama di rumahnya sekarang juga rumah asal, dan (12,7%) hanya di rumahnya sekarang, juga untuk melaksanakan kegiatan agama (77%) penghuni membutuhkan tempat *Sangghah/Pemerajan* dalam petak rumahnya. Penghuni (73,2%) juga perlu penerapan nilai-nilai tradisional dalam rumah.

Dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, dari 71 responden (71,8%) menghendaki lembaga kemasyarakatan banjar dinas, (18,3%) banjar dinas dan adat, dan (9,9%) banjar adat, juga kegiatan kemasyarakatan (49,3%) menghendaki banjar dinas dan

adat, (40,8%) banjar dinas serta (9,9%) banjar adat, yang membutuhkan fasilitas sosial (56,3%) tidak cukup satu tempat *Bale Banjar*. Pelaksanaan upacara agama dalam perumahan, (59,2%) di *Pura Banjarnya* sekarang juga banjar asal, (33,8%) hanya di *Pura Banjar* sekarang, yang membutuhkan fasilitas keagamaan (56,3%) tidak cukup satu tempat *Pura Banjar*. Penghuni sebagian besar (71,8%) perlu penerapan nilai-nilai tradisional dalam perumahan, dengan (71,8%) menghendaki letak *Bale Banjar* dan *Pura Banjar* pada daerah *Utama*.

Terjadi perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, pada bangunan rumah dan fasilitas umum. Rumah yang awalnya tipikal, kini kondisinya sudah berubah karena mengalami perluasan maupun perombakan, sedangkan fasilitas umum yang disediakan banyak mengalami perubahan fungsi, jenis dan jumlah. Penghuni yang melakukan perubahan rumah, diantaranya (52,1%) karena alasan kebutuhan agama dan nilai-nilai tradisional, (23,9%) alasan sosial ekonomi dan budaya, dan (15,5%) karena alasan kebutuhan ruang untuk anggota keluarga, sedangkan sebagai penyebab perubahan fasilitas umum (53,5%) karena kebutuhan adat.

Dari hasil analisis, dapat ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengaruh budaya tradisional Bali terhadap perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, sebagai berikut:

1. Bangunan rumah yang ada dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura sebagian besar (91,6%) mengalami perubahan, diantaranya (63,4%) dengan perluasan dan (28,2%) dengan perombakan. Melihat latar belakang penghuni yang melakukan perubahan rumah, adalah orang Bali beragama Hindu yang memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap konsepsi dan nilai-nilai perumahan tradisional, yang memberi pengaruh perubahan rumah adalah :

- a. Kebutuhan ruang untuk kegiatan agama; rumah bagi orang Bali selain untuk aktivitas sehari-hari juga untuk melaksanakan upacara agama (*Panca Yadnya*), untuk kegiatan sembahyang agama Hindu di rumah membutuhkan *Sanggah/Pemerajan*. Perubahan fisik rumah bagi penghuni yang melaksanakan upacara agama dalam petak rumahnya akan ditambah *Sanggah/Pemerajan*.
- b. Kebutuhan nilai-nilai tradisional; rumah sebagai wadah kehidupan dan tempat pelaksanaan kegiatan agama bagi orang Bali, memiliki filosofi untuk mencapai kesejahteraan harus terjadi hubungan yang harmonis antara *Bhuana agung* (wadah/rumah) dengan *Bhuana alit* (isi/manusia penghuni) yang sama-sama memiliki unsur *Tri Hita Karana* (*Atma, Prana, Angga*). Untuk tercapai keseimbangan dalam susunan jasad/angga, *Tri Angga* mengatur kegiatan sesuai tingkatan nilai (*Utama, Madya* dan *Nistha*). Konsepsi orientasi kosmologis *Sanga Mandala* menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan dan tata letak ruang. Dengan orientasi *Utamaning Utama/Kaja-kangin* (arah timur laut, untuk Kota Amlapura) untuk menempatkan *Sanggah/Pemerajan*, dan meletakkan kegiatan yang bersih/tenang pada daerah *Utama* serta yang kotor pada daerah *Nista*. Untuk menyesuaikan tata letak ruang sesuai dengan nilai-nilai tradisional, diantaranya (73,2%) meletakkan ruang tidur pada daerah *Utama* dan (70,4%) meletakkan kamar mandi/WC pada daerah *Nistha*. Perubahan fisik rumah untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai tradisional dilakukan perombakan rumah. Perubahan rumah yang terletak di barat dan selatan (daerah *Utamaning Utama* dekat jalan) cenderung mengalami perubahan sampai dengan meningkatkan bangunan untuk tempat *Sanggah/Pemerajan*.

2. Perubahan kawasan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, dari observasi dengan melihat perubahan fasilitas umum yang disediakan semula, seperti; Balai RT, Taman kanak-kanak, tempat Pura, sebagian lapangan olah raga, sebagian tempat Gereja, 4 tempat bermain berubah menjadi *Bale Banjar/RT* dan *Pura Banjar*. Juga terjadi perubahan sistem kemasyarakatan, yaitu; dari hanya lembaga pemerintahan (RT/banjar dinas) menjadi lembaga pemerintah dan adat (keagamaan). Perubahan kawasan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura dipengaruhi budaya tradisional Bali, yang dapat dijelaskan melalui faktor-faktor perumahan tradisional sebagai berikut;

- a. Faktor Sosial; perumahan di Bali yang dikenal *desa* atau *banjar* (sub unit *desa*) dalam satu kesatuan teritorial, sesuai dengan fungsi memiliki dua pengertian, yaitu; sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi disebut *desa dinas* atau *banjar dinas*, dan lembaga adat yang mengatur pelaksanaan upacara agama (Hindu) dan kegiatan sosial yang berkaitan dengan adat disebut *desa adat* atau *banjar adat*. Dalam perumahan Perum-Perumnas di Kota Amlapura, terbentuk lembaga kemasyarakatan banjar dinas dan *banjar adat*, dengan kegiatan kemasyarakatan dinas dan adat serta agama. Dari jumlahnya yang semula 2 RT/lingkungan menjadi 8 *banjar/RT*. Perumahan atau *banjar adat* sebagai wadah kehidupan masyarakat, pelaksanaan agama dan adat, memiliki filosofi untuk tercapainya kesejahteraan harus terjadi keharmonisan antara *Bhuana agung* dengan *Bhuana alit* melalui unsur-unsur *Tri Hita Karana*. Dalam *banjar*, perwujudan *Atma* adalah *Pura Banjar*, *Prana* adalah *krama banjar* (warga Hindu) dan *Angga* adalah wilayah termasuk fasilitas *Bale banjar*. Perubahan kawasan perumahan, dalam setiap Banjar/RT selain memiliki Balai RT/*Bale banjar* (untuk

tempat pertemuan) juga terdapat *Pura Banjar* tempat pemujaan agama Hindu, sebagai atribut *banjar adat*.

- b. Faktor Simbolik; berkaitan dengan orientasi kosmologis sebagai pedoman dalam meletakkan kegiatan, yang bersifat sakral (berkaitan dengan keagamaan) pada daerah *Utama*, dan kegiatan yang bersifat profan (berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan) pada daerah yang lebih rendah. Perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, yang kini terbentuk menjadi 8 *banjar*, yang dijadikan indikator kesakralan adalah *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*. Arah sakral disesuaikan dengan orientasi kosmologis dalam lingkup wilayah *banjar* masing-masing, diantaranya; 3 *banjar* orientasi *Utamaning Utama* berpatokan pada sumbu jalan *Kaja-klod* dan 5 *banjar* orientasi mengarah ke tengah (*Madyaning Madya*) sebagai inti untuk meletakkan *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*. Juga menjadi pertimbangan dalam penataan perumahan adalah pantangan *Numbak Rurung* (tusuk sate). Perubahan fisik dalam kawasan perumahan, dalam setiap simpang tiga dibangun *Padma* atau *Tugu*, untuk menghilangkan pengaruh negatif *numbak rurung*.
- c. Faktor Fungsional; berkaitan dengan penempatan fungsi kedalam elemen ruang dalam kaitan orientasi kosmologis yang melahirkan pola perumahan. Secara fungsional telah terjadi penambahan dan perubahan fungsi ruang dengan munculnya fungsi ruang budaya, yaitu *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*. Secara mikro, dalam skala *banjar* mempengaruhi penataan ruang dan interaksi ruang terhadap perumahan di wilayahnya, merupakan inti baru dengan membentuk pola linier dan mendekati pola *pempatan*. Secara makro, terbentuknya pola-pola *banjar* merupakan sub inti baru dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura,

yang menimbulkan perubahan interaksi ruang secara keseluruhan dan kualitas ruang serta pola perumahan. Perubahan pola perumahan linier menjadi gabungan.

- d. Faktor Morfologis; perubahan fasilitas umum menjadi ruang kegiatan agama mengakibatkan perubahan hirarkhi ruang (menjadi *Utama*). Orientasi kosmologis bagi rumah-rumah yang terletak di barat dan selatan jalan, daerah *Utamaning Utama* untuk meletakkan *Sanggah/Pemerajan* dekat dengan jalan yang memiliki fungsi strategis. Upaya yang dilakukan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional, ada kecendrungan dengan bertingkat (vertikal). Perubahan kawasan perumahan, terjadi perubahan kuantitas dan kualitas ruang.
3. Penghuni perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura yang heterogen dengan karakter masing-masing, seperti; usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, anggota keluarga dan pendapatan, yang berpengaruh terhadap perubahan rumah adalah mata pencaharian
4. Faktor-faktor budaya tradisional Bali sangat berpengaruh terhadap perubahan rumah dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura. Faktor-faktor budaya tersebut, antara lain; yang berhubungan kegiatan keagamaan yaitu; pelaksanaan upacara agama di rumah dan kebutuhan tempat *Sanggah/Pemerajan*, dan yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional, yaitu; penerapan nilai-nilai tradisional, tata letak ruang tidur dan kamar mandi/WC sesuai dengan nilai-nilai tradisional.
5. Faktor-faktor alasan penghuni merubah rumah sangat berpengaruh terhadap perubahan rumah, faktor tersebut antara lain; alasan merubah rumah itu sendiri, juga bila dikaitkan dengan pendidikan, mata pencaharian, pelaksanaan upacara agama di rumah dan penerapan nilai-nilai tradisional.

5.2 Kesimpulan

Dari uraian diatas berkaitan dengan perubahan rumah dan kawasan perumahan serta faktor-faktor yang berpengaruh dapat disimpulkan; perubahan rumah dalam perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, karena adanya pengaruh budaya tradisional Bali, ini bisa dilihat dari penambahan *Sanggah/Pemerajan* yang merupakan kebutuhan ruang bagi penghuni yang melaksanakan kegiatan upacara agama Hindu, dan perombakan rumah adalah untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai tradisional sebagai perwujudan budaya tradisional Bali.

Perubahan kawasan perumahan juga disebabkan pengaruh budaya tradisional, dilihat dari perubahan fasilitas umum menjadi *Bale Banjar* dan *Pura Banjar*, serta penambahan *Padma* atau *Tugu* pada simpang tiga, yang merupakan penambahan elemen fisik ruang. Sosial kemasyarakatan, yaitu; terbentuknya *banjar adat* dalam komunitas perumahan yang merupakan lembaga tradisional, berfungsi melaksanakan upacara agama dan kegiatan sosial kemasyarakatan, yang membutuhkan fasilitas kelengkapan banjar berupa *Pura Banjar* dan *Bale Banjar* yang juga sebagai atribut *banjar*. Juga berkaitan dengan nilai-nilai perumahan tradisional, seperti; perubahan orientasi kosmologis, munculnya pola *banjar*, serta perubahan hirarkhi ruang dan kuantitas ruang.

Terdapat hubungan yang kuat atau pengaruh budaya tradisional Bali terhadap perubahan rumah, dilihat dari faktor-faktor budaya tradisional, antara lain; kebutuhan ruang keagamaan, meliputi pelaksanaan upacara agama di rumah dan kebutuhan tempat *Sanggah/Pemerajan* serta penerapan nilai-nilai tradisional, seperti; tata letak ruang tidur dan kamar mandi/WC agar sesuai dengan tata nilai tradisional. Perubahan perumahan Perum Perumnas di Kota Amlapura, secara spasial dapat dilihat dalam Gambar 5.






PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOJA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH BUDAYA TRADISIONAL BALI TERHADAP
PERUBAHAN PERUMAHAN PERUMIHAN
DI KOTAMALAPURA

PEJA : PERUBAHAN KAWASAN PERUMAHAN
PERUMIHAN DI KOTA MALAPURA

LEGENDA :

-  = PURA BANJAR
-  = BALE BANJAR
-  = SANGGAH PENUMBAK RURING

NO.GBR

5

SKALA



NOHAL

144



SUMBER : SURVEI (2002)

PERUBAHAN FASILITAS UMUM
DARI TEMPAT PURA MENJADI
BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
MILIK BANJAR 1

PERUBAHAN FASILITAS UMUM
DARI TEMPAT TAMAN KANAK-KANAK
MENJADI BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
MILIK BANJAR 2

PERUBAHAN FASILITAS UMUM
DARI TEMPAT BERMAIN MENJADI
BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
MILIK BANJAR 4

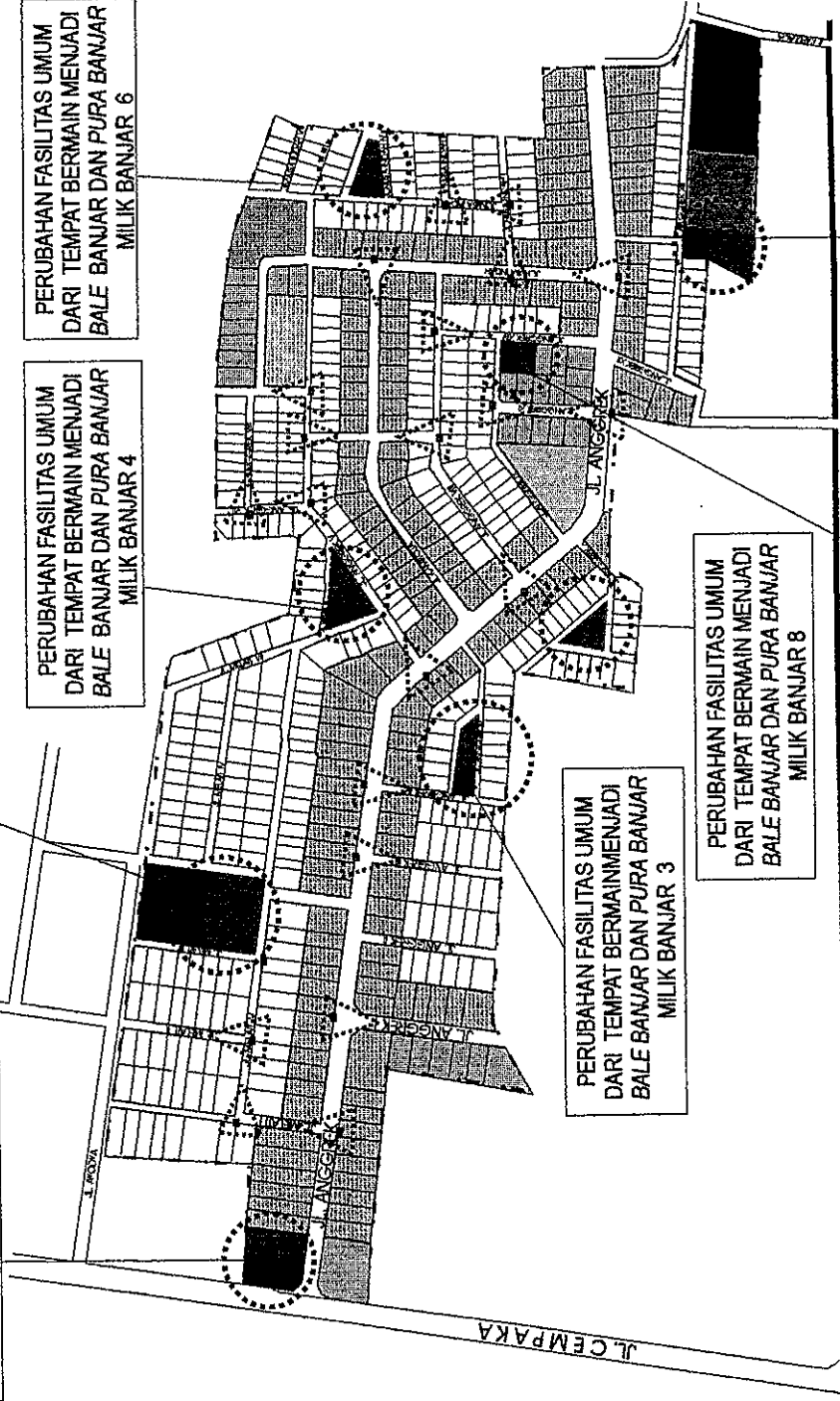
PERUBAHAN FASILITAS UMUM
DARI TEMPAT BERMAIN MENJADI
BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
MILIK BANJAR 6

PERUBAHAN FASILITAS UMUM
DARI TEMPAT BERMAIN MENJADI
BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
MILIK BANJAR 3

PERUBAHAN FASILITAS UMUM
DARI TEMPAT BERMAIN MENJADI
BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
MILIK BANJAR 8

PERUBAHAN FASILITAS UMUM
DARI TEMPAT BALAI RT MENJADI
BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
MILIK BANJAR 5

PERUBAHAN FASILITAS UMUM
DARI SEBAGIAN LAPANGAN OLAH RAGA
MENJADI BALE BANJAR DAN PURA BANJAR
MILIK BANJAR 7



5.3 Rekomendasi

Untuk manfaat hasil penelitian ini bagi pembangunan perumahan di masa yang akan datang, diberikan rekomendasi beberapa hal, antara lain:

1. Rekomendasi untuk Perum Perumnas :

- Pemerintah melalui Perum Perumnas dalam pengadaan perumahan agar memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dalam rangka ikut mempertahankan budaya daerah sebagai aset budaya nasional, yang dapat dilakukan mulai perencanaan dengan melibatkan peran serta masyarakat lokal. Melalui pemanfaatan konsultan perencana dan atau SDM lokal.
- Dalam pengadaan perumahan di Bali agar diperhatikan kebutuhan aktivitas budaya dalam rumah adalah sebagai kebutuhan dasar, maka harus memungkinkan pengembangan fungsi keagamaan dalam rumah.
- Perumahan di Bali memiliki konsepsi dan nilai-nilai tradisional yang spesifik (contoh; Bali utara berbeda dengan Bali selatan), yang menjadi pertimbangan dalam tata letak ruang dan penataan perumahan, secara fisik harus diperhatikan perwujudan arah orientasi dalam lingkungan setempat, seperti sumbu jalan *Kaja-klod* dan pola-pola perumahan yang menjadi identitas setempat.

2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah :

- Konsepsi *Tri Hita Karana* diyakini telah mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara perumahan/wadah buatan (*Bhuana agung*) dengan isi/manusia (*Bhuana alit*), untuk itu agar dilakukan penjabaran yang lebih bersifat teknis untuk dapat dijadikan arahan dalam penataan ruang, perencanaan fisik dan acuan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan.

3. Rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya :

- Agar dilakukan studi batasan luas minimal kebutuhan ruang untuk tempat *Sanggah/Pemerajan* dalam rumah yang dapat dipakai pedoman dalam perencanaan perumahan di masa yang akan datang.
- Agar dilakukan studi luasan wilayah yang efektif untuk satu kesatuan komunitas lembaga adat (*desa* atau *banjar*), untuk memudahkan penyediaan tempat fasilitas kelengkapan adat dalam perumahan.

DAFTAR PUSTAKA

B u k u

- Atmanadhi, I N S. 1974. *Astha Kosala-Kosali-Gumi Bhagawan Swakarma*. Denpasar: Aksara.
- Astika, Sudhana Ketut. et al. 1986. *Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali.
- Abu, Rivai. 1981. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali.
- Budihardjo, Eko. 1986. *Architectural Conservation In Bali*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- _____. 1998. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Budihardjo, Eko (ed.). 1998. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Catanese, Antony J. dan James C Snyder. 1996. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gelebet, I Nyoman. 1986. *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakrata: PT. Gramedia.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983a. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 1*. Denpasar: Bali Agung
- _____. 1983b. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*. Denpasar: Bali Agung
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Realestat Indonesia – PT Rakasindo.
- Kagami, Haruya. 1988. *Balinese Traditional Arrchitecture In Process*. Inuyama-Japan: The Litle World Museum Of Man.
- Morris, Earl W. dan Winter, Mary. 1978. *Housing, Family and Society, United of America*: John Wiley and Sons.

- Mantra, I. B. 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution S. 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohamad. 1985. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Parimin, Ardi P. 1986. *Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village, Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept In Bali*. Japan: Disertasi, Universitas Osaka.
- Purwita, Ida Bagus Putu et al. 1987. *Kebudayaan Dan Pembangunan*. Denpasar: Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali.
- Panudju Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudharma, I Nengah. 1971. *Desa Adat (Di Bali) Sebagai Lembaga Sosial Religius Berdasarkan Falsafah Tri Hita Karana*. Denpasar: Parisada Hindu Dharma Pusat.
- Sastrowardoyo, R. Sularto. 1987. *Some Basic Norm Traditional Architecture of Bali*. Denpasar: Building Information Centre.
- Soebandi, Ktut. 1990. *Konsep Bangunan Tradisional Bali*. Denpasar: Percetakan Bali Post.
- Suryabrata, Sumadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Singgih. 1999. *SPSS: Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Supriyanto, Aries. 2000. "Perubahan Fisik Rumah Tinggal Dengan Adanya Usaha Yang Bertumpu Pada Rumah Tangga (UBR) Di Kampung Sekarbela Kotamadya Mataram". Tesis tidak diterbitkan, Bidang Keahlian Permukiman Kota dan Lingkungan, Program Studi Arsitektur, Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Turner, John F.C. dan Fichter, Robert. 1972. *Freedom To Build. – Dweller Control of The Housing Process*, London: The Macmillan Company.
- Turner, John F.C. 1991. *Housing By People, Towards Autonomy In Building Environments.* : Great Britain: Marion Boyars Publishers Ltd.

Yudohusodo, Siswono et al 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

Perundang-Undangan Dan Peraturan Pemerintah

Badan Penelitian Dan Pengembangan PU Pusat Penelitian Dan Pengembangan. Pemukiman. 1984. *Peraturan Bangunan Nasional*. Bandung. Departemen Pekerjaan Umum.

Bank Tabungan Negara. 1984. *Ketentuan Umum Proyek Perumahan dan rumah Sederhana yang dapat Dikaitkan dengan Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara*, Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor:54/PRT/1991, Tentang *Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana*.

Keputusan Menteri PU Nomor 20/KPTS/1986 Tentang *Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun*.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan rakyat Nomor 9/KPTS/1992 *Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Dengan Lingkungan Hunian Yang Berimbang*.

Undang -- Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 *Tentang Perumahan Dan Permukiman*.

Makalah Seminar, Jurnal Dan Terbitan Terbatas

Bappeda Tingkat I Bali dan Universitas Udayana. 1982. *Pengembangan Arsitektur Tradisional Bali Untuk Keresasian Alam Lingkungan, Sikap Hidup, Tradisi Dan Teknologi*. Denpasar: Bappeda Tingkat I Bali.

Gelebet, I Nyoman. 1984. *Pengaruh Teknologi Pada Pemukiman Tradisional*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. 1984. *Rumusan Arsitektur Bali*. Denpasar: Dinas Pekerjaan Umum.

Meganada, I Wayan. 1990. *Morfologi Grid Pattern Pada Desa Di Bali*. Bandung: Program Pasca Sarjana S-2 Arsitektur, Institut Teknologi Bandung.

Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali. 1991. *Desa Adat Pusat Pembinaan Kebudayaan Bali*.

Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali. 1991. *Desa Adat Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*.

- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. 1983. *Inventarisasi Aspek-Aspek Nilai Budaya Bali*. Denpasar: Proyek Bantuan Sosial Tk. I Bali.
- Putra, I Gusti Made et al. 1987. *Pengaruh Pariwisata Dalam Perkembangan Bangunan Perumahan Tradisional Bali Di Desa Bualu*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Pontoh, Nia Kunarsih. 1994. "Pola Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Nomor 12 April 1994.
- Potensi Kecamatan Karangasem 2000*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem, 2000.
- Potensi Kecamatan Bebandem 2000*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem, 2000.
- Sulistiyawati, et al. 1985. *Preservasi Lingkungan Perumahan Pedesaan Dan Rumah Tradisional Bali Di Desa Bantas, Kabupaten Tabanan*. Denpasar: P3M Universitas Udayana.
- Sularto, R. 1974. *Arsitektur Tradisional Bali dan Permasalahannya*. Denpasar: Building Information Centre.
- Silas, Johan. 1995. *Perum Perumnas Dalam Tantangan Tugas Hasil Perjalanan 1974 – 1994*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Silas, Johan, et al. 1991. *Laporan Penelitian Keadaan Perumahan Kumuh Di Desa Pinggiran Surabaya*. Surabaya: Pusat Penelitian ITS.
- Soetomo, Sugiono, "Urbanisasi dan Keberagaman Morfologi Ruang Kota" Diklat Kuliah. Semarang: MTPK Universitas Diponegoro.
- Tandjung, Akbar. 1993. *Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman Di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pembangunan Perumahan dan Permukiman Di Bali Pada PJPT II, Denpasar, Oktober 1993.
- Universitas Udayana. 1976. *Permasalahan Dalam Arsitektur Tradisional Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.